



Universitas Kristen Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

SURAT TUGAS

Nomor : 032B/UKI.F7.D/PP.1.6.4/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia menugaskan yang tersebut di bawah ini :

Nama : Fransiskus X.Gian Tue Mali, S.Ikom., M.Si

Jabatan : Dosen Tetap Prodi Ilmu Politik Fisipol

Sebagai Pencatatan Ciptaan dengan Jenis Ciptaan Karya Ilmiah dengan judul ciptaan “Pendidikan Politik berdasarkan Pancasila dalam menghasilkan Zoom Politicon Indonesia yang Berkarakter”.

Demikian Surat Tugas ini dibuat, agar digunakan sebagaimana maksud dan tujuannya.

Jakarta, 4 Februari 2021

Dekan,



Angel Damayanti, M.Si., M.Sc., Ph.D

Tembusan:

1. Wakil Dekan Fisipol UKI
2. Kaprodi IPOL Fisipol UKI



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202117404, 25 Maret 2021

Pencipta

Nama : **Fransiskus X.Gian Tue**
Alamat : Jl. Surilang 005/012 Gedong **Åç**ÅÅ Pasar Rebo, Jakarta, DKI JAKARTA, 13710
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Fransiskus X.Gian Tue**
Alamat : Jl. Surilang 005/012 Gedong **Åç**ÅÅ Pasar Rebo, Jakarta, DKI JAKARTA, 13710
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Artikel)**
Judul Ciptaan : **Pendidikan Politik Berdasarkan Pancasila Dalam Menghasilkan Zoon Politicon Indonesia Yang Berkarakter**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 9 November 2019, di Jakarta
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000244126

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**PENDIDIKAN POLITIK BERDASARKAN PANCASILA DALAM
MENGHASILKAN *ZOON POLITICON* INDONESIA YANG BERKARAKTER**
Fransiskus X. Gian Tue Mali¹

Abstrak

Pancasila sebagai sumber falsafah hidup bangsa, dasar negara, dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia atau singkatnya adalah ideologi berbangsa dan bernegara Indonesia hakikatnya harus menjadi ciri dari karakter *zoon politicon* Indonesia itu sendiri. Kegagalan dalam proses implementasi ini telah terwujud dalam begitu luar biasanya masalah bangsa yang saat ini telah merambah berbagai aspek kehidupan, sehingga dikatakan sebagai masalah multidimensional bangsa Indonesia. Oleh karena itu mengimplementasikan Pancasila sebagai ciri karakter bangsa Indonesia sudah menjadi tugas seluruh elemen bangsa, termasuk institusi pendidikan. Karena proses insemniasi Pancasila sebagai karakter bangsa adalah tugas utama institusi pendidikan di Indonesia. Program studi ilmu politik Universitas Kristen Indonesia sebagai bagian dari institusi pendidikan, memiliki kewajiban dan tugas yang sama. Terutama dalam melahirkan *zoon politicon* Indonesia yang berkarakter Pancasila. Karakter *zoon politicon* yang didasarkan pada Pancasila adalah kemampuan *zoon politicon* untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan dan keagamaan, kemanusiaan yang didasarkan pada penghormatan terhadap HAM, perwujudan kepentingan umum yang diimplementasikan dalam integrasi nasional, melalui permusyawaratan berkeadilan sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial.

Kata Kunci: *Pendidikan Politik, Pancasila, Karakter Zoon Politicon*

1. Pendahuluan

Politik tidak bisa dipungkiri telah menjadi salah satu aktivitas utama manusia selama hidup. Peningkaran terhadap politik dapat diartikan sebagai pengkhianatan manusia terhadap esensinya sebagai manusia. Hal ini dikarenakan manusia selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pribadi, maupun kelompok. Upaya yang dimaksud dilakukan dengan cara berinteraksi dengan makhluk lainnya. Interaksi inilah kodrat hakiki manusia yang tidak bisa dipungkiri pula. Interaksi dalam kehidupan manusia ini merupakan pertarungan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga manusia akan menggunakan berbagai cara, strategi, dan didasarkan pada nilai atau ideologi tertentu. Kesemua upaya tersebut digerakkan oleh intelegensia dan pikiran yang dimiliki manusia, tidak dimiliki oleh hewan, maka manusia disebut sebagai *zoon politicon* oleh Aristoteles.

Manusia dipandang sebagai individu bukan dalam makna kemandiriannya yang tidak membutuhkan makhluk lain. Keindividuan manusia dipandang sebagai upaya bebas manusia dalam menentukan apa yang ingin dilakukannya dan apa yang tidak ingin dilakukan. Mau tak mau ia harus mengambil sikap terhadap alam dan masyarakat sekelilingnya, ia dapat menyesuaikan diri dengan harapan orang-orang lain, tetapi ia dapat juga bertindak melawan mereka (Magnis-Suseno, 2016 : 12). Lalu bagaimanakah sisi kesosialan manusia itu dipandang?, ia bukan sekedar penambahan kondisi eksternal terhadap keindividuan yang sudah ada. Melainkan secara mendalam dan hakiki menentukan manusia dalam individualitas dan

¹ Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, periode 2018-2022.

kepribadiannya yang khas. Manusia hanya mempunyai eksistensi karena orang lain. Dan ia hanya dapat hidup dan berkembang karena ada orang lain (Magnis-Suseno, 2016). Sehingga dapat diambil kesimpulan manusia dibentuk oleh masyarakat disekitarnya, dan masyarakat disekitarnya dapat dibentuk dengan didasarkan pada nilai-nilai tertentu (rekayasa sosial). Oleh karena itu Pendidikan memainkan peran terpenting dalam upaya yang dimaksud.

Inseminasi nilai melalui Pendidikan menjalani peran terpenting agar dapat membentuk masyarakat sesuai yang diinginkan. Termasuk cara-cara berpolitik. Hal ini disadari oleh manusia sejak dahulu kala, sehingga Pendidikan telah diinstitusikan. Melalui institusi-institusi Pendidikan inilah nilai-nilai tersebut di-inseminasikan. Tujuan dari upaya tersebut adalah untuk menciptakan integrasi dan kestabilan sosial. Pendidikan telah menjadi alat bagi sistem pemerintahan untuk mewujudkan tujuan dari pemerintahan yang dianut. Sistem pemerintahan akan menghasilkan keputusan regulasi tentang nilai-nilai yang dimaksud yang harus dijalani oleh semua warga negara, lalu menggunakan Pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Selain penggunaan “alat paksa” yang dimiliki oleh pemerintah. Sehingga pada akhirnya interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dapat terwujud dengan tetap terjaminnya hak-hak keindividuannya dan hak masyarakat umum.

Indonesia sebagai negara yang terbentuk dengan latar sosial yang majemuk berupaya untuk mewujudkan bangsa yang dapat menjamin kedua hak tersebut. Oleh karena itu digalilah sebuah nilai instrumental yang dapat dijadikan sebagai landasan umum, falsafah hidup, dan tujuan bangsa, yang kemudian dinamakan Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan, 2000: 13). Sehingga saya mengatakan nilai-nilai instrumental yang terkandung dalam Pancasila adalah hasil penggalan dari kultur bangsa Indonesia.

Oleh karena digali dan dirumuskan menjadi dasar negara, falsafah hidup dan tujuan bangsa, maka Pancasila diharuskan menjadi nilai-nilai utama yang harus diterapkan dalam kehidupan bangsa, termasuk politik. Artinya interaksi kepentingan dalam mewujudkan kebutuhan manusia Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Hal ini karena posisi Pancasila yang tidak dapat tergantikan baik kedudukannya, maupun fungsinya. Sehingga kondisi bangsa Indonesia yang saat ini terjebak dalam benturan nilai-nilai baru akibat globalisasi yang berdampak pada upaya menolak maupun menerima orang lain berdasarkan identitas, disintegrasi, terorisme, KKN, hingga lemahnya daya kritis sosial, karakter Pancasila dapat menjadi solusi. Bagaimana cara mendiseminasikan Pancasila agar menjadi karakter *zoon politicon* Indonesia?, akan menjadi pertanyaan besar yang akan dijawab oleh karya ilmiah ini.

Tugas dan kewajiban menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, telah menjadi tugas utama seluruh institusi pendidikan di Indonesia. Program studi (prodi) ilmu politik Universitas Kristen Indonesia (UKI) sebagai bagian dari institusi Pendidikan di Indonesia tentu memikul tugas yang sama. Hal ini harus diimplementasikan dalam kurikulum Pendidikan, dan metode pembelajaran yang dirumuskan sebagai Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu membentuk dan menghasilkan lulusan yang pada akhirnya menjadi *zoon*

politicon Indonesia berkarakter Pancasila. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi prodi ilmu politik UKI, jika kita berkaca pada meluasnya masalah bangsa Indonesia yang sudah merambah berbagai aspek kehidupan. Maka Pancasila sebagai pedoman falsafah hidup bangsa harus disadari sebagai satu-satunya solusi dalam mengurangi bahkan menghentikan berbagai masalah bangsa terkini.

2. **Rumusan masalah**

Pancasila yang dilahirkan dan disepakati sebagai dasar negara, falsafah hidup bangsa, dan tujuan berbangsa, pada praktek implementatifnya memang belum maksimal. Sebagai sebuah nilai instrumental memang Pancasila perlu diinterpretasikan pada tataran praksis. Sebagai dasar negara tentu Pancasila harus dijabarkan dalam konstitusi sebagai nilai utama lahirnya regulasi pemerintahan, maupun kebijakan politik. Sementara menjadi falsafah hidup bangsa Pancasila harus menjadi nilai utama pengatur dan menjadi semangat utama dalam interaksi sosial bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila sebagai tujuan berbangsa dan bernegara, Pancasila harus menjadi acuan kemana bangsa Indonesia diarahkan. Berdasarkan perincian tersebut maka Pancasila harus menjadi karakter utama *zoon politicon* Indonesia.

Berkaca pada kondisi bangsa Indonesia saat ini dalam berbagai aspek kehidupan dapat kita setuju bahwa bangsa Indonesia telah terjebak dalam masalah multidimensional yang mengancam keberlangsungan hidup, perwujudan keadilan, serta eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Masalah-masalah seperti nasionalisme identitas yang berujung pada upaya menolak maupun menerima orang lain berdasarkan identitas atau rasisme dan diskriminasi, kerusakan lingkungan, ketidakpercayaan kepada penyelenggara negara, praktek demokrasi yang dinodai oleh politik uang, konservatisme agama yang berujung pada keinginan mengganti Pancasila dan sistem pemerintahan, separatisme, ketimpangan pembangunan dan pendapatan ekonomi, hingga praktek KKN yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Masalah-masalah yang terjadi di atas sudah barang tentu menjadi kewajiban institusi Pendidikan untuk mampu memberikan solusi serta melahirkan *zoon politicon* Indonesia yang mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas. Prodi ilmu politik sebagai bagian dari institusi Pendidikan Universitas Kristen Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai bagian dari visi misinya, tentu memiliki tugas yang sama untuk menjadikan Pancasila sebagai solusi bangsa. Solusi yang dimaksud adalah melahirkan rekomendasi naskah akademik dan *zoon politicon* Indonesia yang berkarakter atau berdasarkan Pancasila. Upaya ini secara otomatis harus diimplementasikan dalam penerapan kurikulum dan metode pembelajaran. Oleh karena itu pertanyaan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah, bagaimana Pancasila diimplementasikan sebagai konsep Pendidikan karakter di Indonesia untuk menghasilkan *zoon politicon* Indonesia yang Pancasila?, dan bagaimana upaya prodi ilmu politik UKI dalam menghasilkan *zoon politicon* Indonesia yang memiliki karakter Pancasila?.

3. **Pembahasan**

a. **Pancasila Sebagai Konsep Pendidikan Karakter**

Dalam Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan memiliki arti sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Thomas Lickona sebagai pengusung pertama pendidikan karakter mengajukan unsur pendidikan karakter yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*) (Lickona, dalam Umi Muzayanah, 2014: 280).

Kata “karakter” mempunyai banyak sekali definisi dari para ahli. Menurut Poerwadarminta, kata karakter berarti tabiat, watak sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain (Amirullah Syarbini, 2012 : 13). Dengan demikian, pendidikan karakter adalah sebuah upaya untuk membimbing perilaku manusia menuju standar-standar baku (Fatchul Mu’in, 2011:160). Pendidikan karakter adalah pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif saja, akan tetapi lebih berorientasi pada proses pembinaan potensi yang ada dalam diri peserta didik, dikembangkan melalui pembiasaan sifat-sifat baik yaitu berupa pengajaran nilai-nilai karakter yang baik (Fakrur Rozi, 2012 ; 6). Sehingga menurut Heri Gunawan (2012 : 30) tujuan pendidikan karakter pada intinya untuk membentuk bangsa yang tangguh kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Pendidikan karakter dapat diwujudkan dalam kegiatan intra kurikuler yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran, serta kegiatan ekstra kurikuler yang dilakukan di luar jam pelajaran (Furqon Hidayatullah, 2010 : 43). Oleh karena itu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Pancasila sudah tepat menjadi konsep dari Pendidikan karakter, karena Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tujuan negara, namun juga menjadi cara hidup bangsa Indonesia. Pancasila harus menjadi karakter utama bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai konsep pendidikan karakter dapat diterapkan melalui mekanisme Pendidikan sebagai berikut :

- *Intrakurikuler* : Nilai-nilai Pancasila diajarkan sebagai bagian dari pelajaran yang dipelajari di kelas.
- *Kokurikuler* : Kegiatan untuk memperdalam nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan observasi, maupun evaluasi perilaku masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
- *Ekstrakurikuler* : Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu, peserta didik diharuskan mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Cara ini dapat diterapkan berdasarkan tingkat Pendidikan, disesuaikan dengan proses tumbuh kembang peserta didik dan daya tangkapnya dalam memahami dan menerima materi pembelajaran.

Implementatif dari mekanisme Pendidikan diatas dapat dilakukan oleh pendidik dengan metode pembelajaran sebagai berikut :

- a. Ceramah, yaitu penyampaian materi secara lisan oleh pendidik dengan alat bantu mengajar, sementara anak didik mendengar, menyimak secara seksama penjelasan materi.
- b. Diskusi, yaitu metode mendidik saling bertukar informasi maupun adu argumentasi dan pendapat berdasarkan materi yang dikaitkan dengan

sebuah masalah, dengan tuntutan adanya solusi atas masalah yang dibahas.

- c. Praktik, yaitu proses mendidik yang dilakukan dengan cara melakukan praktek secara langsung sesuai dengan materi yang disampaikan.
- d. Bermain peran, yaitu metode pendidikan yang diawali dengan identifikasi masalah sesuai materi yang diajarkan, selanjutnya peserta didik memainkan peran tertentu sesuai dengan materi yang diajarkan, dan diakhiri dengan diskusi. (lihat Sukmadinata, Nana Syaodih dan Erliana Syaodih: 2012, 153).
- e. Pemecahan masalah, yaitu metode pendidikan dengan cara mengemukakan masalah yang harus dipecahkan secara individual maupun berkelompok oleh peserta didik sesuai dengan materi yang diajarkan
- f. Inkuiri reflektif, yaitu metode pendidikan yang sangat menuntut pemikiran kritis dan daya analitik antara pendidik dan peserta didik terkait masalah tertentu dengan pola komunikasi dua arah yang aktif.

Nilai Pancasila yang dapat diajarkan kepada peserta didik sebagai bagian dari Pendidikan karakter adalah :

- *Nilai Ketuhanan* : Pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta.
 - Percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
 - Hormat dan menghormati antar sesama umat beragama
 - Menghormati kebebasan umat beragama menjalankan kegiatan ibadahnya.
 - Tidak memaksakan suatu kepercayaan kepada umat beragama lainnya.
- *Nilai Kemanusiaan* : Tindakan seluruh bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani.
 - Mengakui kesetaraan manusia
 - Saling mencintai
 - Tenggang rasa
 - Adil
 - Menjunjung nilai kemanusiaan
 - Membela kebenaran dan keadilan
 - Saling menghormati dan kerja sama dengan bangsa lain
- *Nilai Persatuan* : Adanya upaya persatuan untuk menumbuhkan nasionalisme.
 - Menjagga persatuan dan kesatuan NKRI
 - Rela berkorban demi bangsa dan negara
 - Cinta akan tanah air
 - Bangga dengan Indonesia

- Memajukan pergaulan demi persatuan yang didasarkan pada Bhineka Tunggal Ika
- *Nilai Kerakyatan* : Implementasi nilai demokrasi tidak langsung dengan bentuk musyawarah mufakat.
 - Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa → umum diatas kepentingan pribadi
 - Tidak memaksakan kehendak pada orang lain
 - Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama
 - Konsensus dengan musyawarah dalam lingkup asas kekeluargaan
- *Nilai Keadilan* : Perwujudan bangsa Indonesia yang adil dan makmur.
 - Bersikap adil terhadap sesama
 - Menghormati hak orang lain
 - Menolong sesama
 - Menghargai orang lain
 - Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum

Nilai-nilai Pancasila ini memang telah dimaknai secara luas dan lebih banyak poin yang disebutkan dari yang disebutkan diatas. Namun poin diatas dapat digunakan sebagai konsep pembentukan karakter *zoon politicon* Indonesia.

b. Karakter *Zoon Politicon* Indonesia Berdasarkan Pancasila

Branson dalam Winataputra dan Budimansyah (2007 : 186) mengharuskan adanya kompetensi yang dimiliki oleh *zoon politicon* suatu bangsa, yaitu *Civic Disposition*. *Civic Disposition* merupakan karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Pancasila sebagai sumber utama Pendidikan karakter *zoon politicon* Indonesia juga adalah dasar dari pembentukan konstitusi, sehingga dasar demokrasi Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu *civic disposition* dari *zoon politicon* adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pasca penerapan Pancasila sebagai konsep utama Pendidikan karakter *zoon politicon* Indonesia, maka masalah-masalah multidimensional yang saat ini di Indonesia tentu tidak akan terjadi lagi.

Nilai-nilai Pancasila yang dapat menjadi karakter *zoon politicon* Indonesia :

Pertama : *zoon politicon* Indonesia akan memiliki karakter utama sebagai manusia yang mengakui keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya entitas tertinggi diantara semua makhluk yang ada di alam semesta. Tuhan dicirikan dalam setiap agama di Indonesia secara berbeda namun memiliki kesamaan-kesamaan hakiki yang menggambarkan kekuasaannya. Oleh karena itu *zoon politicon* Indonesia secara otomatis diharuskan menghormati keberadaan, keyakinan, tata ibadah, dari setiap agama yang ada di Indonesia. Penghormatan yang dimaksud berarti semua manusia Indonesia berhak mempraktekkan tata cara ibadah dan keyakinan agama nya (hanya agama yang diakui negara), tidak ada pemaksaan untuk mengubah keyakinan, atau tidak ada praktek menerima atau menolak orang lain karena alasan agama atau keyakinan yang dianut.

Dampak : jika *zoon politicon* Indonesia telah memiliki karakter seperti diatas, maka berbagai praktek nasionalisasi SARA akan hilang, tidak ada pengrusakan, atau konflik

karena keberadaan tempat ibadah atau karena ada sekelompok umat beribadah, tidak ada penolakan terhadap pejabat publik karena alasan perbedaan agama, penghormatan terhadap manusia lain sebagai entitas yang setara karena hanya Tuhan yang tertinggi.

Kedua, jika Sila kedua telah menjadi karakter *zoon politicon* Indonesia maka wujudnya *zoon politicon* Indonesia akan sangat menjunjung tinggi perikemenausiaan, HAM, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Hal ini juga tetap mendukung apa yang dimaknai dari nilai sila ke 1.

Dampak, maka masalah-masalah seperti pelanggaran HAM, serta kegagalan perwujudan kebutuhan hidup bangsa tidak lagi terjadi karena hak-hak dan kewajiban dasar manusia telah terwujud.

Ketiga, *zoon politicon* Indonesia mampu menjadi manusia yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi bagi kedaulatan dan persatuan bangsa, yang didasarkan pada wawasan nusantara yang majemuk. Membangun hubungan antar negara yang adil dan setara tanpa membedakan identitas.

Dampak, masalah-masalah disintegrasi tidak terwujud karena upaya untuk menciptakan persatuan nasional didasarkan pada proses penciptaan hak dan kewajiban yang setara.

Keempat, *zoon politicon* Indonesia akan mampu menjadikan kepentingan umum sebagai tuntutan utama tugas politik sebagai satu bangsa, yang didasarkan pada aspirasi rakyat sehingga kebijakan yang dilahirkan adalah keputusan Bersama yang mampu mewujudkan kepentingan umum. Karena bangsa Indonesia dipandang sebagai satu keluarga besar.

Dampak, maka praktek demokrasi di Indonesia tidak melahirkan kondisi minoritas maupun mayoritas namun kesetaraan karena adanya aspirasi rakyat yang didengar seluruhnya untuk kemudian diwujudkan sebagai sebuah keputusan Bersama melalui musyawarah. Hal ini tentu akan menghasilkan kepuasaan umum karena sistem politik ditunjukkan pada perwujudan kepentingan umum yang merupakan perintah dari keputusan Bersama, bukan kepentingan sekelompok orang. Maka praktek-praktek oligarki tidak terwujud

Kelima, *zoon politicon* Indonesia menjadi manusia-manusia yang mampu mewujudkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dalam hidupnya dalam mewujudkan kepentingan umum yang setara bagi seluruh manusia tanpa keinginan untuk mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dampak, praktek KKN, ketimpangan pembangunan, dan ketimpangan ekonomi tidak akan terwujud. Tujuan bangsa yaitu kesejahteraan, keamanan, kebebasan, keadilan, dan peningkatan kualitas hidup dapat terwujud, karena ini juga menjadi kebutuhan utama setiap manusia.

c. Peran Prodi Ilmu Politik Dalam Melahirkan *Zoon Politicon* Berkarakter Pancasila

Dalam perumusan tugas Lembaga Pendidikan di negeri ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu mendukung tujuan nasional, sesuai dengan perintah UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun UUD 1945. Prodi ilmu politik harus mampu mengimplementasikan tugas ini. Karena sebagai salah satu corong utama di

negeri ini dalam menghasilkan *zoon politicon* yang benar-benar memahami tugas dan fungsi sistem politik, tentu memainkan peran penting dalam upaya melahirkan *zoon politicon* yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ini juga merupakan tugas utama semua insitusi Pendidikan. Oleh karena itu hal ini kemudian dijabarkan kedalam visi misi prodi ilmu politik Universitas Kristen Indonesia sebagai berikut (Pedoman Kurikulum Program Studi Ilmu Politik : 2015) :

Menjadi Program Studi Ilmu Politik yang unggul dalam bidang otonomi daerah yang demokratis berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai kristiani di Indonesia pada tahun 2027.

Visi prodi ilmu politik UKI kemudian diturunkan dalam bentuk misi yang isinya berupaya menjabarkan implementasi Pancasila yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip demokrasi ala barat, namun tetap menitikberatkan pada kearifan lokal milik bangsa Indonesia. Sehingga melahirkan misi prodi ilmu politik UKI sebagai berikut :

1. *Menyelenggarakan pendidikan sarjana dalam bidang ilmu politik dengan fokus pada studi otonomi daerah yang demokratis.*
2. *Mengembangkan penelitian tentang pluralisme dan demokrasi berbasis kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia.*
3. *Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dalam pemberdayaan masyarakat.*
4. *Mengembangkan Pusat Studi Otonomi Daerah melalui kerjasama dengan instansi terkait.*

Berkaca pada visi dan misi diatas maka prodi ilmu politik UKI berusaha mewujudkannya dalam bentuk tugas-tugas Tridharma perguruan tinggi (Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), sebagai berikut :

- *Pendidikan* : implementasi dari pendidikan ini adalah dalam bentuk mata kuliah yang diajarkan.
 - Pendidikan Pancasila : Tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mengetahui sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, agar mahasiswa memahami bahwa Pancasila adalah dasar hukum negara Republik Indonesia serta ideologi, falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, agar mahasiswa dapat menerapkan Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.
 - Pendidikan Kewarganegaraan : Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang Kewarganegaraan Indonesia, bagaimana warganegara melaksanakan partisipasi politiknya, dan ikut aktif dalam kehidupan kenegaraan.
 - Pengantar Ilmu Politik : Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar pengetahuan dan pemahaman mengenai objek, ruang lingkup, dan konsep-konsep dasar dari Ilmu Politik seperti: negara, kekuasaan, sistem politik dan kekuatan politik. Juga dibahas mengenai kedudukan Ilmu Politik, hubungannya dengan ilmu

pengetahuan lain dan perkembangannya serta kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada Ilmu Politik.

- Sistem Politik Indonesia : Kuliah ini dimaksudkan untuk mengantar mahasiswa memahami sistem politik yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Dalam mata kuliah ini mahasiswa akan terlebih dahulu di perkenalkan dengan analisis sistem politik serta fungsi-fungsi dan struktur-struktur yang terdapat dalam sistem politik. Berdasarkan pendekatan tersebut, mahasiswa diajak membahas sistem politik yang pernah berlaku (sistem politik pada masa demokrasi parlementer/liberal dan pada masa demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila atau Orde Baru dan pasca Orde Baru dan Reformasi. Mata kuliah ini juga membahas demokratisasi di semua aspek politik yang terjadi pasca Orde Baru.
- Sistem Perekonomian Indonesia : Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian tentang sistem ekonomi Indonesia beserta berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir secara logis dan sistematis mengenai masalah-masalah ekonomi sebagai persoalan kemasyarakatan; memperkokoh pengetahuan dan keterampilan mahasiswa mengenai konsep-konsep ekonomi yang mendasar dan meningkatkan penguasaan konsep-konsep tersebut melalui penerapannya dalam berbagai permasalahan yang nyata; mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk mengkomunikasikan kembali pengetahuan ilmiah tersebut secara sederhana, jelas dan sistematis.
- Sistem Hukum Indonesia : Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem hukum yang pernah berlaku dan sedang berlaku di Indonesia dan pembangunan hukum yang sedang berlangsung saat ini.
- Sistem Sosial dan Budaya Indonesia : Mengantar mahasiswa untuk mengetahui serta memahami kemajemukan masyarakat dan budaya Indonesia dengan menggunakan pendekatan sistem. Dalam mata kuliah ini akan dibahas dasar-dasar pendekatan sistem, pengelompokan masyarakat Indonesia, kemajemukan budaya, perubahan sosial budaya di Indonesia pengaruh luar terhadap kehidupan sosial budaya dan masalah integrasi nasional.
- Negara dan Masyarakat Sipil : Membahas tentang berbagai kelompok dan berbagai dalam masyarakat yang berinteraksi dengan para elit negara dan melakukan kontrol terhadap negara untuk kepentingan masyarakat.

- *Penelitian* : disusun dalam bentuk rencana strategis penelitian prodi ilmu politik UKI baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa sebagai berikut;
 - Penelitian politik yang dengan konsentrasi pada masalah-masalah implementasi otonomi daerah, penerapan nilai dan prinsip demokrasi, implementasi nilai Pancasila dan nilai kristiani pada ranah politik nasional maupun lokal pasca penerapan otonomi daerah.
Implementasinya dalam 1 tahun terakhir :
 - Penelitian Fransiskus X. Gian Tue Mali “*Politik Identitas Pada Pemilu pada DKI Jakarta Tahun 2017*”
 - Penelitian Budi Chrismanto Sirait “*Hilangnya Multikulturalisme Dalam Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Bekasi dan Kota Bogor*”
 - Penelitian Fransiskus X. Gian Tue Mali dan Indah Novitasari “*Pilihan Rasional Masyarakat Suku Lape dalam Pemilu pada Kabupaten Nagekeo Tahun 2018*”
 - Penelitian Indah Novitasari “*Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kediri Berdasarkan Asas Partisipatif Masyarakat Desa*”
- *Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*
 - PKM prodi ilmu politik UKI yang telah dilakukan didasarkan pada tema besar seperti ; Pendidikan pluralisme, Pendidikan sistem politik, dan pendidikan pancasila.
Implementasinya 1 tahun terakhir :
 - Pendidikan pluralisme bagi masyarakat di Gereja Kristen Getsemani Kelapa Gading pada tahun 2018.
 - Pendidikan politik bagi generasi milenial di SMA Global Prestasi Kalimalang, pada tahun 2019.
 - Pendidikan Pancasila dan Sistem Politik Indonesia bagi masyarakat Baduy Luar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada tahun 2019.

Implementasi dari tugas Tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan oleh prodi ilmu politik UKI ini dapat melahirkan *zoon politicon* Indonesia yang berkarakter Pancasila. Dengan harapan pada akhirnya mampu berkontribusi secara nyata bagi penyelesaian masalah multidimensional yang dialami bangsa Indonesia saat ini.

4. Penutup

Prodi ilmu politik UKI sebagai institusi Pendidikan yang mengkhususkan diri dalam melahirkan *zoon politicon* Indonesia yang berkarakter Pancasila telah mengimplementasikannya dalam seluruh kegiatan pendidikannya. Karena disadari betul bahwa eksistensi bangsa dan negara Indonesia hanya bisa dijawab jika seluruh entitas bangsa mampu menjadikan Pancasila sebagai ciri karakter pribadi, dan sistem politik yang dianut, termasuk keseluruhan interaksi sosial dalam upaya mewujudkan kepentingan manusia Indonesia. Karena

didalam Pancasila telah terkandung makna kebebasan individu dalam meyakini dan menjalani kepercayaan yang diakui oleh negara. Pancasila menjamin terwujudnya HAM sebagai esensi manusia sebagai manusia. Pancasila juga pada titik tertentu mewajibkan adanya integrasi yang didasarkan pada kepentingan umum yang lahir dari aspirasi rakyat, dalam upayanya untuk mewujudkan kebutuhan manusia, sehingga pada akhirnya keadilan sosial dapat terwujud.

Oleh karena itu tujuan segelintir orang yang ingin mengganti Pancasila dengan nilai-nilai lain, hanya akan menciptakan polarisasi yang dapat berujung pada konflik komunal. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya nilai-nilai baru yang ditawarkan untuk mengganti atau bertentangan dengan Pancasila, baik dalam diskusi di ruang publik, aksi unjuk rasa, demonstrasi, maupun upaya-upaya yang diklaim sesuai dengan konstitusi seperti pembentukan peraturan daerah, organisasi kemasyarakatan, maupun regulasi nasional yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang bertentangan dengan Pancasila. Inseminasi Pancasila sebagai karakter *zoon politicon* Indonesia akan menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, dan damai. Pancasila juga dapat menjadi karakter *zoon politicon* internasional, sehingga tercipta masyarakat internasional dengan kondisi yang sama. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Budimansyah, D dan Winataputra. (2007). *Civic Education 'Konteks, Landasan, Bahan Ajar, Dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pasca Sarjana UPI.
- Gunawan, Heri. (2012). *Pendidikan Karakter: Konsep Dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayatullah, Furqon. (2010). *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Kaelan. (2000). *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma.
- Mu'in, Fatchul. (2011). *Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoretik & Praktik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rozi, Fakrur. (2012). *Model Pendidikan Karakter dan Moralitas Siswa di Sekolah Islam Modern; Studi pada SMP Pondok Pesantren Selamat Kendal*, (Semarang, IAIN Walisongo.
- Sukmadinata, Nana Syaodih dan Erliana Syaodih. (2012). *Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi*. Bandung: Refika Aditama.
- Suseno, Magnis, Franz. (2016). *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syarbini, Amirullah. (2012). *Buku Pintar Pendidikan Karakter; Panduan Lengkap Mendidik karakter Anak di Sekolah, Madrasah, dan Rumah*, Jakarta: As@-Prima Pustaka.

Jurnal

- Muzayanah, Umi. (2014), Manajemen Madrasah Sebagai Media Strategis Pendidikan Karakter (Studi Kasus Pada MTS Muhammadiyah 01 Purbalingga), *Jurnal "Analisa" Volume 21 Nomor 02 Desember 2014 halaman 279-289*.

Regulasi

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



Roadmap Menuju Fisipol Unggul



ROADMAP MENUJU FISIPOL UNGGUL



Penulis:

Angel Damayanti – Chontina Siahaan
Dandy Sendary Noron – Eka C Herlambang
Fransiskus X Gian Tue Mali – Mita Yesyca
Nadya Caronlina – Shyintia - VL Sinta Herindrasti

ROADMAP MENUJU FISIPOL UNGGUL

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (Seratus juta Rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (Satu miliar Rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (Empat miliar Rupiah).

Penulis:

Angel Damayanti – Chontina Siahaan
Dandy Sendary Noron – Eka C Herlambang
Fransiskus X Gian Tue Mali – Mita Yesyca
Nadya Caronlina – Shyintia - VL Sinta Herindrasti

ISBN:

Cover Designer :
Eka C. Herlambang

Penerbit: UKI Press

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630
Telp.(021)8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, ©2019
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Daftar Isi

Daftar Singkatan	06		
Kata Sambutan Rektor UKI	08		
Pengantar Redaksi	10		
Sejarah Pendirian Fisipol Dr.Chontina Siahaan, SH., M.Si.	15		
Pendidikan Politik Berdasarkan Pancasila dalam Menghasilkan Zoon Politicon Indonesia yang Berkarakter Fransiskus X. Gian Tue Mali	21		
Program Studi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia Jakarta dan Tantangan Menuju Akreditasi Internasional V.L. Sinta Herindrasti	34		
Gambaran Terkini, Isu-isu Strategis dan Upaya Pencapaiannya Angel Damayanti	58		
		Peran Alumni Membawa UKI Menjadi Universitas Unggulan Dandy Sendayu Noron Eka C. Herlambang	69
		Harapan untuk 25 Tahun Program Studi Hubungan Internasional Mita Yesyca	77
		Idealisme Mahasiswa Berprestasi Dalam Mengaungkan Nama Fisipol UKI yang Unggul Nadya Carollina Shyintia	84
		Jurnal Sociae Polites: Masa Kini dan Mendatang V.L. Sinta Herindrasti, MA	90
		Para Penulis	98

Daftar Singkatan

AACSB	Association to Advance Collegiate of Schools of Business
ABET	Accreditation Board for Engineering and Technology
ABEST21	The Alliance of Business Education and Scholarship for Tomorrow
AHPGS	Accreditation Agency in Health and Social Sciences
APACPH	Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health
ASIIN	Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering/Computer Science, the Natural Science and Mathematics
ASEAN	Association of South East Asian Nations
AUN-QA ASEAN	University Network-Quality Assurance
BAN-PT	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
EQUIS/EPAS	European Foundation for Management Development
IFT	Institute Food Technology
IMAREST	Institute of Marine Engineering, Science and Technology
JABEE	Japan Accreditation Board for Engineering Education
KAAB	Korean Architecture Accrediting Board
KKN	Kuliah Kerja Nyata
PKM	Pengabdian Kepada Masyarakat
RSC	Royal Society of Chemistry
RTPI	The Royal Town Planning Institute
SWOT	Strength Weakness Opportunity Threat
SWST	Society of Wood Science and Technology
UNWTO-Tedqual	United Nations World Tourism Organization Tedqual
WFME	The World Federation for Medical Education

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Program Studi Rekognisi Internasional Berdasarkan Perguruan Tinggi di Indonesia
Tabel 2.1	Pengelompokkan Program Studi berdasarkan Kriteria Kesiapan Menuju Rekognisi Internasional
Tabel 3.1	Kegiatan AUN-QA 1998-2018
Tabel 4.1	Profil Dosen
Tabel 5.1	Profil Tenaga Kependidikan
Tabel 6.1	Profil Mahasiswa TA 2019/2020\
Tabel 7.1	Publikasi Jurnal “Sociae Polites” 1997 – ISSN 1410-3745

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Grafik Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia
Gambar 2.2	Grafik Jumlah Program Studi di Indonesia
Gambar 2.3	Sebaran Rekognisi Internasional berdasarkan Rumpun Keilmuan
Gambar 2.4	Grafik Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru
Gambar 2.5	Grafik Prestasi Mahasiswa Hubungan Internasional Tahun 2015-2019
Gambar 2.6	Cover Majalah Ilmiah Sociae Polites Tahun I, No 2, Agustus 1997
Gambar 2.7	Cover Jurnal Ilmiah Sociae Polites Vol 15 No 1 Januari- Juni 2014

Kata Sambutan

Rektor Universitas Kristen Indonesia

Kita mengucapkan syukur atas kasih penyertaan Tuhan karena Fisipol UKI kini merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Kini lulusan Fisipol telah mengabdikan diri di berbagai kementerian, lembaga, organisasi internasional, perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Selain itu, begitu banyak prestasi yang telah diukir oleh tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan mahasiswa Fisipol UKI.

Fisipol UKI menjadi bagian penting dalam perkembangan pesat dan prestasi-prestasi yang telah UKI raih selama setahun terakhir, yang beberapa di antaranya akan menjadi tonggak sejarah UKI seperti:

- Untuk pertama kalinya UKI mendapat penghargaan sebagai salah satu universitas terbaik di Jakarta karena masuk ke dalam 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, tepatnya di peringkat 86 (naik 26 tingkat dari kedudukan di tahun 2018)
- Untuk pertama kalinya dalam pemeringkatan kemahasiswaan tahun 2019, UKI berada di posisi ke-50 di Indonesia (naik 234 peringkat dari peringkat 284 di tahun 2018)
- Untuk pertama kalinya UKI masuk 10 besar Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta

Prestasi-prestasi dan perkembangan UKI tersebut di atas tidak akan mungkin diraih tanpa kerja keras dari rekan-rekan civitas akademika di Fisipol. Kita berharap agar prestasi-prestasi tersebut menjadi cambuk bagi UKI untuk terus berprestasi mengejar ketertinggalannya dan menjadi teladan bagi Perguruan Tinggi lainnya sesuai dengan visinya, “Menjadi

universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034”.

Buku “**Roadmap menuju Fisipol Unggul**” ini menggambarkan secara jelas dan tegas semangat untuk memajukan dan mengembangkan Fisipol UKI. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih bagi penyunting, para penulis dan Panitia Dies Natalis Fisipol UKI yang telah bahu-membahu berkontribusi dalam tahun prestasi UKI. Kiranya Tuhan yang Mahakuasa memberkati semua upaya dan kerja keras kita untuk memajukan pendidikan tinggi di Indonesia dan mendidik calon-calon pemimpin di negeri ini.

Terima kasih.
Jakarta, 9 November 2019
Rektor,

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA

Kata Pengantar

Roadmap Menuju Fisipol Unggul

Hari jadi Fisipol yang ke-25 pada 9 November 2019 merupakan momentum yang tepat untuk merefleksikan perjalanan sejarah Fisipol dan peta jalan Fisipol unggul. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan saksi mata dinamika perjalanan Fisipol yang penuh dengan tantangan dan perkembangan. Dengan bekal potensi mahasiswa, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik yang begitu melimpah, berbagai harapan kini diletakkan di pundak Fisipol seperti yang tercermin dalam visi Fisipol UKI 2019-2024 yaitu menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik unggulan di Asia Pasifik yang berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai kristiani pada tahun 2027.

Fisipol sebenarnya adalah fakultas yang berusia relatif muda dibandingkan dengan fakultas-fakultas lainnya di lingkungan UKI. Chontina Siahaan menjabarkan secara detail sejarah pendirian Fisipol. Fisipol sebenarnya sudah digagas sejak tahun 1983 namun baru direalisasikan pada tahun 1994 dengan tiga program studi yaitu Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi dan Hubungan Internasional. Namun sayangnya, Prodi Ilmu Pemerintahan ditutup beberapa tahun kemudian karena kekosongan mahasiswa. Di bawah kepemimpinan Rektor UKI Prof. Dr. Ing. K.T. Sirait dan kerja keras tim pendiri, Fisipol berhasil memperoleh ijin pendirian dari Pemerintah Republik Indonesia. Setelah Fisipol terbentuk, Rektor UKI memilih Dr. S.M. Simorangkir sebagai dekan pertama.

Melihat sejarah pendirian Fisipol seperti yang dijabarkan oleh Chontina Siahaan, kita perlu berbangga atas visi para pendiri Fisipol yang melihat urgensi keberadaan Fisipol di UKI. Indonesia membutuhkan banyak sekali cendekiawan yang mempromosikan pluralisme dan toleransi dan Fisipol ditantang untuk menghasilkan lulusan yang meneguhkan Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menjadi Fisipol unggulan di Asia Pasifik merupakan tugas maha berat.

Prestasi mahasiswa baik dalam bidang akademik dan non-akademik harus dipicu dan dipacu bersaing dengan universitas unggulan lainnya. Akreditasi unggul prodi Hubungan Internasional pun perlu dipertahankan dan dikembangkan. Tuntutan akreditasi program studi yang memiliki sembilan indikator membutuhkan persiapan dan pengembangan program studi yang jelas dan terarah. Pemerintah menitikpkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi dan konsisten dalam kurikulum program studi.

Angel Damayanti sebagai dekan Fisipol memberikan arahan bagi pencapaian Fisipol sebagai fakultas unggul. Angel menekankan mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata pamong serta tata kelola fakultas. Berbagai target pencapaian sudah dijabarkan detail dalam tulisan Angel Damayanti. Ancaman baru yang perlu diantisipasi oleh Fisipol ke depan adalah persaingan antara prodi yang semakin ketat memperebutkan mahasiswa baru. Sebagai contoh, berbagai perguruan tinggi swasta membuka prodi HI melihat pangsa pasar mahasiswa yang terbuka luas. Hal ini perlu diantisipasi oleh Prodi HI UKI. Selain itu, peningkatan promosi Prodi Ilmu Politik (Ipol) pun menjadi sebuah kewajiban. Dengan akreditasi prodi saat ini (“baik”), Fakultas dan Prodi perlu memikirkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi sebuah lompatan jauh bagi Prodi Ipol.

Terkait Prodi Ipol, Fransiskus X. Gian Tue Mali menekankan Pancasila sebagai konsep pendidikan karakter yang diterapkan di intrakurikuler, korikuler, dan ekstrakurikuler. Radikalisme dan intoleransi yang merebak di masyarakat menjadi indikator penerapan Pancasila yang belum maksimal khususnya dalam dunia pendidikan. Berbagai media memberitakan bahwa perguruan tinggi menjadi salah satu media pengembangan dogma-dogma yang bertentangan dengan Pancasila. Bahkan, pimpinan perguruan tinggi negeri menjadi tokoh di balik berkembangnya aliran anti-Pancasila tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut, Gian menjabarkan visi Prodi Ipol ke dalam tridharma Prodi Ipol. Prodi Ipol memiliki visi: menjadi Program Studi Ilmu Politik yang unggul dalam bidang otonomi daerah yang demokratis berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai kristiani di Indonesia pada tahun 2027. Visi ini diterjemahkan dalam berbagai mata kuliah, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kolaborasi Prodi Ipol UKI dengan Prodi Ipol universitas lainnya terkait implementasi Pancasila dalam tridharma Prodi menjadi nilai tambah yang memperkuat posisi Prodi Ipol. Kerjasama penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pendidikan Prodi Ipol dengan prodi-prodi lainnya perlu dipublikasikan sehingga berdampak positif bagi peningkatan

minat mahasiswa baru terhadap Prodi Ipol UKI. Selain itu, berbagai program beasiswa bagi mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia ke Prodi Ipol perlu ditingkatkan untuk menegaskan UKI sebagai miniatur Indonesia. Pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga menjadi pemangku kepentingan yang perlu diajak bekerjasama lebih serius di dalam memajukan Prodi Ipol UKI.

Bagi Prodi HI, akreditasi internasional pun menjadi pilihan yang harus ditempuh. Seperti yang ditulis dalam artikel Sinta Herindrasti, akreditasi internasional membutuhkan sumber daya yang lebih besar baik dalam sarana, prasarana, sumber daya manusia dan keuangan. Kini Prodi HI UKI sedang dipersiapkan mengikuti akreditasi internasional dan salah satu kebijakan yang akan dilaksanakan adalah dengan mempersiapkan kelas internasional. Selain pengembangan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia Prodi HI juga membutuhkan komitmen serius dari pengelola program studi. Prodi HI kini memiliki 11 dosen tetap dengan kualifikasi S3 empat dosen dan lektor kepala satu dosen. Penambahan dosen dengan berkualifikasi dosen dan lektor kepala menjadi syarat mutlak dalam pengembangan prodi HI menuju prodi unggul.

Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UKI (Himahi) telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional. Partisipasi aktif Himahi dalam Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia dan Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia membuahakan berbagai hasil positif salah satunya adalah reputasi Himahi yang meningkat signifikan di level nasional. Nadya Carollina dan Shyintia meyakini bahwa idealisme dan optimisme mahasiswa menjadi modal berharga bagi pengembangan Fisipol di masa mendatang. Menjadi tantangan besar adalah bagaimana Himahi berkolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan lainnya baik di lingkungan UKI maupun di kancah nasional dan internasional. Kolaborasi dan kerjasama dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pendidikan lintas prodi, lintas fakultas dan lintas fakultas menjadi nilai jual Himahi UKI ke depan.

Mita Yesyca menulis mengenai harapan untuk 25 tahun Prodi HI. Dalam artikelnya, Mita menegaskan bahwa Prodi HI harus menjadi bagian dari pelaksanaan sasaran pembangunan berkelanjutan. Dunia menghadapi berbagai masalah serius seperti kemiskinan, pemanasan global dan konflik keamanan. Teori Hubungan Internasional yang diajarkan di berbagai mata kuliah di Prodi HI memiliki peran di dalam membongkar dogma konvensional yang menghambat pelaksanaan kegiatan sasaran pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, teori Feminisme berhasil

membongkar struktur patriarki yang menghambat berbagai program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, kerjasama Prodi HI dengan berbagai organisasi internasional menjadi tindak lanjut dari berbagai diskusi yang terjadi selama perkuliahan. Integrasi antara pendidikan dengan kerjasama institusi menjadi sesuatu yang diharapkan Mita dan civitas akademika UKI ke depan.

Jurnal ilmiah adalah salah satu instrumen publikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peran jurnal sangat strategis di dalam memajukan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fisipol memiliki dua jurnal aktif yaitu *Sociae Polites* (SP) dan *Jurnal Asia Pacific Studies*. Sebagai salah satu redaktur jurnal *Sociae Polites*, V.L. Sinta Herindrasti membahas mengenai sejarah perkembangan jurnal SP dan harapan bagi pengembangan jurnal SP. Jurnal SP telah menerbitkan 180 artikel sejak tahun 1997. Ini adalah sebuah torehan angka yang fantastis. Meskipun demikian, Jurnal SP harus mengikuti perkembangan jurnal yang terbaru dimana jurnal ilmiah harus beradaptasi dengan penggunaan open-source dalam publikasi jurnal. Selain itu, jurnal SP masih harus mempertahankan konsistensi publikasi jurnal.

Tantangan utama bagi jurnal SP adalah akreditasi jurnal. Saat ini Pemerintah melalui Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan Sinta (*Science and Technology Index*) sebagai gudang data artikel jurnal. Sinta menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah jurnal di dalam menerapkan standar tata kelola jurnal yang bermutu sangat baik. Untuk menjadi anggota Sinta, Jurnal SP perlu mengikuti serangkaian persyaratan yang membutuhkan komitmen dari tim redaksi. Fakultas dan Prodi harus memberikan komitmen dukungan di dalam pengembangan jurnal baik jurnal SP dan jurnal *Asia Pacific Studies*.

Di balik tantangan yang semakin kompleks yang dihadapi Fisipol, tersimpan alumni yang menjadi potensi solusi bagi berbagai dinamika yang terjadi di Fisipol. Dandy Sendayu Noron dan Eka Herlambang menjelaskan peran alumni bagi sebuah perguruan tinggi dan perencanaan kontribusi alumni bagi Fisipol ke depan. Terdapat dua peran utama alumni bagi sebuah perguruan tinggi yaitu sebagai katalisator dan kontributor. Sebagai katalisator, alumni berperan mempercepat pelaksanaan kerjasama-kerjasama yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah beasiswa bagi mahasiswa, pencarian bakat dan pekerjaan, dan promosi perguruan tinggi. Sebagai kontributor, alumni diharapkan dapat memberikan kontribusi materi dan immateri.

Alumni Fisipol telah tersebar di seluruh Indonesia di berbagai kementerian, lembaga dan perguruan tinggi. Alumni Fisipol menjadi

mitra strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keuangan. Diperlukan wadah yang efektif dan efisien di dalam menggali peran alumni Fisipol seperti pertemuan rutin dan kelompok diskusi di media sosial. Kemajuan Fisipol juga akan berdampak bagi reputasi dan citra alumni Fisipol. Sinergi antara pimpinan Fisipol, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fisipol dengan alumni Fisipol menjadi kunci sukses Fisipol ke depan.

Akhir kata, implementasi roadmap menuju Fisipol unggul membutuhkan kerjasama yang terpadu, berkelanjutan dan berdampak. Pada saat Fisipol merayakan hari jadinya yang ke-50 (Fisipol Emas), buku ini menjadi catatan sejarah dalam kemajuan dan dinamika perkembangan Fisipol. Sekali lagi, implementasi roadmap menuju Fisipol unggul adalah sebuah tugas yang maha berat. Risalah ini ditutupi dengan Mazmur 133: 1-3:

1: Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila Saudara-saudara diam bersama dengan rukun 2: seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya 3: Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas Gunung-gunung Sion. Sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin

Salam UKI Hebat,

Verdinand Robertua

Penyunting Buku “Roadmap Menuju Fisipol Unggul”

SEJARAH PENDIRIAN FISIPOL

DR. CHONTINA SIAHAAN, SH., M.SI.

Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fisipol UKI (Ka.P3M)
Lektor Kepala/IVB
Program Studi Ilmu Komunikasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Kristen Indonesia, Jl. Mayjen Sutoyo, Cawang - Jakarta Timur
13630, Indonesia

Pendahuluan

FAKULTAS Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai fakultas termuda yang lahir pada tahun 1994, sebenarnya sudah melalui proses sejarah yang sangat lama dan panjang. Proses kelahiran Fakultas Ini tergolong unik karena melewati kepemimpinan 3 orang rektor UKI yaitu: dr. S.C. Nainggolan, Prof. Dr. Maurits Simatupang, dan Prof. Dr. Ing. K.T. Sirait. Ketiga rektor ini turut membidani lahirnya fakultas ini. Fakultas ketujuh yang melengkapi enam fakultas sebelumnya yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran.

Perjalanan panjang yang menghabiskan waktu puluhan tahun itu dapat dijelaskan chronologinya sebagai berikut. Pertama sekali keinginan untuk membuka jurusan ilmu sosial dan ilmu politik ini, sudah dicanangkan dan diimpikan oleh rektor UKI pada tahun 1983 yang pada waktu itu dijabat oleh dr. S.C. Nainggolan, MPH. Keinginan ini disampaikan ketika ada acara diskusi tentang Asas Pemilu yang “Luber dan Jurdil”. Di situlah terbersit pemikiran dari rektor UKI tentang pentingnya membuka fakultas ilmu sosial dan ilmu politik agar kader-kader kristen bisa berkiprah di bidang politik. Tetapi pada kepemimpinannya, belum terakbul keinginan untuk membukan jurusan ini.

Masa jabatan rektor S.C. Nainggolan berakhir pada tahun 1983 dan digantikan oleh Prof. Dr. Maurits Simatupang yang menjabat sebagai rektor UKI selama dua periode yaitu dari 1983 s.d. 1994. Pada periode ini, rencana pembukaan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik masih dikemukakan oleh beberapa orang dosen agar segera dibuka. Jurusan ilmu sosial dan ilmu politik ini sangat penting bagi universitas kristen karena pada waktu itu, dari umat islam sudah ada terbentuk para cendekiawan melalui ICMI. Diharapkan dari universitas kristen juga ada terbentuk kader-

kader kristen cendekiawan melalui fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Beberapa orang dosen datang menemui Prof. Dr. Maurits Simatupang seperti alm. Hobbes Sinaga dkk dan menyampaikan bahwa ketika masa jabatan dr. S.C. Nainggolan, sudah pernah dibicarakan tentang rencana pembukaan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Oleh karena itu, diminta rektor dapat minindaklanjuti rencana tersebut. Keinginan itu pada awalnya disambut baik oleh Prof. Dr. Maurits Simatupang dan sudah sempat ditunjuk beberapa orang dosen dari fakultas hukum untuk membuat studi kelayakan tentang pembukaan program studi fisipol tersebut. Akan tetapi sampai habis masa jabatan Prof. Dr. Maurits Simatupang selama dua periode dari tahun 1983 s.d. 1993 tidak kunjung lahir fakultas yang diidam-idamkan itu.

Prof. Dr. Maurits Simatupang digantikan oleh Prof. Dr. Ing K. Tunggul Sirait pada tahun 1984. Usul untuk mendirikan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik kembali dikemukakan kepada rektor baru oleh beberapa orang dosen di antaranya, Alm. Hobbes Sinaga, SH., dr. Merphin Panjaitan dan Alm. Drs. Samuel Pardede. Mereka beranggapan bahwa sebagai salah satu universitas kristen di tengah-tengah bangsa yang majemuk, sudah sepatutnya ikut menentukan kebijakan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dikader dan dididik orang-orang kristen melalui pendidikan politik yang dipusatkan di UKI. Usulan ini dapat diterima oleh Prof. Dr. Ing. K.T. Sirait sehingga menugasi beberapa orang dosen yang menunjuk Alm. Hobbes Sinaga, SH., dr. Merphin Panjaitan dan Alm. Drs. Samuel Pardede untuk melakukan studi kelayakan tentang pembukaan jurusan ilmu sosial dan ilmu politik. Hasil uji kelayakan dari ketiga dosen tersebut, disempurnakan lagi dengan menambah personil satu orang lagi dari Fakultas Ekonomi yaitu Drs. Tagor Panjaitan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor No. 04/SK/01.04 tanggal 15 Januari 1994.

Tim kecil yang dibentuk Rektor ini melakukan studi banding ke Universitas Padjajaran di Bandung dan Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Tim kecil yang terdiri dari empat orang ini kemudian melakukan beberapa kali rapat/pertemuan guna mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan diperoleh dari Universitas Padjajaran di Bandung dan dari Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Hasil kajian mereka disampaikan kepada rektor Prof. Dr. Ing K.T. Sirait. Untuk merespon kinerja tim kecil ini, rektor UKI mengundang Tim dan membicarakannya di rumah dinas rektor. Setelah hasil kajian lapangan dibahas, kemudian direncanakan untuk mengundang para pakar cendekiawan kristen yang ada di Jakarta untuk duduk bersama menerima masukan dan mendengarkan usulan-usulan yang diperlukan dalam upaya membuka fakultas baru yaitu fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.

Setelah kajian dari tim kecil dibicarakan dan dibahas di rumah

dinas rektor, maka rektor UKI, Prof. Dr. Ing. KT. Sirait., mengundang para pemikir dan para pakar orang kristen untuk ikut serta memberikan masukan dan pemikiran tentang pembentukan jurusan ilmu sosial dan ilmu politik di UKI. Pemikiran dari para pemikir orang kristen sangat diharapkan masukan-masukan agar kelak tujuan pembukaan jurusan ilmu sosial dan ilmu politik dapat benar-benar bermanfaat untuk kepentingan orang kristen khususnya. Maka diundanglah para cendekiawan dan pemikir kristen yang terdiri atas: Prof. Dr. Ing. KT Sirait., Sumita Tobing, Ph.D, Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha, Prof. Dr. H.P. Rajagukguk, Drs. H.A Karundeng, Flora Liman, SH., Prof. Dr. Bintan Saragih, Prof. Dr. T.O. Ihromi, Prof. Dr. AOB Situmorang, Dr. Janner Sinaga, Sabam Sirait, Tagor Panjaitan, SE., MA, Drs. Samuel Pardede, Hobbes Sinaga SH., MH, Dr. SM Simarangkir MA, dr. Merphin Panjaitan, Dr. Binsar Sianipar, Sabam Sirait, Tagor Panjaitan SH., MA, Ir. Adrianus Siregar, dan Chontina Siahaan, SH.

Para cendekiawan kristen ini, rapat untuk memberikan masukan-masukan apa yang perlu dipersiapkan dalam rangka pendirian fakultas baru. Siapa-siapa yang terlibat, siapa segmen pasarnya dan apa kelebihan dari fakultas ini dibanding dengan Fisipol yang sudah ada di berbagai universitas. Bagaimana agar ciri khas Universitas Kristen Indonesia bisa tercermin lewat fakultas baru yang akan dibentuk. Berkembang juga keawatiran membuka jurusan Ilmu sosial dan ilmu politik sebab jurusan ini sudah mapan di universitas negeri. Apakah akan datang mahasiswa ke universitas swasta yang notabene baru buka? Di samping itu, masih banyak masukan-masukan dari pakar kristen melalui pertemuan rapat yang diadakan sebanyak tiga kali pertemuan dengan mendengarkan dan menampung aspirasi yang berkembang dari para pakar kristen. Akhirnya, setelah melalui rapat tiga kali, rapat menyepakati bahwa setuju untuk membuka fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Setelah setuju untuk membuka fakultas baru, masih banyak yang harus dipikirkan dan dipersiapkan untuk membuka satu fakultas baru. Mulai dari mengkaji analisis SWOT, prediksi ke depan, dan lain-lain keperluan yang harus dipersiapkan dalam waktu yang sangat mendesak.

Selanjutnya, pendapat para cendekiawan kristen ini semakin mendalam dan mengerucut dengan menentukan jurusan yang akan dibentuk di bawah fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Setelah melalui proses dan perdebatan, disepakatilah bahwa program studi yang akan diajukan ke Kopertis adalah jurusan Hubungan Internasional, Jurusan Komunikasi dan Jurusan Ilmu pemerintahan. Pada waktu itu Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha mengusulkan agar jurusan Ilmu Pemerintahan dibuka, karena beliau menyanggapi akan mengerahkan mahasiswa dari STPDN, para Camat dan Kepala Desa untuk mengambil mata kuliah Ilmu Pemerintahan.

Memang terjadi argumentasi di dalam rapat cukup alot untuk menentukan program studi pemerintahan ini. Salah satu alasan para cendekiawan kristen ini agak sulit untuk menjaring mahasiswa mengambil jurusan ilmu pemerintahan karena jurusan itu ranahnya perguruan tinggi negeri. Tetapi prof. Dr. Taliziduhu Ndraha memberi garansi jika beliau bisa menggerakkan mahasiswa untuk mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan. Jadilah disepakati rapat membuka program studi ilmu pemerintahan.

Program studi komunikasi agak lebih maju selangkah karena ada pakar komunikasi pada waktu itu yaitu Sumita Tobing, Ph.D yang kebetulan belum lama pulang dari Amerika dan sangat piawai di bidang pertelevisian bahkan pada waktu ikut rapat, beliau masih Direktur TVRI. Dengan nara sumber yang cukup handal dan piawai, Tim kerja yakin akan eksistensi program studi ilmu komunikasi. Panggung untuk Sumita Tobing, Ph.D. sudah tersedia di UKI tinggal memanfaatkan panggung itu dengan baik.

Untuk merealisasikan pembukaan ketiga jurusan dimaksud dan supaya pekerjaan Tim efektif, maka rektor, membagi 3 kelompok kerja untuk membahas dan menyusun proposal pendirian jurusan ilmu sosial dan ilmu politik ke Kopertis. Dalam rapat itu, dipilih Ketua dan Sekretaris panitia untuk merumuskan dan merangkum hasil-hasil rapat. Melalui rapat terpilih lah Ketua: Dr. S.M. Simorangkir, MA., dan Sekretaris Chontina Siahaan, SH. Diharapkan Ketua dan Sekretaris dapat menjembatani komunikasi di antara Kopertis dengan UKI dengan menyiapkan proposal beserta lampiran yang diminta. Pembagian ketiga kelompok kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Hubungan Internasional, dengan susunan anggota sebagai berikut
 - a). Dr. S.M. Simorangkir, MA.,
 - b). Drs. Samuel Pardede,
 - c). Tagor panjaitan SE, MA.
2. Kelompok Ilmu Komunikasi
 - a). Dr. H.P. Rajagukguk,
 - b). Sumita Tobing, Ph.D.
 - c). Drs. Binsar Siagian, MA.
 - d). Ir. Adrianus Siregar
3. Kelompok Ilmu Pemerintahan
 - a). Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha,
 - b). Hobbes Sinaga, SH., MH.,
 - c.) dr. Merphin Panjaitan,
 - d). Thomas Abon, SH,
 - e.) dr. A.S.L. Rampen, MS

Ketiga Tim yang sudah terbentuk, melakukan rapat maraton hingga larut malam bahkan hingga pagi hari. Sering anggota Tim pulang pukul 01.00 dini hari atau 01.30 WIB dan besok paginya harus sudah masuk perbaikan atau masukan-masukan dari setiap Tim. Semua tim bekerja keras untuk mengejar deadline pengajuan ke Kopertis mengingat bulan September adalah penerimaan mahasiswa baru. Diharapkan sebelum turun izin, sudah dapat memasang iklan penerimaan mahasiswa baru. Dr. S.M. Simorangkir MA dan Chontina Siahaan yang merangkum semua hasil rapat dan mengetik semua saran dan pendapat untuk dihimpun dan dibuat dalam proposal untuk diajukan ke Kopertis. Rumusan ketiga tim, disempurnakan lagi oleh satu tim kecil yang terdiri dari: Prof. Dr. Ing. K.T. Sirait, Dr. S.M. Simorangkir, MA., Drs. Samuel Pardede, Tagor Panjaitan, SE., MA, Sumita Tobing, Ph.D., Dr. Taliziduhu Ndraha, Ir. Adrianus Siregar dan Chontina Siahaan, SH. Tim ini menggodok dan merampungkan apa saja yang perlu dilampirkan ke Kopertis dalam pengajuan proposal pembukaan fakultas baru. Termasuk menyusun mata kuliah untuk semester satu dan semester dua disusun sedemikian rupa dengan mengacu kepada peraturan Dikti dan juga memasukkan muatan lokal dari UKI. Di samping bidang administrasi, dibuat juga prediksi ke depan kira-kira berapa tahun Fisipol UKI bisa eksis sebagai fakultas. Pada waktu itu, diprediksi Tim kira-kira 5 tahun bisa break even point. Setelah bekerja keras siang dan malam, maka proposal yang sudah dilengkapi dengan lampiran, disepakati untuk dikirim ke Kopertis dengan judul " Hasil Studi Kelayakan Pendirian Fisipol UKI." . Setelah menunggu kurang lebih dari 6 bulan, akhirnya permohonan pembukaan jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik disetujui Kopertis dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. 097/D/0/1994 pada tanggal 26 Oktober 1994. Upacara resmi pembukaan Fisipol UKI diadakan pada tanggal 9 November 1994 dalam acara Sidang Terbuka Senat Universitas Kristen Indonesia. Pada waktu itu, yang menyampaikan orasi ilmiah adalah Laksda (Purn) F.M. Parapat, M.Sc., Ph.D.

Disadari bahwa keluarnya izin pembukaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bukan karena kekuatan atau kepintaran UKI tetapi ansichdari penyertaan dan berkat Tuhan yang senantiasa dilimpahkan kepada UKI baik siang maupun malam. UKI menjadi terang dan garam dunia dengan motto "melayani bukan dilayani" terlihat selama penantian turunnya ijin operasional pembukaan fakultas baru di Fisipol. Hanya dengan mengandalkan kekuatan dan kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan doa yang tulus, UKI percaya Kopertis akan mengeluarkan ijin pembukaan fakultas baru. Terpujilah Tuhan yang tetap melindungi UKI. Setelah keluar surat izin dari Kopertis, Fisipol langsung memasang iklan penerimaan mahasiswa baru untuk 3 program studi. Mengingat waktu

perkuliahan sudah sangat dekat, UKI memasang iklan dan promosi penerimaan mahasiswa baru secara maraton baik melalui media televisi, radio dan media cetak dan juga promosi dari mulut ke mulut. Karyawan diharapkan dapat membawa satu mahasiswa untuk masuk Fisipol. Pada waktu tahun pertama tahun akademik 1994/1995, mahasiswa yang mendaftar dan diterima di Fisipol masih relatif sedikit. Melihat animo mahasiswa yang mendaftar sangat sedikit, untuk mengantisipasi kekosongan mahasiswa, maka Pimpinan universitas mengeluarkan kebijakan agar karyawan UKI bisa kuliah tanpa membayar uang kuliah untuk memenuhi quota perkuliahan di dalam kelas. Kebijakan ini sebagai konsekuensi pembukaan fakultas baru yang waktu promosinya sangat terbatas. Dengan adanya kebijakan ini, maka beberapa orang karyawan ikut serta menggunakan kesempatan ini kuliah S1 di UKI. Merupakan kebahagiaan juga bagi karyawan yang lulusan SMA pada waktu bekerja di UKI, mendapat kesempatan untuk meningkatkan prestasinya melalui studi lanjut ke S1. Awal perkuliahan, jumlah mahasiswa yang mendaftar adalah sebagai berikut: a). Jurusan Hubungan Internasional: Pria 33 orang dan Perempuan 9 orang. b) Jurusan Komunikasi: Pria 24 orang dan Perempuan 25 orang. Jadi jumlah mahasiswa Fisipol angkatan pertama adalah 49 orang. Pada rapat pembentukan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha menyanggupi untuk mencari mahasiswa akan tetapi sampai fakultas ini berjalan berapa tahun, mahasiswa yang dijanjikan tidak kunjung ada dan mungkin animo masyarakat untuk masuk ke jurusan Ilmu Pemerintahan sangat minim atau lebih memilih masuk APDN.

Akhirnya, jurusan Ilmu Pemerintahan kemudian ditutup karena tidak ada mahasiswanya.

Pimpinan Fisipol pertama pada waktu itu adalah sebagai berikut:

- 1) Dekan Fisipol: Dr. S.M. Simarankir, MA.,
- 2) Pembantu Dekan Akademik: Drs. H.A. Karundeng,
- 3) Pembantu Dekan bidang Administrasi: Flora Liman SH.,
- 4) Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan: D. Parlindungan Sitorus, SH.,
- 5) Ketua Jurusan Bidang Komunikasi: Sumita Tobing, Ph.D,
- 6) Sekretaris Jurusan Komunikasi: Theresia Huwae, S.Psi., M.Psi.,

Sedangkan, anggota Senat UKI mewakili para dosen adalah Drs. Samuel Pardede dan Drs. Alex Rumondor. Sedangkan, Kepala Tata Usaha pada waktu itu adalah Parulian Sirait yang didukung oleh tim kesekretariatan antara lain, alm. Pardy, Merlyana Napitupulu, Sri, Junaedi, Alm. Frits Maradat dan Ukung. Demikian sekilas tentang sejarah berdirinya Fisipol UKI Tahun 1994.

PENDIDIKAN POLITIK BERDASARKAN PANCASILA DALAM MENGHASILKAN ZON POLITICON INDONESIA YANG BERKARAKTER

FRANSISKUS X. GIAN TUE MALI

Ketua Program Studi Ilmu Politik Periode 2018-2022,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia,
Jl. Mayjen Sutoyo No.2, Cawang – Jakarta, 13630, Indonesia

1. Pendahuluan

Politik tidak bisa dipungkiri telah menjadi salah satu aktivitas utama manusia selama hidup. Peningkaran terhadap politik dapat diartikan sebagai pengkhianatan manusia terhadap esensinya sebagai manusia. Hal ini dikarenakan manusia selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pribadi, maupun kelompok. Upaya yang dimaksud dilakukan dengan cara berinteraksi dengan makhluk lainnya. Interaksi inilah kodrat hakiki manusia yang tidak bisa dipungkiri pula. Interaksi dalam kehidupan manusia ini merupakan pertarungan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga manusia akan menggunakan berbagai cara, strategi, dan didasarkan pada nilai atau ideologi tertentu. Kesemua upaya tersebut digerakkan oleh intelegensia dan pikiran yang dimiliki manusia, tidak dimiliki oleh hewan, maka manusia disebut sebagai zoon politicon oleh Aristoteles.

Manusia dipandang sebagai individu bukan dalam makna kemandiriannya yang tidak membutuhkan makhluk lain. Keindividualan manusia dipandang sebagai upaya bebas manusia dalam menentukan apa yang ingin dilakukannya dan apa yang tidak ingin dilakukan. Mau tak mau ia harus mengambil sikap terhadap alam dan masyarakat sekelilingnya, ia dapat menyesuaikan diri dengan harapan orang-orang lain, tetapi ia dapat juga bertindak melawan mereka (Magnis-Suseno 2016, 12). Lalu bagaimanakah sisi kesosialan manusia itu dipandang?, ia bukan sekedar penambahan kondisi eksternal terhadap keindividualan yang sudah ada. Melainkan secara mendalam dan hakiki menentukan manusia dalam individualitas dan kepribadiannya yang khas. Manusia hanya mempunyai eksistensi karena orang lain. Dan ia hanya dapat hidup dan berkembang karena ada orang lain (Magnis-Suseno 2016). Sehingga dapat diambil kesimpulan manusia dibentuk oleh masyarakat disekitarnya, dan

masyarakat disekitarnya dapat dibentuk dengan didasarkan pada nilai-nilai tertentu (rekayasa sosial). Oleh karena itu Pendidikan memainkan peran terpenting dalam upaya yang dimaksud.

Inseminasi nilai melalui Pendidikan menjalani peran terpenting agar dapat membentuk masyarakat sesuai yang diinginkan. Termasuk cara-cara berpolitik. Hal ini disadari oleh manusia sejak dahulu kala, sehingga Pendidikan telah diinstitusikan. Melalui institusi-institusi Pendidikan inilah nilai-nilai tersebut di-inseminasikan. Tujuan dari upaya tersebut adalah untuk menciptakan integrasi dan kestabilan sosial. Pendidikan telah menjadi alat bagi sistem pemerintahan untuk mewujudkan tujuan dari pemerintahan yang dianut. Sistem pemerintahan akan menghasilkan keputusan regulasi tentang nilai-nilai yang dimaksud yang harus dijalani oleh semua warga negara, lalu menggunakan Pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Selain penggunaan “alat paksa” yang dimiliki oleh pemerinah. Sehingga pada akhirnya interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dapat terwujud dengan tetap terjaminnya hak-hak keindividuannya dan hak masyarakat umum.

Indonesia sebagai negara yang terbentuk dengan latar sosial yang majemuk berupaya untuk mewujudkan bangsa yang dapat menjamin kedua hak tersebut. Oleh karena itu digalilah sebuah nilai instrumental yang dapat dijadikan sebagai landasan umum, falsafah hidup, dan tujuan bangsa, yang kemudian dinamakan Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan 2000, 13). Sehingga saya mengatakan nilai-nilai instrumental yang terkandung dalam Pancasila adalah hasil penggalan dari kultur bangsa Indonesia.

Oleh karena digali dan dirumuskan menjadi dasar negara, falsafah hidup dan tujuan bangsa, maka Pancasila diharuskan menjadi nilai-nilai utama yang harus diterapkan dalam kehidupan bangsa, termasuk politik. Artinya interaksi kepentingan dalam mewujudkan kebutuhan manusia Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Hal ini karena posisi Pancasila yang tidak dapat tergantikan baik kedudukannya, maupun fungsinya. Sehingga kondisi bangsa Indonesia yang saat ini terjebak dalam benturan nilai-nilai baru akibat globalisasi yang berdampak pada upaya menolak maupun menerima orang lain berdasarkan identitas, disintegrasi, terorisme, KKN, hingga lemahnya daya kritis sosial, karakter Pancasila dapat menjadi solusi. Bagaimana cara mendiseminasikan

Pancasila agar menjadi karakter zoon politicon Indonesia?, akan menjadi pertanyaan besar yang akan dijawab oleh karya ilmiah ini.

Tugas dan kewajiban menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, telah menjadi tugas utama seluruh institusi pendidikan di Indonesia. Program studi (prodi) ilmu politik Universitas Kristen Indonesia (UKI) sebagai bagian dari institusi Pendidikan di Indonesia tentu memikul tugas yang sama. Hal ini harus diimplementasikan dalam kurikulum Pendidikan, dan metode pembelajaran yang dirumuskan sebagai Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu membentuk dan menghasilkan lulusan yang pada akhirnya menjadi zoon politicon Indonesia berkarakter Pancasila. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi prodi ilmu politik UKI, jika kita berkaca pada meluasnya masalah bangsa Indonesia yang sudah merambah berbagai aspek kehidupan. Maka Pancasila sebagai pedoman falsafah hidup bangsa harus disadari sebagai satu-satunya solusi dalam mengurangi bahkan menghentikan berbagai masalah bangsa terkini.

2. Rumusan masalah

Pancasila yang dilahirkan dan disepakati sebagai dasar negara, falsafah hidup bangsa, dan tujuan berbangsa, pada praktek implementatifnya memang belum maksimal. Sebagai sebuah nilai instrumental memang Pancasila perlu diinterpretasikan pada tataran praksis. Sebagai dasar negara tentu Pancasila harus dijabarkan dalam konstitusi sebagai nilai utama lahirnya regulasi pemerintahan, maupun kebijakan politik. Sementara menjadi falsafah hidup bangsa Pancasila harus menjadi nilai utama pengatur dan menjadi semangat utama dalam interaksi sosial bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila sebagai tujuan berbangsa dan bernegara, Pancasila harus menjadi acuan kemana bangsa Indonesia diarahkan. Berdasarkan perincian tersebut maka Pancasila harus menjadi karakter utama zoon politicon Indonesia.

Berkaca pada kondisi bangsa Indonesia saat ini dalam berbagai aspek kehidupan dapat kita setuju bahwa bangsa Indonesia telah terjebak dalam masalah multidimensional yang mengancam keberlangsungan hidup, perwujudan keadilan, serta eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Masalah-masalah seperti nasionalisme identitas yang berujung pada upaya menolak maupun menerima orang lain berdasarkan identitas atau rasisme dan diskriminasi, kerusakan lingkungan, ketidakpercayaan kepada penyelenggara negara, praktek demokrasi yang dinodai oleh politik uang, konservatisme agama yang berujung pada keinginan mengganti Pancasila dan sistem pemerintahan, separatisme, ketimpangan pembangunan dan pendapatan ekonomi, hingga praktek KKN yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Masalah-masalah yang terjadi di atas sudah barang tentu menjadi

kewajiban institusi Pendidikan untuk mampu memberikan solusi serta melahirkan zoon politicon Indonesia yang mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas. Prodi ilmu politik sebagai bagian dari institusi Pendidikan Universitas Kristen Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai bagian dari visi misinya, tentu memiliki tugas yang sama untuk menjadikan Pancasila sebagai solusi bangsa. Solusi yang dimaksud adalah melahirkan rekomendasi naskah akademik dan zoon politicon Indonesia yang berkarakter atau berdasarkan Pancasila. Upaya ini secara otomatis harus diimplementasikan dalam penerapan kurikulum dan metode pembelajaran. Oleh karena itu pertanyaan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah, bagaimana Pancasila diimplementasikan sebagai konsep Pendidikan karakter di Indonesia untuk menghasilkan zoon politicon Indonesia yang Pancasila?, dan bagaimana upaya prodi ilmu politik UKI dalam menghasilkan zoon politicon Indonesia yang memiliki karakter Pancasila?.

3. Pembahasan

a. Pancasila Sebagai Konsep Pendidikan Karakter

Dalam Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan memiliki arti sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Thomas Lickona sebagai pengusung pertama pendidikan karakter mengajukan unsur pendidikan karakter yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*) (Lickona, dalam Umi Muzayannah 2014, 280).

Kata “karakter” mempunyai banyak sekali definisi dari para ahli. Menurut Poerwadarminta, kata karakter berarti tabiat, watak sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain (Amirullah Syarbini 2012, 13). Dengan demikian, pendidikan karakter adalah sebuah upaya untuk membimbing perilaku manusia menuju standar-standar baku (Fatchul Mu” in 2011, 160). Pendidikan karakter adalah pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif saja, akan tetapi lebih berorientasi pada proses pembinaan potensi yang ada dalam diri peserta didik, dikembangkan melalui pembiasaan sifat-sifat baik yaitu berupa pengajaran nilai-nilai karakter yang baik (Fakrur Rozi 2012, 6). Sehingga menurut Heri Gunawan (2012, 30) tujuan pendidikan karakter pada intinya untuk membentuk bangsa yang tangguh kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan

teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan pancasila. Pendidikan karakter dapat diwujudkan dalam kegiatan intra kurikuler yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran, serta kegiatan ekstra kurikuler yang dilakukan di luar jam pelajaran (Furqon Hidayatullah 2010, 43). Oleh karena itu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Pancasila sudah tepat menjadi konsep dari Pendidikan karakter, karena Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tujuan negara, namun juga menjadi cara hidup bangsa Indonesia. Pancasila harus menjadi karakter utama bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai konsep pendidikan karakter dapat diterapkan melalui mekanisme Pendidikan sebagai berikut :

- Intrakurikuler : Nilai-nilai Pancasila diajarkan sebagai bagian dari pelajaran yang dipelajari di kelas.
- Kokurikuler : Kegiatan untuk memperdalam nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan observasi, maupun evaluasi perilaku masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
- Ekstrakurikuler : Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu, peserta didik diharuskan mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Cara ini dapat diterapkan berdasarkan tingkat Pendidikan, disesuaikan dengan proses tumbuh kembang peserta didik dan daya tangkapnya dalam memahami dan menerima materi pembelajaran.

Implementatif dari mekanisme Pendidikan diatas dapat dilakukan oleh pendidik dengan metode pembelajaran sebagai berikut :

- a. Ceramah, yaitu penyampaian materi secara lisan oleh pendidik dengan alat bantu mengajar, sementara anak didik mendengar, menyimak secara seksama penjelasan materi.
- b. Diskusi, yaitu metode mendidik saling bertukar informasi maupun adu argumentasi dan pendapat berdasarkan materi yang dikaitkan dengan sebuah masalah, dengan tuntutan adanya solusi atas masalah yang dibahas.
- c. Praktik, yaitu proses mendidik yang dilakukan dengan cara melakukan praktek secara langsung sesuai dengan materi yang disampaikan.
- d. Bermain peran, yaitu metode pendidikan yang diawali dengan identifikasi masalah sesuai materi yang diajarkan, selanjutnya peserta didik memainkan peran tertentu sesuai dengan materi yang diajarkan, dan diakhiri dengan diskusi. (lihat Sukmadinata, Nana Syaodih dan Erliana Syaodih: 2012, 153).
- e. Pemecahan masalah, yaitu metode pendidikan dengan cara mengemukakan masalah yang harus dipecahkan secara individual maupun berkelompok oleh peserta didik sesuai dengan materi yang diajarkan

f. Inkuiri reflektif, yaitu metode pendidikan yang sangat menuntun pemikiran kritis dan daya analitik antara pendidik dan peserta didik terkait masalah tertentu dengan pola komunikasi dua arah yang aktif.

Nilai Pancasila yang dapat diajarkan kepada peserta didik sebagai bagian dari Pendidikan karakter adalah:

- **Nilai Ketuhanan:** Pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta.
 - o Percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
 - o Hormat dan menghormati antar sesama umat beragama
 - o Menghormati kebebasan umat beragama menjalankan kegiatan ibadahnya.
 - o Tidak memaksakan suatu kepercayaan kepada umat beragama lainnya.
- **Nilai Kemanusiaan:** Tindakan seluruh bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani.
 - o Mengakui kesetaraan manusia
 - o Saling mencintai
 - o Tenggang rasa
 - o Adil
 - o Menjunjung nilai kemanusiaan
 - o Membela kebenaran dan keadilan
 - o Saling menghormati dan kerja sama dengan bangsa lain
- **Nilai Persatuan:** Adanya upaya persatuan untuk menumbuhkan nasionalisme.
 - o Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI
 - o Rela berkorban demi bangsa dan negara
 - o Cinta akan tanah air
 - o Bangga dengan Indonesia
 - o Memajukan pergaulan demi persatuan yang didasarkan pada Bhineka Tunggal Ika
- **Nilai Kerakyatan:** Implementasi nilai demokrasi tidak langsung dengan bentuk musyawarah mufakat.
 - o Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa umum diatas kepentingan pribadi
 - o Tidak memaksakan kehendak pada orang lain
 - o Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama
 - o Konsensus dengan musyawarah dalam lingkup asas kekeluargaan
- **Nilai Keadilan :** Perwujudan bangsa Indonesia yang adil dan makmur.

- o Bersikap adil terhadap sesama
- o Menghormati hak orang lain
- o Menolong sesama
- o Menghargai orang lain
- o Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum

Nilai-nilai Pancasila ini memang telah dimaknai secara luas dan lebih banyak poin yang disebutkan dari yang disebutkan diatas. Namun poin diatas dapat digunakan sebagai konsep pembentukan karakter zoon politicon Indonesia.

b.Karakter Zoon Politicon Indonesia Berdasarkan Pancasila

Branson dalam Winataputra dan Budimansyah (2007, 186) mengharuskan adanya kompetensi yang dimiliki oleh zoon politicon suatu bangsa, yaitu Civic Disposition. Civic Disposition merupakan karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Pancasila sebagai sumber utama Pendidikan karakter zoon politicon Indonesia juga adalah dasar dari pembentukan konstitusi, sehingga dasar demokrasi Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu civic disposition dari zoon politicon adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pasca penerapan Pancasila sebagai konsep utama Pendidikan karakter zoon politicon Indonesia, maka masalah-masalah multidimensional yang saat ini di Indonesia tentu tidak akan terjadi lagi.

Nilai-nilai Pancasila yang dapat menjadi karakter zoon politicon Indonesia:

- 1. Pertama,** zoon politicon Indonesia akan memiliki karakter utama sebagai manusia yang mengakui keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya entitas tertinggi diantara semua makhluk yang ada di alam semesta. Tuhan dicirikan dalam setiap agama di Indonesia secara berbeda namun memiliki kesamaan-kesamaan hakiki yang menggambarkan kekuasaannya. Oleh karena itu zoon politicon Indonesia secara otomatis diharuskan menghormati keberadaan, keyakinan, tata ibadah, dari setiap agama yang ada di Indonesia. Penghormatan yang dimaksud berarti semua manusia Indonesia berhak mempraktekkan tata cara ibadah dan keyakinan agamanya (hanya agama yang diakui negara), tidak ada pemaksaan untuk mengubah keyakinan, atau tidak ada praktek menerima atau menolak orang lain karena alasan agama atau keyakinan yang dianut.
- Dampak :** jika zoon politicon Indonesia telah memiliki karakter seperti diatas, maka berbagai praktek nasionalisasi SARA akan hilang, tidak ada pengrusakan, atau konflik karena keberadaan tempat

ibadah atau karena ada sekelompok umat beribadah, tidak ada penolakan terhadap pejabat publik karena alasan perbedaan agama, penghormatan terhadap manusia lain sebagai entitas yang setara karena hanya Tuhan yang tertinggi.

2. Kedua, jika Sila kedua telah menjadi karakter zoon politicon Indonesia maka wujudnya zoon politicon Indonesia akan sangat menjunjung tinggi perikemenausiaan, HAM, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Hal ini juga tetap mendukung apa yang dimaknai dari nilai sila ke 1.

Dampak: maka masalah-masalah seperti pelanggaran HAM, serta kegagalan perwujudan kebutuhan hidup bangsa tidak lagi terjadi karena hak-hak dan kewajiban dasar manusia telah terwujud.

3. Ketiga, zoon politicon Indonesia mampu menjadi manusia yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi bagi kedaulatan dan persatuan bangsa, yang didasarkan pada wawasan nusantara yang majemuk. Membangun hubungan antar negara yang adil dan setara tanpa membeda-bedakan identitas.

Dampak: masalah-masalah disintegrasi tidak terwujud karena upaya untuk menciptakan persatuan nasional didasarkan pada proses penciptaan hak dan kewajiban yang setara.

4. Keempat, zoon politicon Indonesia akan mampu menjadikan kepentingan umum sebagai tuntutan utama tugas politik sebagai satu bangsa, yang didasarkan pada aspirasi rakyat sehingga kebijakan yang dilahirkan adalah keputusan Bersama yang mampu mewujudkan kepentingan umum. Karena bangsa Indonesia dipandang sebagai satu keluarga besar.

Dampak: maka praktek demokrasi di Indonesia tidak melahirkan kondisi minoritas maupun mayoritas namun kesetaraan karena adanya aspirasi rakyat yang didengar seluruhnya untuk kemudian diwujudkan sebagai sebuah keputusan Bersama melalui musyawarah. Hal ini tentu akan menghasilkan kepuasan umum karena sistem politik ditunjukkan pada perwujudan kepentingan umum yang merupakan perintah dari keputusan Bersama, bukan kepentingan sekelompok orang. Maka praktek-praktek oligarki tidak terwujud

5. Kelima, zoon politicon Indonesia menjadi manusia-manusia yang mampu mewujudkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dalam hidupnya dalam mewujudkan kepentingan umum yang setara bagi seluruh manusia tanpa keinginan untuk mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dampak: praktek KKN, ketimpangan pembangunan, dan ketimpangan ekonomi tidak akan terwujud. Tujuan bangsa yaitu kesejahteraan, keamanan, kebebasan, keadilan, dan peningkatan

kualitas hidup dapat terwujud, karena ini juga menjadi kebutuhan utama setiap manusia.

c. Peran Prodi Ilmu Politik Dalam Melahirkan Zoon Politicon Berkarakter Pancasila

Dalam perumusan tugas Lembaga Pendidikan di negeri ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu mendukung tujuan nasional, sesuai dengan perintah UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun UUD 1945. Prodi ilmu politik harus mampu mengimplementasikan tugas ini. Karena sebagai salah satu corong utama di negeri ini dalam menghasilkan zoon politicon yang benar-benar memahami tugas dan fungsi sistem politik, tentu memainkan peran penting dalam upaya melahirkan zoon politicon yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ini juga merupakan tugas utama semua insitusi Pendidikan. Oleh karena itu hal ini kemudian dijabarkan kedalam visi misi prodi ilmu politik Universitas Kristen Indonesia sebagai berikut (Pedoman Kurikulum Program Studi Ilmu Politik 2015) :

Menjadi Program Studi Ilmu Politik yang unggul dalam bidang otonomi daerah yang demokratis berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai kristiani di Indonesia pada tahun 2027.

Visi prodi ilmu politik UKI kemudian diturunkan dalam bentuk misi yang isinya berupaya menjabarkan implementasi Pancasila yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip demokrasi ala barat, namun tetap menitikberatkan pada kearifan lokal milik bangsa Indonesia. Sehingga melahirkan misi prodi ilmu politik UKI sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan sarjana dalam bidang ilmu politik dengan fokus pada studi otonomi daerah yang demokratis.
2. Mengembangkan penelitian tentang pluralisme dan demokrasi berbasis kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia.
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Mengembangkan Pusat Studi Otonomi Daerah melalui kerjasama dengan instansi terkait.

Berkaca pada visi dan misi diatas maka prodi ilmu politik UKI berusaha mewujudkannya dalam bentuk tugas-tugas Tridharma perguruan tinggi (Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), sebagai berikut:

• **Pendidikan:** implementasi dari pendidikan ini adalah dalam bentuk mata kuliah yang diajarkan.

- o **Pendidikan Pancasila:** Tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mengetahui sejarah lahirnya Pancasila sebagai

dasar negara Republik Indonesia, agar mahasiswa memahami bahwa Pancasila adalah dasar hukum negara Republik Indonesia serta ideologi, falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, agar mahasiswa dapat menerapkan Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

- o **Pendidikan Kewarganegaraan:** Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang Kewarganegaraan Indonesia, bagaimana warganegara melaksanakan partisipasi politiknya, dan ikut aktif dalam kehidupan kenegaraan.
- o **Pengantar Ilmu Politik:** Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar pengetahuan dan pemahaman mengenai objek, ruang lingkup, dan konsep-konsep dasar dari Ilmu Politik seperti: negara, kekuasaan, sistem politik dan kekuatan politik. Juga dibahas mengenai kedudukan Ilmu Politik, hubungannya dengan ilmu pengetahuan lain dan perkembangannya serta kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada Ilmu Politik.
- o **Sistem Politik Indonesia:** Kuliah ini dimaksudkan untuk mengantar mahasiswa memahami sistem politik yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Dalam mata kuliah ini mahasiswa akan terlebih dahulu di perkenalkan dengan analisis sistem politik serta fungsi-fungsi dan struktur-struktur yang terdapat dalam sistem politik. Berdasarkan pendekatan tersebut, mahasiswa diajak membahas sistem politik yang pernah berlaku (sistem politik pada masa demokrasi parlementer/liberal dan pada masa demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila atau Orde Baru dan pasca Orde Baru dan Reformasi. Mata kuliah ini juga membahas demokratisasi di semua aspek politik yang terjadi pasca Orde Baru.
- o **Sistem Perekonomian Indonesia:** Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian tentang sistem ekonomi Indonesia beserta berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir secara logis dan sistematis mengenai masalah-masalah ekonomi sebagai persoalan kemasyarakatan; memperkokoh pengetahuan dan keterampilan mahasiswa mengenai konsep-konsep ekonomi yang mendasar dan meningkatkan penguasaan konsep-konsep tersebut melalui penerapannya dalam berbagai permasalahan yang nyata; mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk mengkomunikasikan kembali pengetahuan ilmiah tersebut secara sederhana, jelas dan sistematis.
- o **Sistem Hukum Indonesia:** Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem hukum yang pernah berlaku dan sedang

berlaku di Indonesia dan pembangunan hukum yang sedang berlangsung saat ini.

- o **Sistem Sosial dan Budaya Indonesia:** Mengantar mahasiswa untuk mengetahui serta memahami kemajemukan masyarakat dan budaya Indonesia dengan menggunakan pendekatan sistem. Dalam mata kuliah ini akan dibahas dasar-dasar pendekatan sistem, pengelompokan masyarakat Indonesia, kemajemukan budaya, perubahan sosial budaya di Indonesia pengaruh luar terhadap kehidupan sosial budaya dan masalah integrasi nasional.
- o **Negara dan Masyarakat Sipil:** Membahas tentang berbagai kelompok dan berbagai dalam masyarakat yang berinteraksi dengan para elit negara dan melakukan kontrol terhadap negara untuk kepentingan masyarakat.

• **Penelitian:** disusun dalam bentuk rencana strategis penelitian prodi ilmu politik UKI baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa sebagai berikut;

- o Penelitian politik yang dengan konsentrasi pada masalah-masalah implementasi otonomi daerah, penerapan nilai dan prinsip demokrasi, implementasi nilai Pancasila dan nilai kristiani pada ranah politik nasional maupun lokal pasca penerapan otonomi daerah.

Implementasinya dalam 1 tahun terakhir:

- o Penelitian Fransiskus X. Gian Tue Mali “Politik Identitas Pada Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2017”
- o Penelitian Budi Chrismanto Sirait “Hilangnya Multikulturalisme Dalam Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Bekasi dan Kota Bogor”
- o Penelitian Fransiskus X. Gian Tue Mali dan Indah Novitasari “Pilihan Rasional Masyarakat Suku Lape dalam Pemilukada Kabupaten Nagekeo Tahun 2018”
- o Penelitian Indah Novitasari “Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kediri Berdasarkan Asas Partisipatif Masyarakat Desa”

• **Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)**

- o PKM prodi ilmu politik UKI yang telah dilakukan didasarkan pada tema besar seperti; Pendidikan pluralisme, Pendidikan sistem politik, dan pendidikan pancasila.

Implementasinya 1 tahun terakhir:

- o Pendidikan pluralisme bagi masyarakat di Gereja Kristen Getsemeni Kelapa Gading pada tahun 2018.
- o Pendidikan politik bagi generasi milenial di SMA Global Prestasi Kalimalang, pada tahun 2019.

o Pendidikan Pancasila dan Sistem Politik Indonesia bagi masyarakat Baduy Luar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada tahun 2019. Implementasi dari tugas Tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan oleh prodi ilmu politik UKI ini dapat melahirkan zoon politicon Indonesia yang berkarakter Pancasila. Dengan harapan pada akhirnya mampu berkontribusi secara nyata bagi penyelesaian masalah multidimensional yang dialami bangsa Indonesia saat ini.

4. Penutup

Prodi ilmu politik UKI sebagai institusi Pendidikan yang mengkhususkan diri dalam melahirkan zoon politicon Indonesia yang berkarakter Pancasila telah mengimplementasikannya dalam seluruh kegiatan pendidikannya. Karena disadari betul bahwa eksistensi bangsa dan negara Indonesia hanya bisa dijawab jika seluruh entitas bangsa mampu menjadikan Pancasila sebagai ciri karakter pribadi, dan sistem politik yang dianut, termasuk keseluruhan interaksi sosial dalam upaya mewujudkan kepentingan manusia Indonesia. Karena didalam Pancasila telah terkandung makna kebebasan individu dalam meyakini dan menjalani kepercayaan yang diakui oleh negara. Pancasila menjamin terwujudnya HAM sebagai esensi manusia sebagai manusia. Pancasila juga pada titik tertentu mewajibkan adanya integrasi yang didasarkan pada kepentingan umum yang lahir dari aspirasi rakyat, dalam upayanya untuk mewujudkan kebutuhan manusia, sehingga pada akhirnya keadilan sosial dapat terwujud.

Oleh karena itu tujuan segelintir orang yang ingin mengganti Pancasila dengan nilai-nilai lain, hanya akan menciptakan polarisasi yang dapat berujung pada konflik komunal. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya nilai-nilai baru yang ditawarkan untuk mengganti atau bertentangan dengan Pancasila, baik dalam diskusi di ruang publik, aksi unjuk rasa, demonstrasi, maupun upaya-upaya yang diklaim sesuai dengan konstitusi seperti pembentukan peraturan daerah, organisasi kemasyarakatan, maupun regulasi nasional yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang bertentangan dengan Pancasila. Inseminasi Pancasila sebagai karakter zoon politicon Indonesia akan menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, dan damai. Pancasila juga dapat menjadi karakter zoon politicon internasional, sehingga tercipta masyarakat internasional dengan kondisi yang sama. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budimansyah, D dan Winataputra.** (2007). Civic Education 'Konteks, Landasan, Bahan Ajar, Dan Kultur Kelas. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pasca Sarjana UPI.
- Gunawan, Heri.** (2012). Pendidikan Karakter: Konsep Dan Implementasi. Bandung: Alfabeta.
- Hidayatullah, Furqon.** (2010). Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Kaelan.** (2000). Pendidikan Pancasila, Yogyakarta : Paradigma.
- Mu'in, Fatchul.** (2011). Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoretik & Praktik. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rozi, Fakrur.** (2012). Model Pendidikan Karakter dan Moralitas Siswa di Sekolah Islam Modern; Studi pada SMP Pondok Pesantren Selamat Kendal, (Semarang, IAIN Walisongo).
- Sukmadinata, Nana Syaodih dan Erliana Syaodih.** (2012). Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi. Bandung: Refika Aditama.
- Suseno, Magnis, Franz.** (2016). Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syarbini, Amirullah.** (2012). Buku Pintar Pendidikan Karakter; Panduan Lengkap Mendidik karakter Anak di Sekolah, Madrasah, dan Rumah, Jakarta: As@-Prima Pustaka.

Jurnal

- Muzayanah, Umi.** (2014), Manajemen Madrasah Sebagai Media Strategis Pendidikan Karakter (Studi Kasus Pada MTS Muhammadiyah 01 Purbalingga), Jurnal "Analisa" Volume 21 Nomor 02 Desember 2014 halaman 279-289.

Regulasi

- UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA DAN TANTANGAN MENUJU AKREDITASI INTERNASIONAL

V.L. SINTA HERINDRASTI

Ketua Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia,
Jl. Mayjen Sutoyo no.2, Cawang - Jakarta, 13630, Indonesia

Herindrasti@yahoo.com, valentina.herindrasti@uki.ac.id

Pengantar

Memandang dunia pendidikan di Indonesia bak melihat berbagai potret realitas yang sangat beragam dimana masing-masing bermuara pada masalah-masalah yang sangat mendasar yang tidak mudah diselesaikan dalam jangka waktu pendek. Harapan terhadap pendidikan sebagai jalan bagi peningkatan kesejahteraan sangatlah tinggi sehingga harapan akan kualitas mutu pendidikan pun juga menjadi semakin tinggi. Bagi negara seluas dan sepadat Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 269 juta terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok (1,4 milyar), India (1,3 milyar), dan Amerika Serikat (328 juta) (Jayani 2019), masalah pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Menimbang banyaknya para pihak (stakeholders) yang terkait dengan dunia pendidikan maka dapat dibayangkan bagaimana kompleksnya suatu usaha pengaturan penjaminan dan peningkatan mutu perguruan/pendidikan tinggi (PT) ketika harus menjawab seluruh kebutuhan para pemangku kepentingan.

Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti), Mohmmad Nasir dalam salah satu pidatonya, menyatakan bahwa perguruan tinggi harus bisa menjawab persoalan sosial yang semakin kompleks baik dari segi jenis maupun substansinya (Putri 2018). Diyakini semakin banyak sumber daya yang dihasilkan oleh PT akan semakin banyak alternatif solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat. Harapan tersebut mengandaikan

bahwa kualitas mutu PT tinggi, kualitas lulusan tinggi memiliki relevansi kualifikasi lulusan PT dengan kebutuhan dunia kerja dan karakter kebiasaan lulusan yang baik. Namun, dalam kenyataannya tidak demikian.

Merujuk data BAN-PT 2017, dari 4530 PT di Indonesia (lebih besar dari Tiongkok yang hanya 1500-an) mayoritas (65%) masih terakreditasi C, sisanya 31% terakreditasi B dan 4% terakreditasi A. Malahan menurut APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) masih ada sekitar 56% PT dan 23% prodi yang belum terakreditasi. Berdasarkan data BAN-PT dari total 4600 PT di Indonesia, hingga kini baru 1975 yang telah terakreditasi. Di lain pihak, Kemristekdikti bahkan menargetkan pada tahun 2018 tiap perguruan tinggi badan hukum (PTNBH) memiliki akreditasi internasional minimal lima (5) program studi per-universitas.

Tulisan ini hendak melihat relevansi akreditasi dalam peningkatan kualitas lulusan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia, kebutuhan akan akreditasi internasional setelah pencapaian akreditasi nasional serta tantangan yang harus dihadapi dalam proses peningkatan akreditasi internasional.

Relevansi Pelaksanaan Akreditasi Nasional dan Internasional

Mengapa akreditasi menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan Indonesia dewasa ini? Apa manfaat akreditasi bagi lembaga PT dan pihak lain terutama pihak pengguna?

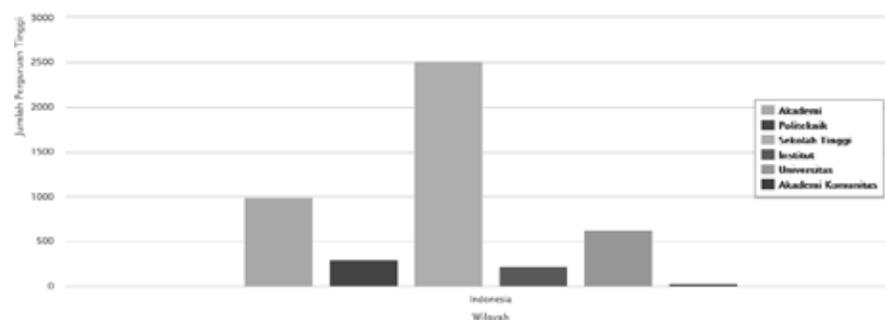
Akreditasi/sertifikasi merupakan suatu pengakuan mutu dari pihak eksternal tentang input, proses, output, outcomes, dan sistem/manajemen mutu pendidikan di suatu program studi/perguruan tinggi. Pengakuan atau rekognisi ini didasarkan pada kriteria yang menjadi tolok ukur dimensi mutu dan telah disepakati pada tingkat nasional, regional, mau pun internasional. Mutu dalam pendidikan tinggi bukanlah gagasan satu dimensi sederhana tentang mutu pendidikan. Mengingat beragamnya kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, mutu pendidikan tinggi dapat dikatakan sebagai konsep multi dimensi (Kemristekdikti 2019, hal. 3).

Mengingat besarnya kuantitas perguruan tinggi maka pelaksanaan akreditasi menjadi hal yang mutlak. Bagaimana mutu dapat dipantau jika instrumen akreditasi tidak diberlakukan secara ketat dan menjangkau seluruh lembaga yang ada baik di kota maupun pelosok?

Menurut forlap Ristekdikti (Kemristekdikti 2019), jumlah total perguruan tinggi di Indonesia mencapai 4645 buah, terdiri dari Akademi 993, Politeknik 298, Sekolah Tinggi 2510, Institut 223, Universitas 621. Sementara itu jumlah total program studi dari sumber yang sama mencapai

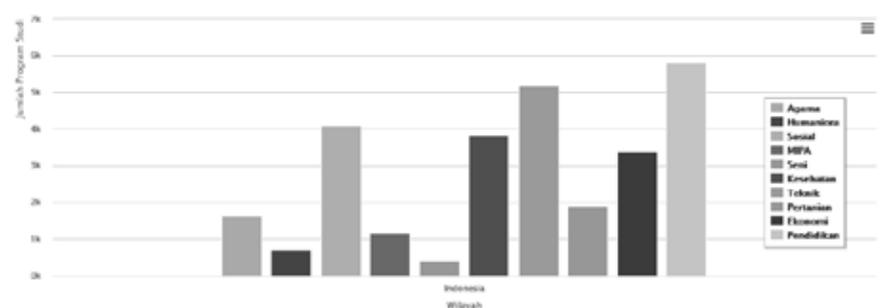
28.106 buah, terdiri dari program studi Agama 1620, Humaniora 702, Sosial 4098, MIPA 1159, Seni 403, Kesehatan 3827, Teknik 5177, Pertanian 1912, Ekonomi 3387 dan Pendidikan 5821. Data ini menyangkut semua kategori perguruan tinggi (negeri dan swasta), semua jenjang (Di, D2, D3, D4, Non

Gambar 2.1 Grafik Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia



Sumber: Ristekdikti, 2019

Gambar 2.2 Grafik Jumlah Program Studi di Indonesia



Sumber: Ristekdikti, 2019

formal, informal, lainnya, Sp-1, Sp-2, Profesi, S1 Terapan, S2 Terapan), semua wilayah koordinasi dan semua provinsi.

Sementara itu, terdapat 80 universitas yang mempunyai program studi Hubungan Internasional di seluruh Indonesia. Prodi HI ada di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Saat ini prodi HI tersebar di Universitas Airlangga-Unair Surabaya, Universitas Gadjah Mada-UGM Yogyakarta, Universitas Indonesia-UI Jakarta, Universitas Jember-Unej, Universitas Padjadjaran-Unpad, Bandung, Universitas Riau-Unri Pekanbaru, UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, IISIP Jakarta, Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi, UKP Bandung, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Pasundan Bandung, Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta, Universitas Paramadina Jakarta, STIKOM London School of Public Relation (LSPR) Jakarta Selatan, Universitas Al Azhar Jakarta, Budi Luhur Jakarta Selatan, Universitas Pertamina, Bina Nusantara Jakarta Barat, Universitas Nasional Jakarta Selatan, UPN Jakarta, Universitas Setya Negara Indonesia Jakarta Selatan, Universitas Bakrie Jakarta Selatan, Universitas Jayabaya, Universitas 17 Agustus Jakarta Utara, Universitas Muslim Bireun, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Universitas Megow Pak Tulang Bawang, Universitas Lampung Bandar Lampung, Universitas Sriwijaya, Universitas Andalas, Universitas Islam Riau, Universitas Abdurrah, Pekanbaru, Universitas Riau, Universitas Tanjung Pura, Universitas Nahdhotul Ulama Kalimantan Timur, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Universitas Cendrawasih Jayapura, Universitas Sulawesi Barat, Majene, Universitas Fajar, Makassar, Universitas Bosowa Makassar, Universitas Hasanuddin, Universitas Darul Ulum Jombang, Universitas Udayana, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, Universitas Ma Chung Malang, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Universitas Presiden Cikarang, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Universitas Peradaban Brebes, Universitas Majalengka, Universitas Al Ghifari Bandung, Universitas Komputer Indonesia (Initu. id 2018). Faktor besarnya kuantitas ini yang menjadikan BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) mempunyai tugas sangat besar untuk menjalankan dan menuntaskan PT yang belum terakreditasi.

Faktor lain yang menjadikan akreditasi BAN-PT suatu kebutuhan adalah akreditasi sebenarnya merupakan salah satu bentuk sistem jaminan mutu eksternal yaitu suatu proses yang digunakan lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu institusi mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu. Dengan demikian, akreditasi melindungi masyarakat dari penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penilaian yang dilakukan dalam proses akreditasi memiliki tujuan ganda, yaitu: (i) Menginformasikan kinerja perguruan tinggi kepada masyarakat, (ii) Mengemukakan langkah pembinaan yang perlu ditempuh terutama oleh perguruan tinggi dan pemerintah, serta partisipasi masyarakat. Proses ini merupakan proses penilaian dengan berbagai kriteria (baik bagi PT maupun program studi) yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan pengakuan pemerintah kepada PT akan hasil akreditasinya.

Dari segi manfaat, akreditasi juga berguna dalam rangka pengusulan proyek lembaga dimana PT dengan akreditasi A dapat mengusulkan proyek dengan nilai sekian miliar yang besarnya tentu berbeda dengan PT/program studi akreditasi B atau C. Sedangkan manfaat akreditasi bagi lulusan adalah menjadi syarat ketika akan bekerja terutama untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Banyak lembaga menetapkan syarat nilai akreditasi tertentu PT atau prodi bagi lulusannya ketika melamar kerja. Intinya akreditasi adalah pengakuan akan kualitas proses pendidikan yang menghasilkan luaran lulusan yang dijamin kualifikasi dan kualitasnya setelah menjalani proses yang diakui nilainya dengan berbagai kriteria.

Apabila akreditasi nasional dengan kualifikasi tertinggi sudah diperoleh, maka pemerintah juga mendorong untuk melakukan persiapan akreditasi internasional yang tujuannya untuk mendapatkan pengakuan (rekognisi) pada tingkat yang lebih luas baik regional maupun internasional. Percepatan akreditasi internasional oleh pemerintah dalam hal ini oleh Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti didorong oleh masih rendahnya program studi yang mendapatkan rekognisi internasional. Data Kemenristekdikti bulan Juni 2019 menunjukkan bahwa dari 27.779 program studi aktif yang ada di Indonesia, baru 395 program studi yang telah meraih rekognisi internasional melalui perolehan akreditasi/sertifikasi internasional. Perguruan tinggi di Indonesia yang program studinya telah terekognisi internasional ditunjukkan pada Tabel 1. Perolehan 5 (lima) tertinggi didapat oleh Universitas Gadjah Mada, disusul oleh Universitas Airlangga, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, dan Institut Pertanian Bogor. Jumlah program studi yang telah memperoleh rekognisi internasional tersebut jauh lebih kecil dibanding dengan jumlah program studi yang terakreditasi A oleh BAN PT. Total program studi yang terakreditasi A dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia adalah 3.762 program studi (per Juni 2019). Jadi total program studi terakreditasi A sekaligus terekognisi internasional adalah 10,5% dari total program studi aktif (Kemristekdikti, Buku Pedoman Program

Tabel 1.1 Jumlah Program Studi Rekognisi Internasional berdasarkan Perguruan Tinggi Di Indonesia

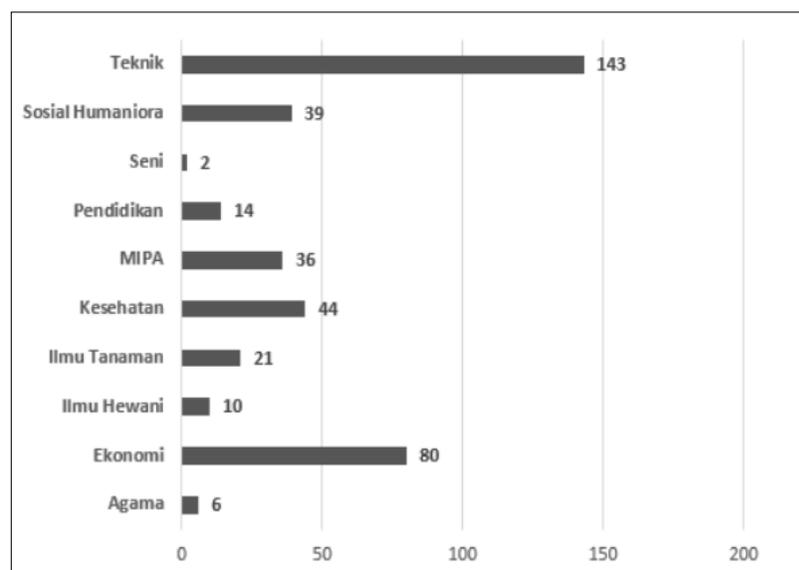
PERGURUAN TINGGI	JUMLAH PROGRAM STUDI
Universitas Gadjah Mada	65 Prodi
Universitas Airlangga	40 Prodi
Institut Teknologi Bandung	39 Prodi

Universitas Indonesia	38 Prodi
Institut Pertanian Bogor	28 Prodi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	20 Prodi
Universitas Brawijaya	19 Prodi
Universitas Islam Indonesia	19 Prodi
Universitas Hasanudin	14 Prodi
Universitas Islam Bandung	14 Prodi
Universitas Pendidikan Indonesia	12 Prodi
Universitas Telkom	12 Prodi
Universitas Diponegoro	10 Prodi
Politeknik Negeri Bandung	10 Prodi
Universitas Andalas	7 Prodi
Universitas Bina Nusantara	6 Prodi
Universitas Kristen Duta Wacana	6 Prodi
Universitas Negeri Padang	6 Prodi
Universitas Sebelas Maret	5 Prodi
Universitas Trisakti	5 Prodi
Universitas Padjadjaran	3 Prodi
Universitas Surabaya	3 Prodi
Universitas Muhammadiyah Malang	3 Prodi
Universitas Sumatera Utara	2 Prodi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta	2 Prodi
Universitas Islam Sultan Agung	2 Prodi
Universitas Lampung	1 Prodi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	1 Prodi
Universitas Parahyangan	1 Prodi
Universitas Tarumanegara	1 Prodi
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	1 Prodi
Total	395 Prodi

Sumber: Ristekdikti, 2019

Fasilitas Program Studi menuju Akreditasi/Sertifikasi Internasional 2019). Kemenristekdikti juga menggambarkan sebaran rekognisi internasional sesuai bidang (Gambar 1) dimana rumpun Teknik menduduki posisi tertinggi disusul oleh rumpun Ekonomi dan Kesehatan.

Gambar 2.3 Sebaran Rekognisi Internasional berdasarkan Rumpun Keilmuan



Sumber: Kemenristekdikti, 2019

Peta Jalan Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi Indonesia

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah membentuk Tim Penyusunan Roadmap Akreditasi Internasional, di bawah koordinasi Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan sebagai bagian dari program fasilitasi program studi menuju rekognisi internasional. Adapun fokus adalah pada program akreditasi dan sertifikasi AUN-QA (ASEAN University Network-Quality Assurance) -- suatu kelompok Chief Quality Officers (CQOs) yang ditunjuk oleh universitas anggota AUN sebagai focal point untuk mengkoordinasi kegiatan dalam rangka realisasi misi harmonisasi standar pendidikan dan perbaikan kualitas akademik secara terus menerus universitas-universitas di ASEAN. Tujuan dari akreditasi/sertifikasi internasional adalah: (1) sebagai panduan dan pedoman umum untuk pembinaan PT agar diakui internasional; (2) memberi gambaran umum tentang persyaratan dan proses untuk mencapai pengakuan internasional; (3) sebagai panduan untuk strategi dan pengembangan penjaminan mutu terkait akreditasi/sertifikasi internasional, dan (4) sebagai pedoman awal untuk mencapai pengakuan internasional. Berbagai kata kunci penting juga disertakan agar terjadi penyamaan persepsi di kalangan pemangku kepentingan, misalnya pengertian Akreditasi - suatu

pengakuan terhadap lembaga pendidikan (bukan lulusan) yang diberikan oleh badan yang berwenang sebagai hasil penilaian bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat/kriteria mutu yang ditetapkan. Akreditasi ditujukan kepada institusi penyelenggara pendidikan dan bukan kepada lulusan. Pengertian Sertifikasi – yaitu pemenuhan kriteria kelulusan dan melalui proses pembelajaran dan evaluasi yang sesuai dengan kriteria/standar yang ditetapkan oleh suatu badan internasional. Pengertian Validasi – adalah proses pembuktian menggunakan metode yang tepat untuk memastikan tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang dilakukan pada lembaga sehingga hasil dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang direncanakan. Pengertian Asesmen – adalah proses pengumpulan dan analisis data/informasi secara sistematis sebagai dasar perencanaan, dan pengembangan mutu lembaga secara berkelanjutan. Pengertian Surveilans – adalah indikasi pengawasan berkala berupa pengumpulan dan analisis data/informasi secara terus menerus/periodik dan sistematis untuk memastikan standar/kriteria dipenuhi secara berkelanjutan atau bagian dari proses re-akreditasi.

Dalam proses rekognisi internasional, evaluasi dilakukan oleh asesor independen yang berasal dari berbagai negara. Evaluasi dianggap sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia agar dapat memperoleh pengakuan internasional. Evaluasi umumnya menggunakan outcomes-based education (OBE) sebagai kriteria rujukan utama dimana fokusnya adalah kemampuan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa pada akhir proses pembelajaran. Sebagai suatu sistem pendidikan OBE melakukan banyak hal termasuk melakukan restrukturisasi kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, penilaian dan monitoring/evaluasi dalam proses pendidikan. Struktur kurikulum dirancang agar kemampuan mahasiswa yang telah didefinisikan dapat tercapai dan mahasiswa bisa menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan. OBE menekankan pada apa yang siswa dapat dan mampu lakukan, bagaimana lembaga dapat membantu mahasiswa mencapai kemampuan tersebut dan bagaimana kita tahu bahwa mahasiswa telah mencapai kemampuan tersebut dan apakah diperlukan perbaikan kualitas terus menerus (continuous quality improvement). Dengan demikian setiap tahapan dalam pembuatan kurikulum dan pencapaiannya menjadi sangat penting.

Dalam program fasilitasi program studi menuju rekognisi internasional, Kemenristekdikti juga mempertimbangkan kesiapan program studi melalui pengelompokan berdasarkan kesiapan. Kriteria yang digunakan dalam pengelompokan program studi adalah (i) kriteria lembaga Akreditasi Internasional – suatu lembaga akreditasi internasional dipilih

dengan melihat kriteria substansi, kelembagaan, reputasi dan kematangan; (ii) Kriteria komitmen; (iii) Kriteria Administratif (dasar) - kriteria akreditasi dan budaya mutu berkelanjutan; (iv) Kriteria substansi lanjut meliputi kriteria evaluasi diri berbasis standar rekognisi internasional dan pemenuhan standar internasionalisasi (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Juni 2019, hal 5). Tabel 2 menunjukkan pengelompokan program studi berdasarkan kriteria kesiapan tersebut di atas untuk dapat membantu setiap program studi memposisikan dirinya Dengan tersedianya kriteria yang dapat menunjukkan

Tabel 1.2 Pengelompokan Program Studi berdasarkan Kriteria Kesiapan Menuju Rekognisi Internasional

KELOMPOK	CAPAIAN	INDIKATOR
Kelompok 1	Program Studi telah rekognisi internasional	1. Institusi telah mempunyai strategi yang sistematis untuk mendorong program studi rekognisi internasional; 2. Program studi telah memenuhi semua kriteria administratif maupun substantif.
Kelompok 2	Program Studi dalam proses rekognisi internasional	1. Institusi telah mempunyai strategi yang sistematis untuk mendorong program studi rekognisi internasional; 2. Program studi telah memenuhi semua kriteria dasar namun belum memenuhi semua kriteria substantif.
Kelompok 3	Program Studi Menuju rekognisi internasional	1. Institusi telah mempunyai komitmen tetapi belum mampu menyusun strategi yang sistematis untuk mendorong program studi rekognisi internasional; 2. Program studi telah memenuhi semua kriteria administratif namun belum memenuhi semua kriteria substantif.
Kelompok 4	Program Studi berpotensi menuju rekognisi internasional	1. Institusi telah mempunyai komitmen tetapi belum mampu menyusun strategi secara sistematis; 2. Program studi telah memenuhi sebagian besar kriteria administratif maupun substantif.

Sumber: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Juni 2019, hal 6

kesiapan program studi dalam rangka usaha rekognisi internasional, maka program studi di Indonesia dapat terbantu untuk mempersiapkan diri dengan kriteria-kriteria yang diminta oleh asesor internasional.

Untuk mempercepat program studi memperoleh rekognisi internasional, Ditjen Belmawa menerapkan empat program strategi, yaitu:

1. Program Fasilitasi Program Studi – untuk memastikan program studi yang telah memulai proses rekognisi internasional berhasil dalam proses tersebut;
2. Program Akselerasi Program Studi - untuk mendorong program studi yang potensial maupun sedang dalam persiapan agar terakselerasi untuk mendapatkan rekognisi internasional;
3. Program Pendampingan Program Studi - untuk memberi bantuan teknis dan penguatan institusional baik kepada program studi maupun institusi untuk dapat menyusun strategi internal menuju rekognisi internasional;
4. Program Pemeliharaan dan Pengasuhan Program Studi - untuk memastikan program studi yang telah rekognisi internasional dapat mempertahankan statusnya dan turut mendiseminasikan pengalamannya ke program studi/ institusi lain melalui program asuh serta berkontribusi dalam memperkuat kesetaraan kualitas pendidikan di Indonesia di mata internasional.

Program fasilitasi atau layanan program studi untuk mendapatkan rekognisi internasional Kemenristekdikti dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Deskripsi program

Program layanan peningkatan mutu program studi agar terekognisi internasional melalui bimbingan teknis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan OBE, mengembangkan sistem dan manajemen mutu di program studi agar memenuhi syarat rekognisi internasional.

2. Tujuan

- a. Memfasilitasi 10 (sepuluh) program studi/fakultas untuk persiapan meraih rekognisi internasional dalam upaya meningkatkan jumlah program studi yang terekognisi internasional;
- b. Memastikan program studi mendapat rekognisi internasional.

3. Sasaran

- a. Program studi dalam klaster 2, yaitu program studi dalam proses rekognisi internasional;
- b. Institusi telah mempunyai strategi yang sistematis untuk mendorong program studi terrekognisi internasional.

- c. Program studi telah memenuhi semua kriteria dasar namun belum memenuhi semua kriteria substantif.
- d. Rencana rekognisi telah diterima oleh lembaga akreditasi/AUN-QA.

4. Output program

- a. Tersusunnya strategi dan peta jalan program studi menuju rekognisi internasional.
- b. Ada upaya progres pelaksanaan OBE, sebagai prasyarat rekognisi internasional.
- c. Dokumen kelayakan untuk mengajukan proses rekognisi internasional.

5. Indikator keberhasilan

Program studi terekognisi internasional dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada tahun 2020.

6. Dasar Hukum

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah nomor 04 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 15 tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemristekdikti;
4. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 juncto No 50 tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi;
6. Permenristekdikti No.62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti No. 50 tahun 2017, tentang Rencana Strategis Kemenristekdikti Tahun 2015-2019;

Kemenristekdikti melalui program fasilitasi juga akan melakukan kegiatan bimbingan teknis selama 3 kali, yaitu:

1. Bimbingan Teknis I: Asesmen outcomes.

Pada bimbingan teknis ini peserta akan dibimbing untuk mereview rumusan outcomes program studi dan merumuskan tahapan-tahapan untuk asesmen outcomes tersebut. Peserta akan dibimbing untuk merencanakan asesmen dan melakukan asesmen outcomes untuk beberapa outcomes program studi dengan menggunakan metode yang sesuai.

Output dari bimbingan teknis ini adalah, peserta dapat melakukan asesmen untuk seluruh outcomes. Hasil asesmen ini selanjutnya perlu dianalisis dan dievaluasi sehingga program studi mengetahui tingkat ketercapaian/pemenuhan outcomesnya. Hasil ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui gap yang terjadi sehingga rencana perbaikannya dapat ditentukan.

2. Bimbingan Teknis II: Penyusunan Dokumen Rekognisi.

Peserta perlu menetapkan terlebih dahulu rencana badan rekognisi internasional yang akan dituju. Selanjutnya pada bimbingan teknis kedua ini, peserta akan dibimbing untuk memahami kriteria-kriteria dalam akreditasi sehingga peserta dapat menyusun self assessment report (SAR) dengan baik. Bimbingan teknis akan dilakukan secara paralel sesuai dengan jenis rekognisi yang akan dituju.

3. Bimbingan Teknis III: Persiapan Visitasi

Setiap proses rekognisi selalu diikuti dengan proses asesmen lapangan. Pada bimbingan teknis ini akan dijelaskan elemen-elemen yang penting untuk dipersiapkan agar proses rekognisi internasional dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu peta jalan pengembangan program studi menuju akreditasi/sertifikasi internasional akan dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

1. Proses Rekognisi/Pengakuan Internasional

- Tahap persiapan menuju akreditasi/sertifikasi internasional
- Tahap proses akreditasi/sertifikasi
- Tahap pasca akreditasi/sertifikasi (pemeliharaan)

2. Tahap Persiapan Menuju Akreditasi/Sertifikasi

- Adopsi Outcome-based Education (OBE)
- Memodifikasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sesuai dengan paradigma OBE
- Melakukan kondisi awal program studi
- Melakukan asesmen kecukupan (readiness)

3. Tahap Proses Akreditasi/Sertifikasi

- Pendaftaran formal ke board of accreditation/certification
- Pengajuan dokumen akreditasi
- Visitasi atau asesmen lapangan
- Penentuan hasil akreditasi/sertifikasi

4. Tahap Pasca Akreditasi/Sertifikasi (Pemeliharaan)

- Melakukan pelaporan kinerja tahunan (annual report)
- Melakukan pengembangan mutu secara berkelanjutan
- Ikut serta menyebarkan pengetahuan tentang akreditasi internasional ke program studi lain yang sebidang.

Badan/lembaga Akreditasi Internasional

Dalam melakukan pemilihan badan akreditasi internasional, perlu berbagai pertimbangan dan kriteria agar pemilihan tersebut tepat sasaran. Panduan dari Kemenristekdikti antara lain adalah (i) Badan akreditasi telah menunjukkan pengukuran yang berbasis outcome based education/evaluation, (ii) Badan akreditasi telah menunjukkan perhatian yang besar pada aspek scholarship (kewibawaan dan nilai kesarjanaan), (iii) Badan akreditasi telah mengembangkan standar, syarat dan prosedur terhadap proses pendidikan dan pembelajaran secara komprehensif, (iv) Badan akreditasi telah menunjukkan rekam jejak keterterimaan yang luas oleh badan akreditasi lain (inter-recognition), (v) Badan akreditasi menunjukkan good governance yang ditunjukkan dengan struktur organisasi yang independen dan menghindari conflict of interest, (vi) Badan akreditasi telah menunjukkan kehadiran (presence) dan keterterimaan dalam lingkup global atau minimal regional, (vii) Badan akreditasi telah menunjukkan usia yang matang.

Beberapa badan/lembaga akreditasi Internasional yang telah menjadi rujukan adalah:

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)
- ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering/ Computer Science, the Natural Science and Mathematics)
- JABEE (Japan Accreditation Board for Engineering Education)
- KAAB (Korean Architecture Accrediting Board)
- RSC (Royal Society of Chemistry)
- AACSB (Association to Advance Collegiate of Schools of Business)
- EQUIS/EPAS (European Foundation for Management Development)
- ABEST21 (The Alliance of Business Education and Scholarship for Tomorrow)
- IFT (Institute Food Technology)
- SWST (Society of Wood Science and Technology)
- WFME (The World Federation for Medical Education)

- RTPI (The Royal Town Planning Institute)
- UNWTO-Tedqual (United Nations World Tourism Organization Tedqual)
- IMAREST (Institute of Marine Engineering, Science and Technology)
- AHPGS (Accreditation Agency in Health and Social Sciences)
- APACPH (Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health)
- AUN-QA (ASEAN University Network-Quality Assurance)

Badan Akreditasi Internasional AUN-QA

Jaringan AUN-QA (ASEAN University Network-Quality Assurance) sebenarnya merupakan suatu kelompok Chief Quality Officers (CQAs) yang ditunjuk oleh universitas anggota AUN sebagai focal point untuk mengkoordinasi berbagai kegiatan dalam rangka merealisasi tujuan harmonisasi standar pendidikan dan mengusahakan perbaikan berkelanjutan kualitas akademik universitas-universitas di ASEAN. Kegiatan AUN-QA dilaksanakan oleh QOAs sesuai dengan Persetujuan Bangkok (Bangkok Accord) 2000 (Chula 2018), yang menerbitkan seperangkat pedoman untuk mendukung pengembangan sistem penjaminan mutu sebagai instrumen mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan pengajaran, penelitian dan keseluruhan standar-standar akademik universitas anggota AUN. Sejak kesepakatan Bangkok (2000) AUN-QA secara aktif meningkatkan, mengembangkan dan melaksanakan praktek-praktek penjaminan mutu berdasarkan pendekatan empiris dimana praktek penjaminan mutu telah dibagikan, diuji coba, dievaluasi dan diperbaiki. Jika kita mengamati perjalanan AUN-QA atau AUN-QA timeline (AUN-QA 2016), nampak bahwa lembaga AUN-QA sejak memulai kegiatan pada tahun 1998 hingga 2018 telah melakukan berbagai pertemuan, upaya peningkatan penjaminan mutu bahkan melakukan akreditasi terhadap berbagai universitas di negara anggota ASEAN. Pengembangan dari tahun ke tahun dapat dijadikan bukti dan petunjuk bahwa AUN-QA merupakan lembaga akreditasi internasional yang sudah teruji (credible) dan menjadi lembaga akreditasi yang semakin diakui untuk rekognisi internasional universitas di ASEAN. Kegiatan pengembangan asesmen dan akreditasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3. Kegiatan AUN-QA 1998-2018

TAHUN	PERTEMUAN	PELATIHAN	ASESMEN
1998	AUN-QA initiated by 4th AUN BOT Meeting		
2000	AUN-QA initiated by 4th AUN BOT Meeting		
	Chief Quality Officers (CQOs)		
2004	AUN-QA Guidelines		
2005	Draft AUN-QA Manual		
2006	AUN-QA Manual		
2007	AQA Programme Assessment		The 1st UM, Malaysia
2008	AQA Programme Assessment		2nd DLSU, Phillipines, 3rd UI, Indonesia, 4th ITB, Indonesia
	AUN-QA Guideline, Chinese Edition		
2009		The 1st Training of New AUN-QA Assessors	
	AUN-QA Guideline Vietnamese Edition was approved by BOT		
		IAI-QA Training Manual	
	AQA Programme Assessment		5th UGM, Indonesia, 6th VNU-HN, Viet Nam, 7th VNU-HCM Viet Nam
2010		2nd Training of New AUN-QA Assessors	
	AQA Programme Assessment		8th UI Indonesia, 9th DLSU Philippines, 10th VNU HN, Viet Nam
2011		IAI QA Trainings	NUOL, Laos; RUPP Cambodia, VNU-HCM, Viet Nam
	NUOL, Laos; RUPP Cambodia, VNU-HCM, Viet Nam		
2011	AQA Programme Assessment		11th UGM Indonesia, 12th DLSU Philippines, 13th VNU-HCM Vietnam, 14th UP Philippines
		AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment	
		DAAD ASEAN QA Training Workshop on QA part 1t	

2012	AUN-QA Workshop and CQOs Meeting		
		DAAD ASEAN QA Training Workshop on QA part 2	
		AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment	
	AQA Programme Assessment		14th VNU HN Vietnam, 15th UI Indonesia, 15th UI Indonesia, 16th VNU-HN Viet Nam
		AUN-QA Training Course, Bangkok	
		AUN ADB Project for CLM Countries	
		DAAD ASEAN-QA Training Workshop on QA	
	AQA Programme Assessment		17th IPB Indonesia, 18th VNU-HN Viet Nam, 19th VNU-HCM Viet Nam, 20th UGM Indonesia, 21th UNAIR Indonesia, 22ns DLSU Philippines, 23rd UI Indonesia, 24th VNU-HN Viet Nam
2013		AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment	
		AUN -QA Advance Training Course	
2014	AQA Programme Assessment		25th UP Philippines, 26th CU Thailand, 27th IPB Indonesia, 28 TH-VNU Viet Nam, 29th UGM Indonesia, 30th VCU-HCM Viet Nam, 31st CTU Viet Nam, 32nd UGM Indonesia, 33rd DLSU Philippines, 34th VNU-HCM Viet Nam, 35th UI Indonesia.
		AUN-QA Training 1	
		AUN-QA Training 2	
		AUN-ADB Project for CLM Countries	

2015	AQA Programme Assessment		37th IPB Indonesia, 38th UNDIP Indonesia, 39th ITS Indonesia, 40th UNAIR Indonesia, 41th UUM Malaysia, 42rd UGM Indonesia, 43th UUM Malaysia, 44th UNAIR Indonesia, 45 UB Indonesia, 46th CU Thailand.
		AUN-QA Training 1	
		AUN-QA Training 2	
		ADB Training	
		DAAD ASEAN-QA Training Workshop on IQA	
		AUN-QA CQO's Meeting	
2016-2018	Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level		
	EU SHARE Project		

Sumber: AUN-QA, 2016

Dalam perjalanannya selama hampir 20 tahun, AUN-QA tidak lepas dari jatuh bangun untuk menjadi lembaga akreditasi unggul di kawasan Asia Tenggara. Sumber daya AUN-QA tidak hanya dibangun dari ASEAN, tetapi juga didukung oleh jaringan ASEAN (ASEAN Plus 3). Seperti dinyatakan oleh AUN-QA Chair Person:

“From the establishment of AUN- QA in 1998, the AUN-QA Network has grown leaps and bounds. Consistently re-defining itself to be the leading Quality Assurance in the region, aiming at increasing quality of higher education within the ASEAN region. Our achievements can be reflected in the continual trust and confidence in the AUN-QA network from our AUN Member Universities and our growing number of AUN-QA Associate Members. Sixteen years of experiences culminated from series of AUN-QA Assessments, AUN-QA trainings, and expanding cooperation with regional and international partners has proven how far we have come and the strength of our foundation as the AUN-QA network.

AUN-QA is also officially recognized by not only Senior Officials Meeting on EducaSEAtion (ASED), but also extended to the ASEAN

Plus Three Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED+3) and ASEAN Plus Three Education Ministers meeting (ASED+3). These recognition could not come afar without the support among the AUN-QA Members and the trust that we have received from our university networking. With the growing strength, trust and experience, the AUN-QA Network is ready to take to the next step, the new frontier of the AUN-QA on the development of the AUN-QA Assessment at institutional level.

It is our responsibility to promote quality assurance in higher education institutions, raise the quality of higher education and collaborate with both regional and international bodies for the benefit of the ASEAN community is a great duty which must be efficiently executed by an experienced body. With the 16 years of achievements within our AUN-QA System and Mechanisms, we will remain steadfast to our principles, and continue to promote the Quality Assurance Development in the region and beyond, with a touch of quality”. (AUN-QA 2016)

AUN-QA membangun jaringan dan mendapatkan manfaat dari lembaga-lembaga jaringannya antara lain dengan Universitas Postdam, SEAMO RIHED (*the South-East Asian Ministers of Education Organization Centre specializing in higher education development-Thailand*), DAAD - *Deutscher Akademischer Austauschdienst/German Academic Exchange Programme*, SHARE - *a programme by EU and ASEAN to strengthen regional co-operation and enhance the quality, regional competitiveness and internationalisation of ASEAN higher education institutions and students*), ADB – *Asian Development Bank*, AQAN – *ASEAN Quality Assurance Network*, ENQA-EU – *European Association for Quality Assurance in Higher Education* dan DIES. Keanggotaan AUN-QA tidak terbatas pada universitas negara anggota ASEAN (A membership) namun juga terbuka untuk universitas-universitas non AUN asal memenuhi persyaratan keanggotaan AUN (B membership). Penampilan profil sekilas AUN-QA yang digagas oleh ASEAN telah menunjukkan kredibilitas AUN-QA sebagai lembaga akreditasi regional yang terpercaya dimana universitas-universitas negeri maupun swasta di Indonesia patut melaksanakan akreditasi oleh AUN-QA.

Pengalaman Akreditasi Internasional Universitas di Indonesia: Universitas Indonesia

Sekilas kita ingin mendapatkan gambaran pengalaman akreditasi internasional universitas di Indonesia. Tentu selain adanya kebijakan dari pimpinan dengan sinergi pemerintah, pada umumnya universitas negeri utama mempunyai kapasitas dan modalitas untuk melaksanakan akreditasi internasional.

Akreditasi internasional bukan hanya sebatas kewajiban, tetapi juga merupakan upaya dan komitmen program studi (Prodi) di Universitas Indonesia dalam meningkatkan standar penjaminan mutu akademik serta mendapatkan pengakuan sebagai prodi bertaraf internasional oleh masyarakat di seluruh dunia. Berikut ini beberapa program studi di Universitas Indonesia yang telah mendapatkan akreditasi internasional, yaitu:

- Program Studi S1 Fisika FMIPA UI, meraih predikat *'Better than Adequate'* pada asesmen tingkat prodi AUN-QA (*ASEAN University Network Quality Assurance*);
- Program Studi S1 Biologi FMIPA UI, meraih predikat *'Better than Adequate'* pada asesmen tingkat prodi AUN-QA (*ASEAN University Network Quality Assurance*);
- Program Studi S1 Matematika FMIPA-UI, meraih nilai/hasil akhir "4.5 (empat koma lima)" dari skala "7 (tujuh)" yang berarti *'Documents Available and Evidence That They Are Used'* pada asesmen tingkat prodi AUN-QA (*ASEAN University Network Quality Assurance*);
- Program Studi S1 Kimia FMIPA-UI juga memperoleh asesmen level internasional melalui *Royal Society of Chemistry* (RSC) dengan predikat *'partially accredited'* – artinya dari butir-butir yang dinilai oleh tim RSC, sebagian sudah memenuhi standar RSC, sedangkan sebagian lainnya perlu ditingkatkan;
- Program Magister Manajemen (MM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia mendapat akreditasi internasional oleh *Association of MBAs Accredited* (AMBA), pada bulan Februari 2019.
- Proses untuk mendapatkan akreditasi internasional oleh AMBA berlangsung sekitar 3 tahun. Beberapa poin penting yang dinilai yaitu kontribusi MM FEB UI secara global, banyaknya alumni menempati posisi penting di masyarakat, jaringan alumni cukup baik, keaktifan fakultas dalam beberapa jaringan internasional, serta proses seleksi yang terselenggara secara ketat untuk mendapatkan mahasiswa dengan kualitas baik.

Program Studi Hubungan Internasional UKI Menuju Akreditasi Internasional

Harapan untuk mencapai PT atau PS unggulan secara eksplisit mulai digaungkan dalam kepemimpinan Rektor UKI Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., M.H., MBA masa bakti 2018-2022. Pada tahun pertama diagendakan fase konsolidasi seluruh elemen UKI dan pada tahun kedua mulai fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Dua prodi (Hukum dan Hubungan Internasional) telah diagendakan untuk mempersiapkan diri menuju akreditasi internasional, mengingat 2 prodi tersebut bersama prodi Arsitektur telah mencapai akreditasi A oleh BAN-PT.

Dalam merespons rencana tersebut tentu "kesiapan" program studi menjadi hal yang mendesak untuk diidentifikasi. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melihat "kesiapan" program studi antara lain posisi perguruan tinggi dalam kerangka "klusterisasi" yang diumumkan oleh pemerintah, perubahan instrumen akreditasi BAN-PT (IAPT dan IAPS 4.0), sistem penjaminan mutu internal dengan komitmen dan pengadaan segala kelengkapan oleh PT dan Yayasan untuk mendukung program akreditasi internasional.

Dalam rangka mengejawantahkan pengembangan kualitas SDM seperti yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam lima tahun pemerintah keduanya (2019-2024), mau tidak mau 4680 lembaga pendidikan tinggi di Indonesia harus berbenah menjadi organisasi yang sehat karena menjadi tumpuan utama pengembangan sumber daya manusia Indonesia (Indonesia.go.id 2019). Di tengah keberagaman kualitas PT menjadi sangat mendesak bagi pemerintah untuk menemukan kerangka pengembangan yang sesuai dan mampu meningkatkan mutu secara keseluruhan mengingat situasi PT yang sangat variatif dengan segala perbedaan kualitas, jenis dan ukuran (Priyatma 2019). Pemerintah sudah memulai dengan melakukan klusterisasi dimana PT dalam satu kluster mempunyai kualitas yang mirip yang kemudian seharusnya ditindaklanjuti dengan program pengembangan yang sesuai untuk setiap kluster. Hasil klusterisasi pemerintah memuat lima kluster untuk tahun 2010 PT non-vokasi: 14 PTN di kluster I, 72 PTN dan PTS di kluster II, 299 PT di kluster III dan 1725 PT di kluster IV dan V dengan menggunakan 6 aspek penilaian, indikator setiap aspek dan bobot yang telah ditetapkan (Kemristekdikti, Klusterisasi Perguruan Tinggi Indonesia 2019). Hasil klusterisasi menunjukkan bahwa UKI berada pada peringkat 86 atau masuk dalam kluster 3 (Wartakota 2019).

Meski kondisi PT Indonesia sangat beragam, secara umum menurut Johannes Eka Priyatma, Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, PT

dapat dikelompokkan menjadi tiga (Arifin 2019), yaitu pertama, PT yang mampu berkontribusi mengatasi persoalan pembangunan bangsa. Kedua, PT yang masih berjuang mengatasi persoalan manajemen organisasi dan ketiga PT yang masih berkuat mencukupi kebutuhan dasarnya. Kluster I dapat disejajarkan dengan kelompok pertama, kluster II dan III sejajar dengan kelompok kedua dan kluster IV dan V menjadi kelompok ketiga. Lebih jauh diuraikan oleh Priyatma bahwa PT dalam kelompok pertama paling sesuai dikembangkan menjadi universitas riset (research university), khususnya untuk membantu mengatasi persoalan pembangunan yang kian kompleks. PT kelompok ini sebaiknya fokus pada pengembangan program S2 dan S3 dan tidak perlu menyibukkan diri dengan program diploma. PT di kluster ini lebih baik didorong menjalin kerja sama dengan luar negeri dan diharapkan bisa mempunyai kualitas global sehingga mampu meraih status universitas berkelas dunia. Dukungan pemerintah bisa dalam bentuk kerja sama menyelesaikan masalah pembangunan yang bersifat strategis yaitu pangan, kesehatan, energi, teknologi, pendidikan dan kebudayaan.

Sementara itu PT di kelompok kedua masih perlu meningkatkan produktivitas dan kualitas kegiatan Tridharma agar menjadi PT kluster I dengan kerangka pengembangan yang cocok berupa penerapan manajemen strategis – melalui berbagai hibah kompetitif. Sementara itu akreditasi BAN dapat menjadi sarana efektif meningkatkan kualitas Tridharmanya. Ketiga, PT yang masih harus berjuang mencukupi pendanaan operasionalnya. Jumlah PT ini sangat banyak namun jumlah mahasiswa sangat sedikit. Kerangka pengembangan yang ditawarkan menuntut pendekatan tidak biasa misalnya dengan penggabungan PT dengan insentif merger yang sangat menarik.

Potret Prodi HI UKI sedikit banyak tercermin dalam klusterisasi PT 2019 tersebut di atas. Meskipun melalui akreditasi BAN-PT 2015 telah mendapatkan akreditasi A (skor batas 361) setelah mendapatkan akreditasi B sebanyak dua kali namun akreditasi BAN-PT 2019 telah mengalami perubahan paradigma dengan basis penilaian outcome (luaran) melalui 9 instrumen yang berbeda dari sebelumnya melalui 7 instrumen berbasis input. Dari segi timing akreditasi BAN-PT 2019 kurang berpihak kepada Prodi HI karena merupakan prodi yang harus menempuh instrumen IAPS 4.0 dengan jangka waktu persiapan yang sangat pendek (enam bulan sebelum 6 April 2020 sementara instrument IAPS resmi baru terbit bulan Juli 2019). Hasil dari akreditasi dengan persiapan minimal dimana universitas/fakultas/program studi boleh dikata belum selesai membangun tata kelola dan sistem yang mantap untuk meningkatkan kualitas Tridharma – akan menjadi bagian dari titik tolak persiapan seperti apa yang harus

dilakukan dalam menuju akreditasi internasional. Dengan kata lain, Prodi HI masih harus membenahi manajemen strategis secara sistematis dan terukur sesuai dengan pertama-tama akreditasi instrumen BAN-PT (nasional) dan baru kemudian instrumen badan akreditasi internasional yang dipilih.

Pada tingkat manajemen praktis, Prodi HI belum merasakan layanan dan fasilitasi akreditasi dalam bentuk bimbingan teknis dari lembaga penjaminan mutu tingkat universitas setidaknya dalam 3 hal dengan termin yang jelas yaitu bimbingan teknis, (i) asesmen luaran, (ii) dokumen rekognisi dan (iii) persiapan visitasi. Model bimbingan teknis LAM-PTKes (Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia) dapat menjadi rujukan model kerja bimbingan teknis internal yang sifatnya suportif, berdasarkan kondisi spesifik prodi versus standar luaran yang ditetapkan BAN-PT dan dengan dukungan sistem manajemen universitas yang responsif baik dari segi keuangan maupun kebijakan dan SOP kebutuhan SDM/layanan lain misalnya rekrutmen dosen yang dibutuhkan tepat waktu, tersedianya staf khusus sebagai bagian dari program persiapan sejak tahun pertama sertifikat akreditasi keluar, tersedianya ruang khusus dengan layout dan sarana memadai, penajaman strategi melalui focus group discussion seluruh elemen Prodi dan sebagainya.

Keseluruhan sistem yang belum andal serta manajemen SDM tingkat prodi yang tidak selalu mulus menuju realisasi visi yang padu menjadi bagian dari tantangan internal Prodi HI untuk mempertahankan akreditasi unggulannya. Sementara tantangan eksternal adalah perubahan/ peningkatan instrumen akreditasi nasional yang seharusnya menjadi sesuatu yang selalu harus diantisipasi oleh pimpinan akademik pada tingkat universitas/fakultas dan prodi melalui suatu sistem yang baku dan tertata.

Penutup

Akreditasi bagi PT dan PS merupakan keniscayaan dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas harus ditempatkan pada posisi yang sangat “strategis” dan “prestisius” dengan kelengkapan sarana dan prasarana termasuk SDM yang memadai, website khusus dan tidak bisa hanya menjadi lembaga pelengkap yang dikerjakan secara parsial oleh tenaga paruh waktu (sambilan) yang bahkan terkadang tidak mendalami visi dan misinya dan bekerja secara ad hoc. Kondisi setiap prodi jika dilihat dalam kerangka klusterisasi PT menjadi refleksi dari kondisi PT itu sendiri karena prodi bekerja dalam kerangka PT dan tidak berdiri sendiri. Akreditasi nasional BAN-PT seharusnya tetap menjadi prioritas dan dikerjakan dengan sistem yang

dibangun secara berkelanjutan dengan mengacu pada IAPS 4.0 secara maksimal. Apabila pekerjaan rumah tingkat pertama sudah dikerjakan dan mendapatkan hasil yang mantap, maka secara simultan akreditasi AUN-QA ataupun akreditasi internasional lain dapat mulai dipersiapkan.

Sebagai catatan, banyaknya lembaga akreditasi internasional yang beroperasi saat ini juga perlu mendapatkan perhatian karena mempunyai model, sistem dan mekanisme akreditasi yang beragam. Sebagai gambaran, secara prinsip ada persamaan dan perbedaan antara akreditasi internasional dan penilaian AUN-QA. AUN-QA menggunakan outcomes sebagai rujukan evaluasi, tetapi standar rumusan outcomesnya ditentukan setiap prodi. AUN-QA hanya memberikan kriteria bagaimana seharusnya outcome dirumuskan sebaliknya pada akreditasi internasional rumusan outcomes ditentukan lembaga akreditasi yang umumnya didukung berbagai asosiasi profesi, asosiasi saintifik dan lainnya dimana kemampuan lulusannya dapat distandarkan secara internasional.

Sebelum memutuskan perlunya akreditasi internasional atau sertifikasi AUN-QA, beberapa refleksi Pepen Arifin menarik untuk dipertimbangkan. Apakah prodi memang membutuhkannya? Apakah akreditasi tersebut sejalan dengan visi-misi dan tujuan PT? Apakah prodi perlu pengakuan akan standar outcomenya? Apakah prodi membutuhkan branding untuk menarik minat calon mahasiswa baru? Atau prodi sebenarnya hanya perlu verifikasi bahwa penjaminan mutunya telah berjalan dengan baik. Pilihan-pilihan ini perlu dipertimbangkan dengan matang dan jawabannya terpulang kepada masing-masing PT. Namun satu prinsip dasar yang penting adalah bahwa outcome based education (OBE) adalah keniscayaan dan menjadi *ration d'être* (reason for being) dari prodi – dimana lulusannya harus berguna bagi masyarakat dan untuk itu prodi harus dapat membangun sistem penjaminan mutu yang terstruktur dan terukur. Dengan kata lain, akreditasi internasional bukan sekedar ‘gagah-gagahan’, namun harus dilandasi oleh pemahaman prinsip yang benar bahwa keberadaan prodi harus relevan dan bermanfaat bagi lingkungan masyarakat dimana berada dan untuk itu diperlukan “cermin” untuk berkaca yaitu dalam bentuk berbagai instrumen akreditasi/sertifikasi baik nasional, regional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Laporan

- Kemristekdikti.** Buku Pedoman Program Fasilitas Program Studi menuju Akreditasi/Sertifikasi Internasional. Report, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2019.
- Kemristekdikti.** Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia 2019. Report, Jakarta: Kemristekdikti, 2019.
- , **PDDIKTI.** 2019. <https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt> (accessed Agustus 25, 2019).

Website

- Arifin, Pepen.** Kompas.id. Agustus 22, 2019. <https://kompas.id/baca/opini/2019/08/22/akreditasi-internasional-prodi-2> (accessed September 29, 2019).
- AUN-QA.** **AUN-QA: A Teach of Quality.** 2016. <http://www.aun-qa.org/briefintroduction> (accessed Agustus 27, 2019).
- , **AUN-QA: A Teach of Quality.** 2016. <http://www.aun-qa.org/MessageChairperson> (accessed Agustus 27, 2019).
- Chula, OSM.** **OSM Chula.** 2018. <http://www.osm.chula.ac.th/index.php/m-qaulity/m-qa-learning/67-learning-qa/145-qa-aun-bangkok> (accessed Agustus 27, 2019).
- Indonesia.go.id.** Indonesia.go.id. Juli 22, 2019. <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/fokus-utama-periode-kedua> (accessed Agustus 27, 2019).
- Initu.id.** 2018. <https://initu.id/amp/daftar-kampus-dengan-jurusan-hubungan-internasional-se-indonesia> (accessed 2019).
- Jayani, Dwi Hadya.** databoks. April 29, 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia> (accessed Agustus 25, 2019).
- Priyatma, Johannes Eka.** Kompas.id. Agustus 26, 2019. <https://kompas.id/baca/opini/2019/08/26/gagasan-pengembangan-perguruan-tinggi> (accessed Agustus 28, 2019).
- Putri, Teatrika Handiko.** IDN Times. Mei 02, 2018. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/menristekdikti-pendidikan-tinggi-harus-bisa-menjawab-persoalan-sosial-yang-makin-kompleks-1/full> (accessed Agustus 25, 2019).
- Wartakota.** Wartakota Tribun News. Agustus 16, 2019. <https://wartakota.tribunnews.com/2019/08/16/daftar-lengkap-100-perguruan-tinggi-non-vokasi-terbaik-di-indonesia-tahun-2019-juara-itb?page=4> (accessed September 28, 2019).

ROADMAP MENUJU FISIPOL UNGGUL : GAMBARAN TERKINI, ISU-ISU STRATEGIS DAN UPAYA PENCAPAIANNYA

ANGEL DAMAYANTI

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia,
Jl. Mayjen Sutoyo no.2, Cawang - Jakarta, 13630, Indonesia

Pendahuluan

SEJAK berdirinya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia (Fisipol UKI) telah menghasilkan sedikitnya 800 lulusan yang telah berkontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia serta masyarakat di sekitarnya. Saat ini dengan 24 dosen tetap lulusan dalam dan luar negeri di tiga program studi – Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik, yang juga didukung oleh tujuh orang tenaga kependidikan dan sekitar 600 mahasiswa aktif, Fisipol semakin memantapkan diri untuk berkarya lebih banyak bagi kepentingan masyarakat luas di level domestik, nasional dan internasional. Untuk itu, dengan menerapkan motto UKI, “Melayani bukan dilayani,” Fisipol UKI terus meningkatkan kapasitasnya di sejumlah sasaran strategis untuk menjadi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik unggulan di level nasional, regional dan internasional, terutama Asia Pasifik.

Sebagai bagian dari Universitas Kristen Indonesia, Fisipol UKI berjalan dalam semangat yang sama untuk menjadi unggul dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Saat ini sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Fisipol Tahun 2019-2024, semangat untuk menjadi unggul tersebut dirumuskan ke dalam sembilan isu strategis yaitu implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, tata pamong, tata kelola dan kerja sama, pengembangan mahasiswa, pengembangan SDM, pengelolaan keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta luaran dan capaian Tridharma perguruan tinggi. Isu-isu strategis tersebut kemudian dikembangkan menjadi program kerja (manajemen aktivitas) tahunan

di mana penyusunannya ditentukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan unit-unit yang ada di dalamnya.

Di usianya yang ke-25 tahun pada bulan November 2019 ini, Fisipol UKI telah berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta pengabdian kepada masyarakat sehingga kiprah Fisipol di tengah masyarakat dirasa sangat positif. Begitu pula jalinan kerja sama yang telah dibangun dengan berbagai institusi yang menjadi bagian strategi dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas Fisipol UKI. Meresponi hal tersebut, tulisan ini dibuat untuk menggambarkan perkembangan Fisipol sejak berdirinya hingga berusia 25 tahun dan menjelaskan tentang isu-isu strategis yang telah dan akan dilakukan oleh Fisipol UKI dalam upaya pencapaian target menjadi Fisipol unggul. Untuk itu, tulisan ini akan dibagi menjadi empat bagian, diawali dari pendahuluan, gambaran singkat tentang Fisipol, isu-isu strategis yang akan dilakukan Fisipol serta penutup yang berisi harapan tentang Fisipol ke depannya.

Gambaran Singkat Fisipol

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Kristen Indonesia (UKI) didirikan pada tanggal 26 Oktober 1994 yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendikbud No. 097/9/0/1994, yang kemudian diresmikan pada 9 November 1994. Sebagai langkah awal, Fisipol UKI memandang lebih tepat dan efisien dengan membuka tiga jurusan/ Program Studi, yaitu: Jurusan/Program Studi Ilmu Komunikasi; Jurusan/ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan Jurusan/Program Studi Ilmu Pemerintahan. Namun, ketika proses seleksi para calon mahasiswa baru (maba) dimulai pada awal tahun akademik 1994/1995 ternyata jumlah pendaftar untuk Jurusan/Program Studi Ilmu Pemerintahan hanya empat orang. Maka setelah melalui proses pertimbangan, keempat calon mahasiswa itu pun kemudian dialihkan ke dua jurusan lain yang jumlah pendaftarnya memang jauh lebih banyak. Sejak saat itu, jurusan/ Program Studi Ilmu Pemerintahan pun ditutup.

Seiring waktu, perkembangan yang terjadi di Indonesia memasuki babak era reformasi (1999), yang ditandai dengan dirubahnya sistem sentralistik menjadi sistem demokrasi di tiap kegiatan pemerintahan dan masyarakat, utamanya pada pemerintah daerah (Pemda) diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemda dalam menyelenggarakan pemerintahan menganut sistem otonomi dan demokrasi. Sistem tersebut berpengaruh kepada minat masyarakat untuk mempelajari ilmu politik khususnya otonomi daerah dan demokrasi. Seiring dengan fenomena tersebut, UKI melihatnya sebagai peluang untuk mendirikan Program Studi (Prodi) Ilmu Politik pada Fisipol UKI. Pada tanggal 20 Maret 2015 berdasarkan SK Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27/M/Kp/III/2015,

Fisipol UKI membuka program studi Ilmu Politik.

Pada tahun 2015, Program Studi Hubungan Internasional mendapatkan kenaikan dari akreditasi “B” menjadi akreditasi “A” berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 139/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015. Pada tahun yang sama, Program Studi Ilmu Komunikasi mendapatkan akreditasi “B” berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015. Sedangkan Program Studi Ilmu Politik yang diberikan Ijin Operasional pada tahun 2015 berdasarkan SK Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27/M/Kp/III/2015, telah mendapatkan akreditasi “C” untuk pertama kalinya pada tahun 2017 berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 2961/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017.

Saat ini, Fisipol memiliki visi menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tingkat Asia Pasifik yang berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai kristiani pada tahun 2027. Visi tersebut diupayakan melalui sejumlah misi, yaitu:

- o Menyelenggarakan tata pamong fakultas berdasarkan prinsip-prinsip good faculty governance,
- o Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum,
- o Meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi,
- o Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan,
- o Mengembangkan hubungan kerja sama yang sinergis dengan berbagai lembaga dan instansi terkait.

Upaya mencapai visi dan misi tersebut dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- o Terlaksananya tata pamong fakultas yang transparan, akuntabel, mengedepankan kesetaraan, dan bertanggung jawab,
- o Terciptanya sistem pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- o Menghasilkan lulusan yang berintegritas dan berkompeten di bidangnya,
- o Tersedianya pelayanan administrasi akademik dan umum yang efektif dan efisien,
- o Tercapainya target penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) unggulan,
- o Menghasilkan SDM yang rendah hati, berbagi dan peduli, disiplin, profesional dan bertanggung jawab.

- o Terlaksananya kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan dengan berbagai lembaga gerejawi, pemerintah daerah, serta institusi nasional dan internasional

Di samping itu, semangat untuk mencapai visi, misi dan tujuan FISIPOL untuk dilandasi oleh nilai-nilai Kristiani yang mencakup:

- 1) **Rendah hati** (Humility, Filipi 2:3b)
- 2) **Berbagi dan Peduli** (Sharing and Caring, Ibrani 10:24)
- 3) **Disiplin** (Discipline, Efesus 5:16)
- 4) **Profesional** (Professional, Matius 25:21)
- 5) **Bertanggung Jawab** (Responsibility, Bilangan 4:49)

Saat ini, Fisipol memiliki 24 dosen tetap yang tersebar di tiga program studi – 11 dosen di Hubungan Internasional, 7 dosen di Ilmu Komunikasi dan 6 dosen di Ilmu Politik – dan tiga di antaranya merupakan dosen perjanjian kerja (PK) karena telah memasuki usia pensiun dan masih terikat di instansi pemerintah. Seluruh dosen tetap Fisipol tersebut memiliki kualitas jenjang pendidikan minimal magister, lulusan dari dalam dan luar negeri dan telah sesuai dengan mata kuliah yang diampunya saat ini. Tujuh dosen di antaranya telah memiliki jenjang pendidikan doktor, empat dosen sedang studi lanjut program doctoral, dan sisanya adalah magister.

Jika dilihat dari sebaran usia, gambaran dosen-dosen di Fisipol dapat dikatakan ideal karena telah dilakukan rekrutmen dosen-dosen muda untuk mempersiapkan dosen-dosen yang akan memasuki masa pensiun sekaligus juga untuk meningkatkan rasio jumlah dosen dan mahasiswa yang terus meningkat. Saat ini hanya ada tiga dosen yang berusia di atas 60 tahun, empat dosen berusia 50-60 tahun, enam dosen berusia 40-50 tahun, enam dosen berusia 30-40 tahun, dan sisanya berusia di bawah 30 tahun. Komposisi usia yang beragam ini menjadi kekuatan sekaligus kelemahan bagi Fisipol. Dengan tersebarnya usia dosen di rentang usia yang berbeda, itu menunjukkan proses rekrutmen dan man power planning di Fisipol telah berjalan dengan baik. Namun, di sisi lain, sebaran usia seperti di atas juga membuat sebaran jenjang jabatan akademik di Fisipol belum terlalu ideal karena 75% dosen masih berada dalam jenjang jabatan akademik Asisten Ahli dan Tenaga Pengajar. Itu artinya, fakultas dan prodi-prodi harus terus mendorong dosen-dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan dan terutama Jenjang Jabatan Akademik para dosen untuk dapat menjadi fakultas unggul. Gambaran tentang dosen-dosen di Fisipol dapat dilihat dari tabel 1 di halaman berikutnya (hal.68):

Tabel 1.4 Profil Dosen

No	Keterangan	Jumlah Dosen Tetap yang bertugas pada Program Studi			Total di Fakultas
		HI	IKOM	IPOL	
A Jabatan Fungsional					
1	Tenaga Pengajar	2	1	2	5
2	Asisten Ahli	5	4	4	13
3	Lektor	3	1	0	4
4	Lektor Kepala	1	1	0	2
5	Guru Besar	0	0	0	0
TOTAL		11	7	6	24
B Pendidikan Tinggi					
1	S2	7	6	4	17
2	S3	4	1	2	7
TOTAL		11	7	6	24

Selain tenaga pendidik (dosen), seluruh pelaksanaan kegiatan Fisipol juga didukung oleh tenaga kependidikan. Saat ini untuk melayani kebutuhan 24 dosen tetap, 35 dosen honorer, dan kurang lebih 600 mahasiswa aktif, Fisipol didukung oleh tujuh orang tenaga kependidikan atau staf. Seluruh tenaga kependidikan di Fisipol telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas mereka dan ditunjang oleh jenjang pendidikan yang memadai; satu orang di antaranya memiliki jenjang pendidikan magister, lima orang sarjana, dan satu orang dari vokasi. Di samping itu tenaga kependidikan Fisipol UKI juga telah diperlengkapi dengan tambahan sertifikasi kompetensi kerja seperti leadership dan service excellent, pengelolaan arsip, TOEFL, dan peningkatan kinerja dan jenjang karir. Gambaran tentang tenaga kependidikan Fisipol UKI dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 1.5 Profil Tenaga Kependidikan

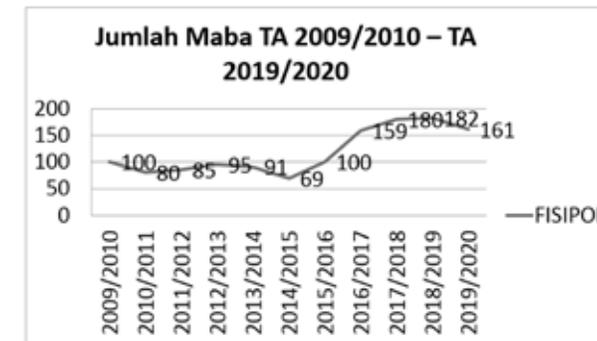
No	NIP	Nama	Umur	Pddk	Status	Jabatan
1	182610	Riandi Sitorus, A.Md	23	D3	PK	Sekretaris Perkuliahan
2	172479	Jasa Adiputra Limbong, S.Pd	25	S1	Tetap	Pengolah Data
3	172447	Berty Octavia Nainggolan, S.Sos	26	S1	Tetap	Staf TU
4	112791	Mudesta Injiliah Dua Theresia P.	28	S2	Tetap	Staf Prodi HI
5	152209	Angki Agmann Sumbayak, S.Sos	29	S1	Tetap	Staf Prodi Ipol & Bag. Kemahasiswaan
6	172429	Ebenezer Ranto Marupa, S.Kom	29	S1	Tetap	Sraf Prodi Ikom & Lab Ikom
7	902333	Rodingse Tampubolon, SE	54	S1	Tetap	Ka. Tata Usaha di Fakultas

Tabel 1.6 Profil Mahasiswa TA 2019/2020

Prodi	Mahasiswa Baru	Mahasiswa Aktif	Mahasiswa Transfer
HI	73	324	8
IKOM	74	221	7
IPOL	14	50	1
FISIPOL	161	595	16

Gambaran tentang jumlah mahasiswa baru di Fisipol dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat dari grafik di bawah ini.

Grafik 2.4 Perkembangan Jumlah Mahasiswa Baru



Secara akademik dan non akademik, mahasiswa Fisipol telah menunjukkan prestasi yang baik. Hal ini bisa dilihat misalnya dari rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan yang telah melampaui target 3,25 dan terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Lulusan TA 2014/2015 memiliki rata-rata IPK 3,32, dan angka ini meningkat menjadi 3,4 pada TA 2015/2016, 3,42 pada TA 2016/2017, 3,22 pada TA 2017/2018. Namun rata-rata IPK itu menurun menjadi 3,2 pada TA 2018/2019. Penurunan ini tentu saja masih perlu dianalisis penyebab serta proses akademik yang berlangsung. Di samping itu, prestasi mahasiswa Fisipol juga tercatat meningkat pada tiga tahun terakhir. Mahasiswa Fisipol semakin aktif dalam mengikuti perlombaan dan kompetisi yang bersifat akademik maupun minat dan bakat.

Sejumlah prestasi akademik yang diraih oleh mahasiswa Fisipol di antaranya, menjadi Juara 1 dalam Lomba Debat “*To Build An Open Minded Generation*,” di Universitas Jayabaya pada 13-16 Maret 2017, Juara 3 Lomba Debat Nasional “*Facing Economy Development for Millennial Generation*” di Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, 29-30 Juni 2018, Juara

2 Diskusi Ilmiah Chamber Sosial Budaya dalam acara PSMNHII XXX (Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia ke - 30) di Universitas Lampung 2 - 6 Mei 2018 dan Juara 3 Diskusi Ilmiah, Sub Tema Industri dalam acara PNMHII ke - 30 di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, pada tanggal 11-15 November 2018.

Sedangkan untuk prestasi minat dan bakat mahasiswa Fisipol, di antaranya adalah Juara 1 FKMHII Korwil II Championship 2015 "*More Than Just A Goal*" 7 -15 Oktober Universitas Jayabaya, Jakarta, Finalis Duta Muda ASEAN Agustus 2017, Juara Umum, Juara 1 Futsal dan Juara 2 Basket dalam OLIMPIADE FKMHII Korwil II 18 - 20 2017 Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Juara 2 Liga FISIP UI 7 Oktober 2017, Juara 1 Karateka dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (POMPROV) DKI Jakarta ke VII 26-27 Oktober 2018, Juara 1 Karate Putri - Piala Walikota Tebing Tinggi, Juara Favorit dan Juara 2 Video Competition #*Battle the Stigma* (*Youth Collaboration Towards Action* (YCTA) 2019 dengan tema "*YOUTH MENTAL HEALTH : Battle the Stigma*". Tentu saja prestasi-prestasi tersebut masih akan dan dapat terus ditingkatkan dengan dukungan dan pembinaan yang maksimal dari seluruh civitas akademika FISIPOL UKI.

Isu-isu Strategis dan Upaya Pencapaian

Untuk mencapai visi dan misinya, Fisipol UKI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2024 yang memuat roadmap sebagai arahan bagi seluruh civitas akademika Fisipol UKI. Dalam Renstra tersebut, dirumuskan 9 (sembilan) isu strategis yang akan dilaksanakan oleh Fisipol UKI dalam lima tahun ke depan, yaitu: (1) implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, (2) tata pamong, tata kelola dan kerja sama, (3) pengembangan mahasiswa, (4) pengembangan SDM, (5) keuangan, sarana dan prasarana, (6) pendidikan, (7) penelitian, (8) pengabdian kepada masyarakat serta (9) luaran dan capaian tridharma perguruan tinggi. Sembilan isu strategis tersebut disusun dengan menggunakan panduan dari pemerintah terkait dengan Lembar Kinerja Program Studi (LKPS) dan Lembar Evaluasi Diri (LED), format borang untuk akreditasi yang baru. Isu-isu strategis tersebut kemudian dikembangkan ke dalam beberapa program kerja (manajemen aktivitas) yang disusun setiap tahun, di mana penyusunannya ditentukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan unit-unit yang ada di dalamnya.

Upaya pencapaian kesembilan isu strategis yang ditetapkan oleh Fisipol tersebut diturunkan ke dalam sejumlah indikator seperti:

1. Implementasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

- a. Tersedia Rencana Strategis yang berisi pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek,

- b. Tersedia target yang berorientasi pada daya saing internasional,
- c. Tersedia bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten,
- d. Tersedia kebijakan dan implementasi nilai-nilai Kristiani dan Pancasila

2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

- a. Tersedia dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi resiko,
- b. Tersedia dokumen formal struktur organisasi dan uraian kerja beserta tugas dan fungsinya,
- c. Tersedia bukti yang sah terkait praktik perwujudan *good faculty governance*,
- d. Tersedia dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas,
- e. Tersedia bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi,
- f. Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan serta bukti pelaksanaan pendidikan,
- g. Perolehan akreditasi eksternal oleh lembaga akreditasi Nasional & Internasional,
- h. Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dengan institusi perguruan tinggi, gereja, kementerian dll.

3. Pengembangan Mahasiswa

- a. Peningkatan jumlah mahasiswa baru 10% setiap tahunnya,
- b. Tersedia layanan dan peningkatan mutu layanan kemahasiswaan,
- c. Pembinaan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam berbagai kompetisi akademik dan non akademik di tingkat nasional dan internasional,
- d. Peningkatan kompetensi mahasiswa melalui berbagai kegiatan unit-unit kemahasiswaan di tingkat Prodi, fakultas dan universitas,
- e. Pelaksanaan berbagai kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan soft skill mahasiswa. seperti *leadership, career camp* dan *communication skills*.

4. Pengembangan SDM

- a. Ratio dosen : mahasiswa = 1:25,
- b. Peningkatan kompetensi SDM,
- c. Peningkatan persentase dosen tetap S3,
- d. Peningkatan persentase dosen tetap tersertifikasi,

- e. Peningkatan persentase dosen tetap memiliki Jenjang Jabatan Akademik,
- f. Peningkatan persentase penelitian dan PKM dosen yang melibatkan juga mahasiswa,
- g. Rekognisi Dosen/Penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional & internasional,
- h. Tenaga Kependidikan yang kompeten dan bersertifikasi keahlian/profesi,
- i. Pelaksanaan kegiatan penunjang produktivitas Dosen,

5. Keuangan, Sarana dan Prasarana

- a. Meningkatkan upaya perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan beasiswa,
- b. Tersedia peralatan dan kebutuhan perkuliahan,
- c. Terpeliharanya gedung & sarana kantor dan perkuliahan,
- d. Tersedia sistem TIK,
- e. Tersedia sarana dan prasarana perpustakaan, literatur mutakhir, buku buku, jurnal, buku elektronik, repositori dan lain-lain,

6. Pendidikan

- a. Tersedia kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders,
- b. Tersedia peralatan dan kebutuhan perkuliahan,
- c. Tersedia pedoman pengembangan kurikulum,
- d. Tersedia pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemitakhirannya,
- e. Tersedia pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman,
- f. Tersedia bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran,
- g. Tersedia dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran,
- h. Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran,
- i. Tersedia dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik,

- j. Tersedia bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif,
- k. Tersedia bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.

7. Penelitian

- a. Tersedia dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja,
- b. Tersedia pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya,
- c. Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian,
- d. Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset,
- e. Peningkatan jumlah penelitian,
- f. Penunjang Produktivitas Dosen,

8. Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Tersedia dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja,
- b. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM,
- c. Dokumen pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana,
- d. Peningkatan Jumlah PkM,

9. Luaran dan Capaian Tridharma

- a. Rata-rata IPK lulusan min. 3.25,
- b. Meningkatkan jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional Dokumen pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana,
- c. Jumlah prestasi non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional,
- d. Rata-rata lama studi mahasiswa 4 tahun,
- e. Meningkatkan jumlah publikasi dosen tetap di jurnal, prosiding, buku, book chapter, media cetak/media massa,
- f. Meningkatkan jumlah artikel/karya ilmiah dosen tetap yang disitasi,
- g. Meningkatkan jumlah HAKI dosen tetap,
- h. Meningkatkan jumlah publikasi mahasiswa di jurnal, prosiding, buku, book chapter, media cetak/media massa.

Penutup

Dari gambaran terkini tentang kondisi Fisipol, dapat dikatakan bahwa Fisipol sudah menjadi semakin baik sejak pendiriannya dan telah mencapai sejumlah besar target dan sasaran yang ditetapkan, seperti terlihat dari profil dosen, kinerja tenaga kependidikan dan prestasi mahasiswa. Semua itu tentu saja bukan hasil karya satu atau dua orang, melainkan kerja keras bersama dalam mewujudkan cita-cita dan mimpi seluruh sivitas akademika Fisipol UKI. Untuk itu, seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, para alumni, orang tua mahasiswa dan seluruh stakeholders termasuk pihak Rektorat, Yayasan UKI, para pengguna lulusan, mitra Fisipol UKI diharapkan dapat terus bergandengan tangan mendukung kemajuan Fisipol UKI. Dengan menjaga semangat yang ada sambil tetap meningkatkan upaya-upaya perbaikan, tampaknya setelah berusia 25 tahun, tagline *“Fisipol will survive”* perlu dirubah menjadi *“Fisipol more than a champion.”* Selamat ulang tahun Fisipol UKI, teruskan berkarya untuk kemuliaan TUHAN dan melayani sesama

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Instansi

Paparan Rapat Kerja FISIPOL UKI Tahun 2019
Rencana Strategis FISIPOL UKI Tahun 2014-2019
Rencana Strategis FISIPOL UKI Tahun 2019-2024
Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Tahun 2019-2024

PERAN ALUMNI MEMBAWA UKI MENJADI UNIVERSITAS UNGGULAN

¹DANDY SENDAYU NORON, S.SOS. DAN ²EKA HERLAMBANG, S.IP.

^{1,2}Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 1994 (Pertama),
Universitas Kristen Indonesia, Jl. Mayjen Sutoyo No.2, Cawang - Jakarta, 13630,
Indonesia

Pendahuluan

MENGHADAPI tantangan ke depan, sepertinya UKI sebagai bagian dari komunitas pencetak para pembangun bangsa mesti kembali berbenah diri (secara internal dan eksternal). Kata kuncinya adalah memposisikan UKI sebagai universitas unggulan dalam segala aspek seperti pendidikan, penelitian, serta pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Ketika artikel ini ditulis, UKI sedang menyelesaikan Rencana Strategis Tahun 2019-2024. Rencana strategis itu intinya mengkolaborasikan organisasi yang sudah ada untuk dapat mengejar target yang ditetapkan bersama. Langkah awalnya adalah UKI menetapkan visi dan misi yang akan memayungi target-target besar yang ingin dicapai dalam satuan waktu tertentu.

Visi UKI adalah “Menjadi Universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.”

Sedangkan Misi UKI adalah:

- a. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di pasar global;
- b. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan institusi nasional/ internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

Dari misi yang dicanangkan ini, jelas bahwa UKI mengemban tugas mewujudkan lulusan yang berintegritas dan berkompeten di bidangnya, bahkan dengan tambahan kata “mampu bersaing” di pasar global. Dari sini, kami kembangkan paparan ini untuk memastikan bahwa tulisan ini bisa mengarahkan peran alumni sangatlah penting karena alumni adalah lulusan perguruan tinggi yang sudah paham dan mengerti dengan dunia kerja di lapangan dan dengan segala tantangan yang harus disikapi dengan disiplin ilmu yang sudah diraih, dalam hal ini kampus tercinta, UKI.

Syarat Ideal

Dalam Renstra UKI 2019-2024, salah satu sasaran strategis yang ditetapkan adalah luaran dan capaian Tridarma. Bentuk luaran tridarma yang terkait dengan lulusan adalah Luaran Pendidikan. Dalam buku Renstra UKI 2019-2024, penitikberatan poin luaran pendidikan diawali dengan posisi eksisting luaran pendidikan UKI. Renstra UKI mencatat bahwa baseline UKI yang berpijak pada evaluasi Renstra sebelumnya, dengan detil mengurai baseline 2019. Ada 13 Luaran Pendidikan sebagai baseline dalam Renstra 2019. Diantaranya terdapat sembilan baseline yang menurut hemat penulis terkait dengan alumni adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata IPK mahasiswa Diploma dan Sarjana $\geq 3,25$; Profesi, Magister $\geq 3,5$
2. Rata-rata lama studi mahasiswa program diploma 2,95 tahun.
3. Rata-rata lama studi mahasiswa program sarjana/sarjana terapan 3,57 tahun.
4. Rata-rata lama studi mahasiswa program magister/spesialis adalah 2,91 tahun.
5. Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama adalah tiga bulan.
6. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi 85%.
7. Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional adalah 20%
8. Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin adalah 30%.
9. Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin dan lain-lain adalah 50%.

Semua indikator ini ditetapkan dengan memperhitungkan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) terbaru, APT 3.0. Artinya, jika UKI mampu mengelola dengan baik keseluruhan manajemen perguruan tinggi, maka menjadi universitas unggulan yang ditandai penilaian Akreditasi Unggul sudah tepat.

Semua indikator ini menjadi paduan yang sangat membantu UKI melakukan tata kelola dengan baik dengan titik awal (start) yang terukur. Parameter inilah yang kedepannya akan menjadi acuan UKI mau diarahkan kemana dan tahapan target apa yang akan UKI capai kedepannya. Kondisi ini akan menentukan performa UKI dapat dikatakan sebagai Universitas unggulan. Dengan rincian indikator yang sudah ditetapkan dan sesuai Renstra UKI 2019-2024 yang diimplementasi dan dipenuhi secara keseluruhan sesuai target pertahun, maka UKI sebagai universitas unggulan dapat terwujud dan pada tahun 2034 menjadi univertistas unggulan ditingkat Asia. Keyakinan ini bukan hal mustahil dicapai, bahkan lebih cepat terwujud.

Peran Alumni

Alumni berperan dalam memajukan kualitas suatu institusi pendidikan formal, dimana peran ini seringkali terlupakan. Alumni merupakan aset penting yang cukup menentukan. Alumni harus dirangkul dan dikembangkan pelibatannya sedini dan sebanyak mungkin. Semua mahasiswa yang sukses menjalani masa pendidikan di perguruan tinggi pada akhirnya akan menjadi alumni. Dengan kata lain, salah satu indikator keberhasilan proses pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan alumni dalam menjalankan peran mereka di jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun berbagai bidang pekerjaan yang mereka jalani secara profesional sesuai minat dan kemampuan. Tulisan ini mencoba untuk melihat berbagai alasan penting terkait peranan alumni terhadap perguruan tinggi sebagai tempat menuntut ilmu.

Dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang produktif di perguruan tinggi, alumni dapat berperan sebagai katalis dengan memberikan berbagai masukan kritis dan membangun kepada almamater mereka. Dalam hal ini, alumni memiliki posisi tawar yang unik dan strategis karena meskipun mereka tidak lagi merupakan bagian aktif dalam proses pendidikan di kampus. Namun, pengalaman mereka selama menjadi mahasiswa dan ikatan batin serta rasa memiliki yang kuat terhadap almamater dapat menghasilkan dan menawarkan berbagai konsep, ide, pemikiran, masukan dan kritik membangun yang bisa diberikan oleh orang-orang yang berada di posisi mereka. Melalui berbagai media komunikasi yang dapat menjembatani perguruan tinggi dan alumni, proses pendidikan diharapkan dapat berkembang dalam koridor yang lebih progresif dan terarah.

Sesuai peran alaminya, alumni yang berprestasi dan memiliki kompetensi yang mumpuni dapat memainkan fungsi penting dalam membangun opini publik untuk menarik minat calon siswa baru. Disadari

atau tidak, alumni merupakan salah satu acuan utama yang mendasari keputusan para orangtua dan calon siswa dalam menentukan pilihan universitas. Logikanya, jika alumni dari suatu institusi pendidikan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam memasuki jenjang pendidikan tinggi favorit dan dapat menunjukkan prestasi dan kontribusi mereka secara riil di masyarakat, maka secara kualitas dan kuantitas para calon mahasiswa/i yang berminat untuk mendaftar akan meningkat. Mata rantai ini dengan didukung oleh sistem pendidikan internal universitas yang baik akan menghasilkan kesinambungan kualitas sumber daya mahasiswa/i dan alumni yang berkualitas, memiliki daya juang tinggi dan semangat berkompetisi secara sehat.

Alumni sebagai produk utama dari “pabrik” pendidikan bertajuk universitas, juga diharapkan mampu mengembangkan jaringan dan membangun pencitraan institusi di luar. Pengembangan jaringan oleh alumni merupakan potensi strategis untuk membuka berbagai peluang dan meningkatkan daya saing suatu almamater pendidikan karena manfaatnya yang akan berdampak secara langsung pada mahasiswa/i dan sesama alumni. Penciptaan peluang usaha, kerja dan magang, kesempatan beasiswa, serta sirkulasi berbagai macam informasi penting seputar dunia pendidikan dan kerja merupakan beberapa contoh riil yang dapat dikonstruksikan oleh alumni melalui jaringan yang dimiliki. Dalam hal ini, salah satu wadah yang perlu ditumbuhkembangkan, yakni peran dan fungsi, serta didukung keberadaannya oleh pihak universitas adalah ikatan alumni. Melalui pengorganisasian alumni secara profesional, berbagai macam peluang dan kesempatan akan dapat terkomunikasikan dengan baik.

Keberadaan alumni yang tersebar di berbagai bidang usaha, lapangan pekerjaan dan institusi pendidikan dapat memberikan gambaran dan inspirasi kepada para mahasiswa/i, sehingga pada gilirannya dapat memotivasi mereka dalam menentukan prioritas dan cita-cita ke depan. Salah satu contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan acara semacam “Studium Generale” atau workshop yang sifatnya praktis terkait dengan bidang ilmu yang saat ini dikuasainya. Dalam kegiatan ini, para alumni, di bawah koordinasi angkatan yang baru lulus, kembali ke almamaternya secara rutin setiap tahunnya untuk mengadakan presentasi, tatap muka, diskusi dan membuka stand konsultasi yang akan menjelaskan mengenai lingkup kerja mereka beserta tantangan yang dihadapi agar dapat memberikan gambaran mengenai dinamika dunia kerja.

Alumni mungkin hanya merupakan salah satu elemen dari sekian banyak faktor penting yang berperan dalam meningkatkan kualitas dan kinerja suatu institusi pendidikan. Namun, melihat potensi strategis dan luar biasa yang bisa digali dari keberadaan alumni, sudah saatnya

pihak perguruan tinggi mulai merangkul kembali para alumninya dalam menyiapkan mahasiswa dengan persiapan yang matang untuk dapat menjadi alumni yang memiliki dedikasi dan semangat yang tinggi untuk membesarkan alamaternya. Kerjasama dan sinergi yang harmonis antara alumni dengan perguruan tinggi, mahasiswa, dan orangtua mahasiswa akan memiliki dampak yang besar bagi pengembangan perguruan tinggi secara berkesinambungan di masa mendatang.

Alumni merupakan gambaran luaran dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas pula, demikian sebaliknya. Namun, apabila perguruan tinggi itu hanya mementingkan kuantitas, maka bisa dipastikan persentase kualitas dinomor-sekiankan, maka produk tidak sesuai yang diharapkan. Karenanya, urgensi alumni sangat diperlukan, sebagai miniatur sebuah pabrik lembaga pendidikan tinggi akan menghasilkan produk berupa alumni yang terhimpun dalam wadah bernama Ikatan Alumni.

Ikatan Alumni penting bagi lembaga perguruan tinggi, namun sangat disayangkan tidak sedikit perguruan tinggi yang menyadarinya, kecuali terpaksa dengan adanya aturan yang terkait akreditasi barulah bergegas untuk memperhatikan hal itu, walau sementara waktu aji mumpung hanya kepentingan sesaat, semoga selanjutnya berbasis kepeahaman akan pentingnya sinergitas peran para alumni.

Perguruan tinggi yang memahami urgensi alumni akan punya care terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset terbesar dibandingkan money, maka akan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh seraya menjalin hubungan yang harmonis. Setidaknya, menyediakan fasilitas satu ruangan untuk sekretariat sebagai tempat berkumpulnya para alumni yang memiliki ikatan emosional dengan almamaternya agar dapat berinteraksi sosial dan dapat bekerja sama yang konstruktif di masa depan, tentu akan memberi value manfaatnya yang lebih besar.

Kita bisa melihat betapa alumni, kini sudah memiliki posisi strategis di pemerintahan, perusahaan, lembaga, organisasi, dan di tengah-tengah masyarakat, karenanya alumni mempunyai peran yang strategis. Peran strategis alumni perguruan tinggi, antara lain sebagai katalisator, kontributor, dan iron stock.

Peran alumni sebagai katalisator yang mempunyai hubungan emosional yang kuat di masyarakat sangat berarti bagi perguruan tinggi, antara lain (Widyanto 2010):

1. Alumni dan Almamater

Perguruan tinggi sebagai almamater yang mempunyai mahasiswa alumni. Sinergitas keduanya dapat bersimbiosis mutualis karena memiliki hubungan yang sangat kuat bisa saling menguntungkan dan saling mendapatkan manfaat kebaikan.

2. Alumni dan Calon Mahasiswa

Perguruan tinggi setiap tahun memerlukan mahasiswa baru. Alumni secara tidak langsung bisa berperan sebagai sales promotion, maka almamater mendapat manfaat melalui free chase promotion yang dilakukan oleh alumni untuk mengajak calon mahasiswa masuk kuliah di kampus almamaternya.

3. Alumni dan Masyarakat

Perguruan tinggi yang baik merupakan dambaan masyarakat menjadi pilihan untuk memasukan anaknya kuliah di kampus tersebut dengan harapan agar mempunyai kompetensi teoritis dan praktis yang memadai kualitasnya. Alumni menjadi titik fokus yang strategis oleh masyarakat karena dilihat dan berinteraksi langsung dengan lingkungannya di tengah masyarakat.

4. Alumni dan lembaga lainnya

Perguruan tinggi mempunyai alumni yang aktif berbagai bidang life skill, soft and hard skill sebagai legislator, yudikator, eksekutor, edukator, pengusaha, depelover, kontraktor, organisator, dan sebagainya pada instansi pemerintahan, perusahaan, lembaga, dan lain-lain. Alumni yang berada dalam posisi itu sangat strategis dan urgen untuk pengembangan almamater di masa-masa depan, maka lembaga almamater dapat bekerja sama dengan alumni melalui berbagai potensi yang ada, baik dari sisi material maupun immaterial.

5. Alumni dan Alumni lainnya.

Peran perguruan tinggi terhadap para alumni sangat penting, diantaranya memfasilitasi para alumni untuk bertemu. Dalam pertemuan ini para alumni terjadi interaksi yang kondusif. Misalnya, ada alumni yang sudah sukses dapat membantu alumni yang belum sukses. Tentu membantu bukan berarti memanjakan untuk bermalasma usaha, tetapi ada upaya alumni yang telah sukses akan memberi jalan, membuka peluang, dan membantu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan kebutuhan yang ada, sehingga interaksi para alumni tersebut mempunyai manfaat untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Kekeluargaan harmonis terjalin antar alumni yunior dan senior menjadi kontribusi positif yang membawa manfaat kesuksesan dalam meraih cita-cita.

Peran alumni sebagai kontributor, yaitu kontribusi materi dan immateri untuk almamater, antara lain:

1. Kontribusi materi

Kontribusi berupa fisik yang dapat dimanfaatkan oleh almamater, seperti donasi fresh money, bangunan gedung, komputer, printer, LCD, mobil, motor, dan sebagainya. Tentu ini tanpa paksaan atau

“keterpaksaan yang sistemik” dari almamater, tetapi kontribusi tersebut penuh keikhlasan dan kesadaran yang terbangun dari dalam diri alumni bagi yang mampu bukan berarti menghalangi yang belum mempunyai lapang. Namun, yang ternilai bukan besar kecilnya kontribusi, tetapi semangat untuk berbagi alumni sangat penting untuk kebaikan yang terus mengalir nantinya menjadi amal jariyah.

2. Kontribusi immateri

Kontribusi berupa pemikiran yang dapat bermanfaat untuk pengembangan almamater, seperti sumbangih pemikiran berupa saran dan kritik konstruktif; kegiatan-kegiatan berupa pelatihan, workshop, seminar, bedah buku, dialog, sarasehan, diskusi, dan kajian ilmiah; serta silaturahmi bisa melalui anjongsana ke rumah rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur, wakil direktur, dosen, staf, dan civitas akademika, temu kangen, menjenguk orang sakit, membantu yang tertimpa musibah, menghadiri acara pernikahan, syukuran, dan sebagainya.

Peran alumni sebagai iron stock, yaitu almamater memerlukan SDM untuk regenerasi, maka alumni dapat direkrut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh almamaternya, maka sudah dimudahkan dalam penyeleksiaan karena telah mengetahui akseptabilitas, kapasitas, kapabilitas, dan kualitas alumni sesuai yang diperlukan, bahkan untuk bisa ditingkatkan dan bermanfaat bagi almamater (Widiarto 2017).

Sinergitas peran strategis alumni dan almamater di atas akan membawa nilai-nilai kebaikan selama input-nya bersumber dari yang baik, prosesnya selalu berada di jalan yang baik, output-nya akan melahirkan sesuatu yang baik, outcome-nya tentu memberikan hal-hal yang baik, dan keuntungannya pasti menghasilkan yang baik untuk diri, keluarga, dan masyarakat.

Penutup

Dari uraian di atas, jelas peran penting alumni bagi almamaternya. Demikian juga dengan UKI, para alumni perlu senantiasa dijalin komunikasi. Dengan visi, misi dan target di atas, maka alumni UKI hendaknya berada di sekitar kampus – diajak mendekat dan mengambil peran. Dengan sinergi antara alumni dengan perguruan tinggi, maka target UKI untuk menggapai visi dan tahapan target pertahun dapat dengan lebih mudah dicapai. Di sisi lain, alumni dengan kesadaran penuh kembali ke kampus, bahkan dengan rendah hati namun penuh antusias dan tulus memberi kontribusi nyata kepada almamaternya.

DAFTAR PUSTAKA

Website

Widiarto, Sri. Kompasiana. 27 Februari 2017. <https://www.kompasiana.com/tamam31/58b4f7bb779373ed04474813/sinergitas-peran-alumni?page=all> (diakses Agustus 25, 2019).

Widyanto, Hanif A. Kompasiana. 25 Januari 2010. <https://www.kompasiana.com/ikastara/54ff145aa33311074250f90a/peran-strategis-alumni-bagi-pengembangan-sekolah> (diakses Agustus 25, 2019).

HARAPAN UNTUK 25 TAHUN PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

MITA YESYCA

Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia,
Jl. Mayjen Sutoyo no.2, Cawang - Jakarta, 13630, Indonesia

PROGRAM Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia (Prodi HI Fisipol UKI) telah genap berusia 25 tahun. Satu periode yang cukup matang untuk berefleksi sejenak sebelum melanjutkan perjalanan dengan penuh harapan. Untuk itu, tulisan ini akan terbagi ke dalam lima bahasan singkat.

Mimpi yang Menggerakkan

Sebagai bagian dari generasi muda di UKI, saya belum banyak tahu seluk-beluk perjalanan UKI hingga sekarang. Saya sendiri baru menjadi bagian dari UKI tahun 2015. Walau tidak bertumbuh di UKI sedari mahasiswa, namun semangat dan kerinduan agar masyarakat Kristen Indonesia turut berpartisipasi dalam dunia pendidikan juga sama saya rasakan setiap membaca atau mendengar sejarah berdirinya Universitas Kristen Indonesia.

Setelah kemerdekaan, melalui Dewan Gereja Indonesia (DGI), sejumlah pemuka Kristen di negeri ini memperhatikan masalah pendidikan dan kebutuhan mendesak akan Sumber Daya Manusia yang ada (“Sejarah Universitas”). Pemikiran-pemikiran tentang kontribusi umat Kristen di Indonesia melalui pendidikan tersebut kemudian membuahkan ide untuk mendirikan sebuah universitas. Studi kelayakan untuk pendirian universitas pun dilakukan dan ditindaklanjuti oleh sebuah resolusi yang dikeluarkan DGI tentang Universiteit Kristen pada 30 Juni 1953. Oleh karena kemurahan Tuhan, mimpi akan kontribusi orang Kristen dalam mengisi

kemerdekaan lewat hadirnya pendidikan yang mencukupi kebutuhan Sumber Daya Manusia Indonesia itu boleh terwujud. Universitas Kristen Indonesia berdiri di tahun yang sama. Fakultas Sastra dan Filsafat, dengan sub fakultas: Pedagogik dan Sastra—kini telah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta Fakultas Sastra yang terpisah—dan Fakultas Ekonomi merupakan dua fakultas pertama yang dimiliki UKI.

Enam puluh enam tahun setelah UKI berdiri, kondisi Indonesia hari ini telah banyak berubah. Data sensus dan banyak data lain telah menunjukkan bahwa tren peningkatan jumlah penduduk usia produktif Indonesia akan segera membawa Indonesia memasuki fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia nonproduktif (Oey-Gardiner dan Gardiner 2013, 488). Ada peluang di sana, yang hanya akan terengkuh ketika generasi muda Indonesia, para mahasiswanya, mendapatkan pendidikan yang layak dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri agar dapat berderap bersama dengan optimisme memasuki era akselerasi global (Friedman 2016). Selain itu, rencana perpindahan ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur dan pengembangan Jakarta sebagai pusat bisnis bertaraf internasional dalam beberapa tahun ke depan pastilah akan membawa perubahan-perubahan lainnya.

Seiring Indonesia yang bertumbuh, UKI juga bertumbuh. Sudah ada banyak perbedaan dalam institusi UKI yang dihasilkan dari pertumbuhan tersebut. Akan tetapi, saya yakin ada satu hal yang tetap sama sejak dulu, karena itulah yang saya rasakan selama menjadi bagian dari keluarga besar UKI: mimpinya. Mimpi DGI. Mimpi para pendiri UKI. Mimpi orang-orang yang bergabung kemudian dan ikut serta bertumbuh bersama UKI. Mimpi kita semua. Mimpi itulah yang telah melahirkan dan terus menggerakkan UKI untuk berjalan dan terus bertumbuh hingga kini. Dari yang semula hanya ada dua fakultas; hari ini mimpi tersebut telah melahirkan delapan fakultas dan program pascasarjana yang memiliki beberapa program studi jenjang magister (S2) dan doktor (S3). Kita belum tahu akan ada berapa jumlah program studi dan fakultas-fakultas yang ada di UKI pada seperempat abad mendatang. Yang kita tahu, mimpi akan kontribusi umat Kristen melalui pendidikan yang dapat mencukupi kebutuhan Sumber Daya Manusia di Indonesia itulah yang tidak lekang oleh waktu dan terus menggerakkan UKI. Seorang saudari mengatakan bahwa mimpi adalah energi, untuk bangun dan beranjak dari tempat tidur kita, setiap hari (Sylvia 2019). Persis seperti itulah, saya pikir, mimpi yang tertanam sejak 1953 itu mendorong UKI untuk terus-menerus memperbaharui diri.

Prodi HI di Masa Kini

Sebagai sebuah bidang kajian, Hubungan Internasional juga bertumbuh. Jika dahulu bermula dari studi-studi tentang hubungan antarnegara (Ringmar 2017, 8); maka dalam dunia yang saling terhubung dan kompleks karena kemajuan teknologi hari ini, fokus studi-studi awal tersebut menjadi bergeser (Vale 2017, 207). Hubungan Internasional kini mencakup studi-studi interdisiplin terhadap berbagai isu yang melintasi batas-batas nasional dan dengan perspektif yang berorientasi global. Sebagai sebuah praktik, aktor-aktor pelaku hubungan internasional pun telah menjadi lebih beragam: negara, perusahaan multinasional, individu, lembaga swadaya masyarakat internasional, organisasi internasional, kelompok kejahatan transnasional dan kini kita mengenal unicorn, yakni perusahaan rintisan yang bernilai di atas 1 miliar dolar AS (Lee 2013).

Bagi Prodi HI Fisipol UKI, mimpi untuk memenuhi kebutuhan akan individu-individu profesional di Indonesia yang—secara spesifik—terampil/cakap dalam Hubungan Internasional (sebagai kajian dan juga praktiknya) lewat pendidikan tinggi adalah motor penggerak perjalanan 25 tahunnya ini. Selama 25 tahun sejak 1994, Prodi HI terus menghasilkan alumni setiap tahun. Jika mimpi yang menggerakkannya adalah berkontribusi melalui pendidikan untuk memenuhi kebutuhan SDM di Indonesia, maka pertanyaan yang harus dijawab untuk memastikan arah perjalanan—dan bahkan eksistensi—Prodi HI ke depan adalah: Apakah kebutuhan akan profesional HI tersebut kini telah tercukupi?

Saya kira jawabannya belum. Bahkan kebutuhan ini terus berkembang dengan semakin terhubungnya manusia akibat kemajuan teknologi; dan itu berarti semakin banyak isu lintas batas nasional yang muncul, pula praktik-praktik hubungan internasional yang semakin canggih memanfaatkan teknologi terkini. Kajian terkait serta praktik diplomasi digital adalah contoh konkritnya. Kita dapat menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana praktik-praktik hubungan internasional dan studi-studi atasnya selama ini berkembang dengan sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman.

Sebagai sebuah program studi yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Prodi HI juga sudah terus berbenah agar sesuai dengan peraturan dan arah kebijakan dari pemerintah. Yang terbaru, pemerintah mengharapkan peran pendidikan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Peran yang optimal tersebut didorong melalui pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi yang berkesinambungan (pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) oleh sivitas akademika dan diatur melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2012. Tak hanya itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 yang mewajibkan perguruan tinggi melakukan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem penjaminan mutu ini dilakukan secara internal, otonom oleh perguruan tinggi, dan eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) ataupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Yang terakhir itu memang belum familiar; hingga saat ini penjaminan mutu eksternal program-program studi di Indonesia, termasuk Prodi HI UKI, masih dilakukan oleh BAN-PT melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO). Prodi HI selama empat tahun terakhir telah rutin melakukan upaya sistemik penjaminan mutu internal sebagai bentuk dukungan terhadap sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dibangun oleh UKI. Melalui SPMI, tata kelola Prodi HI diperkuat dan menjadi semakin efisien, terarah dalam mengejar visi yang semakin tajam: menjadi program studi unggulan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kajian kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun 2024, tingkat Asia Tenggara tahun 2029, dan tingkat Asia tahun 2034 sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.

Masih ada banyak lagi peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memajukan pendidikan tinggi di Indonesia, dan yang tidak akan cukup diulas satu per satu dalam tulisan ini. Saya mengamini bahwa segala upaya tersebut semata-mata ditujukan untuk menghasilkan SDM yang unggul, mampu menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan berkolaborasi untuk membangun negeri. Suatu tujuan yang selaras dengan mimpi UKI.

Harapan dalam HI

Kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan (sustainable). Sesuai visi prodi, itulah muara dari seluruh kegiatan tridharma Prodi HI lima belas tahun dari sekarang. Berkelanjutan berarti memperhatikan kebutuhan di masa depan; ketersediaan sumber daya alam, kelestarian lingkungan, keamanannya, dan lain-lain. Tahun 2015 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mencanangkan 17 sasaran prioritas model pembangunan yang baru dan harus dicapai pada tahun 2030. Sasaran pembangunan berkelanjutan ini meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Prodi HI dengan keragaman minat kajian para dosennya ikut mengambil bagian dalam merealisasikan 17 sasaran tersebut di kawasan Asia Pasifik, kawasan yang selama ini memang menjadi kajian utama Prodi HI UKI.

Urgensi dari 17 sasaran pembangunan berkelanjutan dapat kita

temukan dalam aktivitas sehari-hari. Inilah yang menarik dari Hubungan Internasional, ia mampu menyorot keterkaitan antara hal-hal yang bersifat mikro atau bahkan personal dan politik yang berada di tingkat global. Misalnya, saya ingat ketika saya duduk di sekolah dasar, guru mata pelajaran pertanian mengajarkan bahwa baik musim penghujan dan kemarau di Indonesia mempunyai masa tertentu setiap tahunnya. Tidak sampai dua dekade setelahnya, pelajaran pengenalan musim dan bulannya sekarang seperti tidak relevan lagi. Musim kemarau dan penghujan tidak punya periode tertentu dalam setahun. Jelas ada masalah dalam pola cuaca yang berubah dengan ekstrim belakangan ini. Itu baru bicara tentang satu dari 17 sasaran pembangunan berkelanjutan secara global. Masih ada banyak isu lainnya.

Kita menyadari bahwa kemajuan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga bentuk-bentuk risiko dan ancaman yang baru. Di sinilah Prodi HI secara khusus akan mengambil bagian: mempersiapkan satu sumber daya manusia yang cakap dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut, positif ataupun negatif, khususnya yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Untuk mengerjakan visinya, kegiatan tridharma Prodi HI perlu diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan yang berkelanjutan, dan menghasilkan profesional HI yang terampil dalam isu-isu tersebut.

Bias Sosial yang Mengganggu

Mencapai 17 sasaran pembangunan berkelanjutan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Satu hal yang dapat membatasi keterlibatan semua pihak dalam penanganan isu-isu global secara efektif adalah adanya pandangan yang bias terhadap pihak tertentu. Masalah pandangan yang bias dalam HI pertama kali dibongkar oleh para feminis HI. Kontribusi dalam membongkar keutamaan satu aktor dibandingkan aktor lainnya perlu diteruskan ke ranah-ranah yang lain—tidak terbatas pada isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebab gestur destruktif yang senada maskulinis, yakni eksklusivitas maskulin, masih dapat ditemukan di mana saja akibat dominasi laki-laki hampir di semua hal selama ini. Warisan dari kajian feminis HI yang penting disadari sebelum berbicara tentang penanganan terhadap isu global adalah bahwa setiap aktor dalam Hubungan Internasional berbeda dalam fungsi, namun tidak dalam nilai—setiap aktor sama pentingnya untuk dikaji dan diajak berkolaborasi untuk menjawab tantangan global hari ini.

Persepsi bahwa ada nilai yang tidak setara antara satu aktor dengan aktor lainnya telah membuat banyak kajian baru dalam HI tidak mendapat perhatian serius. Padahal, setiap aktor, seperti halnya laki-laki dan perempuan, merupakan rekan setara, yang diperlukan oleh aktor

lainnya dalam mengusahakan jawaban atas isu-isu aktual global. Apalagi dalam dunia yang semakin kompleks, satu individu atau institusi tidak bisa lagi seorang diri mengerjakan tanggung jawabnya. Tanpa kehadiran dan keterlibatan beragam aktor, usaha sekeras apapun yang dilakukan tidak akan maksimal menjawab tantangan global kontemporer. Diperlukan kerendahan hati untuk berkolaborasi agar semua pihak dapat memperoleh hasil yang terbaik.

Mau bekerja sama dan menilai tinggi peran aktor lain tidak berarti mengurangi signifikansi satu aktor atau menjatuhkan nilai diri aktor tersebut. Sebaliknya, bekerja sama justru menyediakan kerangka di mana potensi maksimal setiap aktor dapat terwujud. Seperti alat musik yang semakin indah suaranya ketika menyatu dalam alunan orkestra, kekuatan dari masing-masing aktor dapat ditunjukkan dan semakin dihargai ketika semua aktor terlibat serta dan berkontribusi dalam mengerjakan sasaran pembangunan berkelanjutan secara global.

Yuk Melangkah Bersama

Sampai sini semakin jelas bahwa perjalanan Prodi HI masih panjang dan memerlukan mitra yang beragam. Berhenti sejenak dan merenungkan berbagai perubahan yang terjadi di dalam dan di luar dengan tetap berpegang pada dasar yang tertanam adalah kunci untuk melanjutkan perjalanan dengan kuat. Dua puluh lima dalam Alkitab berarti berkat, secara khusus, melalui Allah Roh Kudus yang memperlengkapi; sedangkan angka lima yang merupakan faktor pembaginya berbicara tentang anugerah dan perkenanan dari Allah (Jones 2008, 2-3, 21-22). Kuat, dengan demikian, kita yakini bukan karena kekuatan orang-orang di dalamnya; melainkan karena kehadiran Allah sendiri yang menyertai perjalanan Prodi HI. Saya teringat kurang lebih setahun yang lalu Ibu Dekan membagikan Firman dari Mazmur 133 dalam persekutuan doa Fisipol. Kebersamaan yang rukun menarik berkat dan perkenanan Allah. Demikian juga kesetaraan yang membawa kepenuhan fungsi/peran setiap aktor dalam HI adalah prasyarat untuk terealisasinya pembangunan berkelanjutan di manapun.

Secara akademik maupun rohani, kesetaraan dan kebersamaan terbukti membawa perubahan yang baik. Saya pikir, Prodi HI tidak terkecuali. Sekarang, marilah kita kembali melanjutkan perjalanan bersama-sama. Allah sendiri yang akan memperkaya proses pertumbuhan Prodi HI Fisipol UKI. Kiranya Ia berkenan terhadap segenap karya yang dilahirkan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikannya!

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Friedman, Thomas L.** 2016. "Knowledge is Power." Dalam Thank You for Being Late: An Optimist's Guide to Thriving in the Age of Accelerations. New York: Farrar, Straus and Giroux, edisi Kindle.
- Jones, Stephen E.** 2008. The Biblical Meaning of Numbers from One to Forty. Minnesota: God's Kingdom Ministries.
- Oey-Gardiner, Mayling dan Peter Gardiner.** 2013. "Indonesia's Demographic Dividend or Window of Opportunity?". Masyarakat Indonesia 39 (2): 481-504.
- Ringmar, Erik.** 2017. "The Making of the Modern World." Dalam Stephen McGlinchey, ed. International Relations. Bristol: E-International Relations Publishing, hal. 8-19

Website

- Lee, Aileen.** 2013. "Welcome to the Unicorn Club: Learning from Billion Dollar Startups." TechCrunch, 3 November, <https://techcrunch.com/2013/11/02/welcome-to-the-unicorn-club/>. Diakses pada 11 September 2019.
- "Sejarah Universitas." Universitas Kristen Indonesia**, tanpa tanggal, <http://www.uki.ac.id/halaman/index/20171010-sejarah-universitas>. Diakses pada 11 September 2019.
- Sylvia, Monica Agnes.** 2019. "3 Lessons learned selama 4 tahun journey bersama Wahana Visi Indonesia," 31 Agustus, <https://www.linkedin.com/pulse/3-lessons-learned-selama-4-tahun-journey-bersama-wahana-sylvia/>. Diakses pada 1 September 2019.

IDEALISME MAHASISWA BERPRESTASI DALAM MENGGAUNGKAN NAMA FISIPOL UKI YANG UNGGUL

¹NADYA CAROLLINA DAN SHYINTIA²

^{1,2}Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2017,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia,
Jl. Mayjen Sutoyo no.2, Cawang - Jakarta, 13630, Indonesia

¹nadyacarollina42@gmail.com, ²shyintialo1198@gmail.com

IDEALISME merupakan aliran ilmu filsafat yang menganggap pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar yang dapat dicamkan dan dipahami; atau dalam arti lain hidup atau berusaha hidup menurut cita-cita, menurut standar yang dianggap sempurna (KBBi 2019). Pandangan antara generasi muda dan generasi terdahulu mengenai sisi idealisme ini memiliki persamaan. Kesamaan pandangan ini menimbulkan jaringan dan ekosistem sosial yang dipenuhi dengan optimisme, termasuk dalam dunia pendidikan. Penulis merangkum sejumlah pendapat teman-teman generasi muda (dalam hal ini adalah mahasiswa/i) dan generasi terdahulu (orang tua, dosen senior, dan pekerja senior lainnya) mengenai idealisme. Kedua generasi ini memandang idealisme sebagai hal yang diperlukan dalam kehidupan. Idealisme membentuk serta mengarahkan semangat dan jiwa visioner setiap orang untuk mencapai hal-hal yang diyakini baik dalam hidup. Idealisme membentuk sebuah produk yang kemudian disebut sebagai 'optimisme'.

Optimisme menjadi hal yang penting bagi generasi muda, termasuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia. Idealisme dan produknya mendorong mahasiswa Fisipol UKI untuk bergerak maju di tengah arus globalisasi dan gaya hidup yang anak muda yang serba instan. Mengutip salah satu pendapat teman mahasiswa Fisipol UKI: "Bayangkan, jika manusia tidak memiliki pemikiran yang idealis. Maka, George Mendel tidak akan mungkin menemukan rumus genetik. Thomas Alfa Edison tidak akan sanggup menemukan lampu. Serta, Steve Jobs tidak akan berpikir untuk membangun Perusahaan Apple". Artinya, orang-orang hebat dan besar di dunia juga perlu memiliki dan mengembangkan idealismenya.

Tentunya idealisme tersebut perlu diimbangi dengan strategi, perencanaan matang, serta niat dan usaha yang baik. Hal inilah yang terus

dilakukan oleh mahasiswa Fisipol UKI untuk mencapai berbagai prestasi. Selama 25 tahun Fisipol UKI berdiri, setiap mahasiswa pada generasinya berupaya menyumbangkan prestasi untuk fakultas dan universitas. Dibantu dengan pondasi idealisme dan perancangan strategi yang matang bersama dosen atau akademisi dalam Fisipol UKI, prestasi menjadi suatu hal yang terjangkau bagi mahasiswa.

Fisipol sebagai salah satu fakultas yang memiliki reputasi terbaik di Universitas Kristen Indonesia telah menunjukkan diri sebagai fakultas unggul melalui cakar kemahasiswaannya. Tersebar nya mahasiswa Fisipol di berbagai instansi pemerintahan, perusahaan besar, hingga institusi pendidikan menunjukkan bahwa lulusan fakultas ini telah berupaya menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat. Mahasiswa Fisipol UKI telah membuktikan diri yakni mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya prestasi dari tingkat lokal hingga nasional, dan menuju internasional. Progresivitas Fisipol UKI dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan, dilihat dari prestasi-prestasi mahasiswanya. Melalui prestasi mahasiswa Fisipol UKI, hal ini turut membuktikan kualitas Fisipol UKI yang dilandasi semangat berkarya. Fisipol sebagai bagian dari UKI terus mendorong mahasiswa Fisipol UKI untuk terus berkarya dan mengharumkan nama alamater dan negara. Melalui mahasiswa Fisipol UKI, penulis yakin nama almamater akan semakin jaya. Muda Progresif, Oren Progresif!

Penerapan Tridharma Perguruan Tinggi di FISIPOL UKI

Dalam setiap organisasi dibutuhkan visi dan misi yang bertujuan sebagai landasan dalam menjalankan program kerja organisasi tersebut. Proses pembelajaran harus diawali oleh visi dan misi dan Tridharma Perguruan Tinggi (PT), yang selanjutnya disebut Tridharma. Menurut UU no.12 tahun 2012 pasal 1 ayat 9, Tridharma merupakan kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi, Tridharma menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai oleh perguruan tinggi di Indonesia. Tujuan dari Tridharma ini sendiri adalah untuk melahirkan orang yang memiliki semangat juang yang tinggi, kritis, inovatif, mandiri dan profesional.

Untuk mencapai tujuan dari Tridharma, mahasiswa mengambil peran penting sebagai anggota sivitas akademika yaitu, dengan menumbuhkan kesadaran diri untuk mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi kaum intelektual, praktisi, maupun profesional. Begitupun dengan tenaga ahli/dosen maupun fakultas mempunyai tugas untuk mentransformasikan pengetahuan yang dikuasainya kepada mahasiswa

dengan menciptakan lingkungan pembelajaran mahasiswa yang efektif, sehingga secara langsung mendorong mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

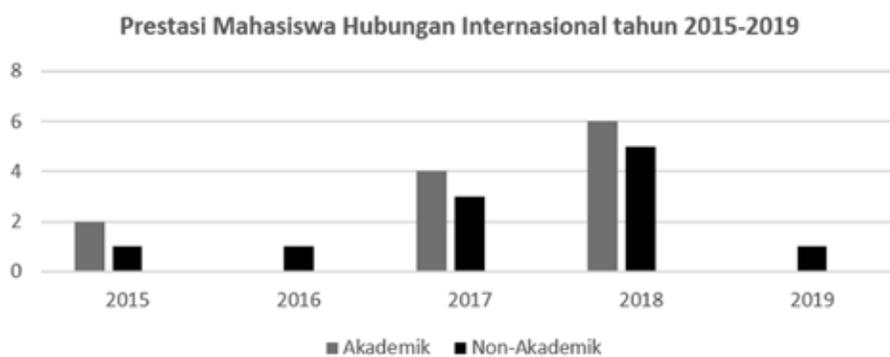
Oleh sebab itu, kita sadari bahwa Tridharma bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan semua anggota sivitas akademika. Karena dengan bersinergi, mahasiswa dan dosen dapat menjawab tantangan yang semakin beragam terutama di era digitalisasi. Seperti halnya yang terjadi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia (Fisipol UKI), penulis menggunakan acuan data dari akreditasi program studi Hubungan Internasional pada tahun 2015-2019.

Apabila kita telusuri, visi Fisipol UKI yaitu, menjadi fakultas yang unggul dalam tridarma perguruan tinggi di tingkat Asia Pasifik dengan berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai Kristiani pada tahun 2027 dijadikan acuan sivitas akademika Fisipol UKI dalam mewujudkan Oren yang progresif. Visi tersebut mewakili penerapan tridarma di lingkungan fakultas, dan secara mantap menjawab tantangan modern yaitu, untuk terjun ke dunia global. Berikut penulis akan menjelaskan prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh mahasiswa Fisipol UKI sesuai dengan kategori Tridharma Perguruan Tinggi.

Pendidikan dan Pengajaran

Dalam mewujudkan butir-butir tridarma perguruan tinggi yang pertama, Fisipol UKI berusaha untuk menciptakan suasana pendidikan yang secara aktif mendorong mahasiswanya untuk mengembangkan potensi dirinya. Terbukti berdasarkan data yang dikumpulkan dari proses akreditasi prodi Hubungan Internasional menunjukkan progres minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademis dan menorehkan prestasi bagi Fisipol UKI, seperti grafik dibawah ini:

Grafik 2.5 Prestasi Mahasiswa Hubungan Internasional Tahun 2015-2019



Sumber: Tim Akreditasi Prodi Hubungan Internasional 2019

Tahun 2015 diawali dengan program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Jawa Barat (Dinas Olahraga dan Pemuda PEMPROV JABAR) ke India yang diikuti oleh Melly Sabina Ester Lengkong sebagai kegiatan tingkat internasional. Selanjutnya adalah pengiriman delegasi ke acara Grand General Assembly UI MUN Club 2015 yang diwakili oleh Gradiola Stacie Oley. Di bidang non-akademik, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional berhasil memenangkan Juara 1 Futsal FKMIII Korwil II Championship 2015 “More Than Just A Goal” yang diadakan di Universitas Jayabaya.

Lalu, pengiriman delegasi ke acara PESPARAWI Mahasiswa Tingkat Nasional XIV, Katrine Dame Siahaan pada tahun 2016. Tahun 2017 merupakan tahun produktif bagi mahasiswa HI, dilihat dari pengikutsertaan mahasiswa yang mewakili Universitas Kristen Indonesia dalam acara lokal/wilayah hingga ke acara internasional.

Penelitian

Mahasiswa Hubungan Internasional Fisipol UKI mengikuti dua perlombaan penelitian/ diskusi ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dan bertujuan untuk memahami suatu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Adapun kegiatan yang diikuti sebagai berikut, Diskusi Ilmiah Chamber Sosial Budaya dalam acara PSNMHII XXX (Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia ke-30) Mei 2018 yang berhasil meraih Juara 2 pada chamber Diskusi Ilmiah Sosial Budaya. Kemudian, delegasi PNMHII XXX (Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia ke-30) berhasil meraih peringkat ketiga dalam sub tema industri November 2018.

Pengabdian Kepada Masyarakat

Sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh Fisipol UKI, mahasiswa HI wajib untuk mengambil mata kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dimana tugas akhir dari mata kuliah tersebut adalah pelaksanaan program yang sudah dibuat selama satu semester. Adapun contoh kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pulau Tidung pada tahun 2018.

Dari paparan yang sudah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa mahasiswa Fisipol UKI tidak hanya fokus kepada satu butir Tridharma, melainkan secara seimbang berhasil menoreh prestasi dan mengharumkan nama fakultas. Diusia perak, Fisipol UKI tetap berprogres dan berkembang lewat kerjasama antara mahasiswa dalam pengembangan minat/bakat maupun upaya dosen-dosen Fisipol UKI dalam menciptakan sebuah lingkungan pendidikan yang mendorong mahasiswanya untuk menggali kemampuan akademis dan non-akademisnya. Hal ini patut diapresiasi

karena dengan adanya dukungan moral dan material, akan menimbulkan semangat bagi mahasiswanya dalam berprestasi.

Meskipun Fisipol UKI masih belum mampu menjawab semua tantangan yang ada, Fisipol UKI akan tetap berproses dan berkembang bersama anggota sivitas akademiknya untuk menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti, mandiri, profesional dan berkelanjutan.

Harapan

Adapun harapan-harapan penulis kepada seluruh mahasiswa/i Fisipol UKI, yakni:

1. Mahasiswa Fisipol UKI dapat mengembangkan jiwa idealisme dan disertai dengan strategi matang untuk mencapai berbagai prestasi;
2. Mahasiswa Fisipol UKI berani untuk mencoba, berinovasi, dan menantang diri sendiri untuk bergerak maju sebagai generasi muda yang kontributif terhadap kemajuan bangsa dan negara di tengah arus globalisasi;
3. Mahasiswa Fisipol UKI dapat mempertahankan integritas sebagai anggota sivitas akademika dengan menjunjung tinggi tanggung jawab dan kejujuran;
4. Mahasiswa Fisipol UKI dapat mengamalkan visi dan misi yang hendak dicapai oleh Fakultas yang beracuan kepada Tridharma Perguruan Tinggi Ristek-Dikti;
5. Mahasiswa Fisipol UKI menjadi pribadi yang open-minded, berwawasan luas, dan tetap menjadi makhluk yang rendah hati dan mau berbagi dan peduli terhadap sesama;
6. Dengan mengamalkan nilai-nilai Kristiani, Mahasiswa Fisipol UKI diharapkan untuk menjalankan lima butir tata nilai ke Kristenan UKI yaitu, Rendah Hati, Berbagi dan Peduli, Disiplin, Profesional dan Bertanggung Jawab.

Dalam menjalankan visi dan misi serta pengamalan tata nilai ke-Kristenan UKI, berpegang teguh kepada mars UKI.

“... Melayani bukan Dilayani, Abdi Nusa dan Bangsa”.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Pemerintah

RISTEK-DIKTI. Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Yogyakarta: Rapat Perencanaan Pengawasan Proses Bisnis Perguruan Tinggi Negeri, 2017.

Riset

Tim Akreditasi Prodi Hubungan Internasional. 2019. Prestasi Mahasiswa Akademik dan Non-Akademik. Jakarta

Website

KBBI. 2019. <https://kbbi.web.id/idealisme>.

JURNAL SOCIAE POLITES: MASA KINI DAN MENDATANG

VL. SINTA HERINDRASTI, MA

Redaksi Jurnal Sociae Polites Fisipol UKI
Ketua Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia,
Jl. Mayjen Sutoyo no.2, Cawang - Jakarta, 13630, Indonesia

Herindrasti@yahoo.com, valentina.herindrasti@uki.ac.id

Pengantar

Dalam siaran pers mengenai sosialisasi Peraturan Menristekdikti Nomor 9 tahun 2018 Akreditasi Jurnal Ilmiah dan Perkembangan SINTA, ditegaskan bahwa "... publikasi di jurnal ilmiah saat ini menjadi sangat penting dengan adanya persyaratan kenaikan setiap jenjang jabatan untuk fungsional dosen, peneliti, guru, widyaiswara, perekayasa serta fungsional lainnya. Selain persyaratan untuk mempertahankan tunjangan kehormatan jabatan Guru Besar dan Lektor Kepala sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 yang memerlukan publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi. Persyaratan kelulusan bagi mahasiswa magister dan doktor dalam standar perguruan tinggi juga memerlukan syarat serupa." (Kemristekdikti, Sosialisasi Peraturan Menristekdikti Nomor 9 tahun 2018 Akreditasi Jurnal Ilmiah dan Perkembangan 2018). Dengan demikian, menjadi semakin jelas bahwa adanya jurnal ilmiah pada perguruan tinggi sangat dibutuhkan terutama juga karena untuk memenuhinya diperlukan lebih dari 8000 jurnal ilmiah terakreditasi nasional. Fakta menunjukkan bahwa ketimpangan antara ketersediaan (jurnal terakreditasi) dan kebutuhan (publikasi artikel) masih besar. Terdapat lebih 50 ribu permintaan ISSN jurnal ke PDII-LIPI dan lebih dari 25 ribu jurnal elektronik, namun yang terakreditasi oleh Kemenristekdikti baru 333 dan oleh LIPI baru 197. Gap yang besar ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa bagi pemerintah dan para pengelola jurnal ilmiah.

Apabila secara basis regulasi sudah sedemikian jelas posisinya, bagaimana untuk mencapainya? Bagaimana para pengelola jurnal menyikapi seluruh perkembangan dan tuntutan terkait jurnal ilmiah

terakreditasi? Artikel ini ingin membahas mengenai peran jurnal Sociae Polites Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan tantangan pengelolaan dalam era yang berubah. Dengan demikian diharapkan bahwa potret perjuangan "Sociae Polites" dapat menginspirasi berbagai usaha penerbitan jurnal ilmiah di Fakultas dan Program Studi khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UKI.

Perkembangan Majalah Ilmiah Sociae Polites Fisipol UKI

Majalah Ilmiah "Sociae Polites" (SP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah hadir kira-kira sejak tahun 1997. "Sociae Polites" adalah bahasa Latin yang kluang lebih artinya Sociae adalah ilmu sosial – mempelajari aspek yang terkait dengan manusia dan lingkungan sosialnya sementara Polites adalah Politik – semua hal terkait dengan negara, pemerintahan dan kewarganegaraan.

SP diawali oleh sekelompok pengajar sebagai dewan redaksi yaitu Prof. Dr. -Ing K.T. Sirait, Yusuf Soewadji, MA, Drs. Parluhutan Tobing, M.Ed, D. Parlindungan Sitorus, SH, MS, Sumita Tobing, Ph.D, Drs. Samuel Pardede; Staf Ahli F.M. Parapat, Ph.D., Prof. Dr. T.O Ihromi, Prof. Dr. R.Z. Leirissa. Redaktur Pelaksana Dra Antie Solaiman, MA, Edwin MB Tambunan, S.IP, Drs. Alexander Rumondor, Drs. Sigit Rochadi, M.Si., Theresia Huwae, M.Psi, Siti Merida hutagalung, MH dan Dra. Nunung Setyani. Sekretariat majalah ilmiah "Sociae Polites" masih di kampus Jl. Diponegoro Jakarta. Tema-tema tulisan merefleksikan era kekuasaan rejim Soeharto pada waktu itu, yaitu dinamika politik nasional, politik internasional terkait peran PBB, Amerika Serikat serta komunikasi politik. Memasuki era 2000-an tema-tema Jurnal Sociae Polites (JSP) mengalami perubahan sesuai dengan semangat jamannya yaitu semakin banyak ulasan terkait ilmu komunikasi meskipun tema politik dan demokrasi di Indonesia selalu hadir.

Gambar 2.6 Cover Majalah Ilmiah Sociae Polites Tahun I, No 2, Agustus 1997



Penerbitan SP terus berlangsung hingga beberapa pergantian redaksi sampai sekarang (2019), meskipun kontinuitas penerbitan masih menjadi perjuangan utama. Beberapa penerbitan yang masih tercatat dari arsip lama dan berhasil dilakukan digitalisasi dalam jurnal elektronik SP adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.7 Publikasi Jurnal “Sociae Polites” 1997
– ISSN 1410-3745**

NO	EDISI	ARTIKEL
1	Tahun I No 2 Agustus 1997	-
2	Tahun I No 3 November 1997	8 artikel
3	Tahun II No 8 Februari 1999	5 artikel
4	Vol 5 No 16 Agustus 2002	5 artikel
5	Vol 5 No 17 November 2002	6 artikel
6	Vol 5 No 18 Februari 2003	5 artikel
7	Vol 5 No 19 Juni 2003	5 artikel
8	Vol 5 No 20 September 2003	6 artikel
9	Vol 6 No 21 Tahun 2004	5 artikel
10	Vol 5 No 22 Tahun 2005	6 artikel
11	Vol 5 No 23 Tahun 2005	6 artikel
12	Vol 5 No 24 Tahun 2006	7 artikel
13	Vol 5 No 25 Tahun 2007	6 artikel
14	Vol 8 No 26 Tahun 2008	5 artikel
15	Vol 9 No 27 Tahun 2009	6 artikel
16	Vol 10 No 28 Tahun 2009	7 artikel
17	Vol 11 No 29 April 2010	7 artikel
18	Vol 11 No 30 Agustus 2010	7 artikel
19	Vol 11 No 31 Desember 2010	8 artikel
20	Vol 12 No 32 April 2011	7 artikel
21	Vol 13 No 33 Agustus 2011	7 artikel
22	Bunga Rampai Pemikiran Dosen Fisipol November 2011	16 artikel
23	Vol 14 No 34 Desember 2011	9 artikel
24	Vol 15 No 1 Januari –Juni 2014	7 artikel
25	Vol 15 No 2 Juli –Desember 2014	6 artikel
26	Vol 16 No 1 Januari – Juni 2015	6 artikel
27	Vol 18 No 1 Januari – Juni 2017	6 artikel
28	Vol 18 No 2 Juli – Desember 2017	6 artikel

**Gambar 2.7 Cover Jurnal Ilmiah Sociae Polites
Vol 15 No 1 Januari- Juni 2014**



Sesuai dengan arahan Dikti mengenai akreditasi jurnal ilmiah, sejak tahun 2014 JSP sebenarnya sudah mempelajari dan melakukan persiapan untuk mengikuti akreditasi antara lain dengan mengubah cover sesuai ukuran standar A4 dan memperbaharui tampilan cover meskipun pada waktu itu kebijakan, fasilitasi dan bimbingan teknis dari universitas belum sejalan dengan semangat fakultas. Baru pada tahun-tahun terakhir ini dengan adanya berbagai perubahan dalam kebijakan pendidikan tinggi, reformasi layanan akreditasi Jurnal Ilmiah mengalami perubahan yang pesat, khususnya mengenai penerbitan jurnal on-line.

Dari segi pendokumentasian, JSP telah melakukan digitalisasi terbitan sebelumnya – sesuatu yang dikerjakan lebih karena pertimbangan historis serta penghargaan atas “tanggung jawab ilmiah” yang telah ditunjukkan oleh para pendiri dan pendahulu JSP sebelumnya.

Reformasi Layanan Akreditasi Jurnal Ilmiah

Akreditasi Jurnal Ilmiah adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu jurnal ilmiah melalui kegiatan penilaian kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan dan ketepatan waktu penerbitan jurnal ilmiah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan jurnal ilmiah terakreditasi dan reformasi birokrasi pelayanan akreditasi jurnal ilmiah nasional maka Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Beberapa hal yang penting adalah:

- (i) Lembaga akreditasi jurnal ilmiah berada di bawah satu lembaga yaitu Kemenristekdikti. Seluruh jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi oleh LIPI dan masih berlaku masa akreditasinya secara otomatis diakui oleh Kemenristekdikti hingga masa berlaku akreditasinya habis. Kemenristekdikti menerbitkan sertifikat baru bagi jurnal ilmiah yang telah diakreditasi oleh LIPI tersebut.

- (ii) Mekanisme pengajuan akreditasi jurnal ilmiah dilakukan melalui portal Akreditasi Jurnal Nasional (Kemristekdikti, Arjuna 2019). Pengajuan akreditasi jurnal ilmiah menurut peraturan baru akan dimulai pada 1 Juni 2018. Masa pendaftaran akreditasi jurnal ilmiah terus dibuka sepanjang tahun, demikian pula proses penilaian akreditasi dilakukan sepanjang tahun juga. Penetapan hasil akreditasi dilakukan sekali setiap 2 bulan dan akreditasi berlaku 5 tahun.
- (iii) Peringkat Akreditasi dibagi menjadi 6, yakni: Peringkat 1 nilai minimal 85 sampai 100; Peringkat 2 nilai minimal 70; Peringkat 3 nilai minimal 60; Peringkat 4 nilai minimal 50; Peringkat 5 nilai minimal 40; dan Peringkat 6 dengan nilai minimal 30. Peringkat tersebut dibuat untuk memberikan pilihan bagi lembaga pembina karir jabatan fungsional untuk memilih peringkat akreditasi jurnal ilmiah yang sesuai untuk syarat pengajuan kenaikan jenjang jabatan fungsional. Ketentuan persyaratan tersebut akan diatur kemudian oleh masing-masing lembaga pembina jabatan fungsional.
- (iv) Jurnal ilmiah yang akan diajukan akreditasi harus sudah dikelola secara elektronik (daring/on-line), memiliki tim editor serta reviewer dengan pengalaman publikasi yang baik. Persyaratan pengajuan akreditasi jurnal ilmiah adalah: 1. Telah memiliki nomor ISSN versi elektronik dan Digital Object Identifier (DOI) untuk setiap artikelnya; 2. Telah terbit minimal dua tahun berturut-turut; 3. Minimal terbit dua kali setahun dengan minimal masing-masing terbitan 5 artikel; dan 4. Memiliki etika publikasi. Pengelola jurnal mengajukan akreditasi melalui portal Arjuna dengan mengisi borang dan melakukan evaluasi diri. Setelah dinyatakan lolos persyaratan administrasi maka jurnal akan diperiksa oleh minimal 2 asesor manajemen dan 2 asesor substansi yang sesuai dengan bidang keilmuan jurnal. Peringkat jurnal hasil akreditasi dapat dilihat dalam portal SINTA dengan nama Sinta 1 sampai 6 (Kemristekdikti, SINTA 2018). Bagi jurnal yang nilainya kurang dari 30 akan dilakukan pembinaan secara khusus oleh Kemristekdikti melalui mekanisme pelatihan dan pendampingan sehingga jurnal ini dapat terakreditasi.
- (v) Bagi jurnal ilmiah yang masih terbit dalam bentuk cetak dan memiliki kendala dalam penerbitan secara elektronik, Kemristekdikti bekerjasama dengan LIPI menyiapkan Rumah E-journal Indonesia yang merupakan cloud aplikasi jurnal elektronik yang diberikan secara gratis sehingga pengelola tidak perlu memiliki server, aplikasi pengelolaan jurnal, dan tim ahli teknologi informasi (TI) pengelolaan jurnal sendiri.

Tantangan Masa Kini Jurnal “*Sociae Polites*”

Tidak dapat diingkari bahwa peran JSP dalam memfasilitasi penulisan ilmiah para dosen Fisipol cukup besar. JSP setidaknya menyediakan penerbitan ilmiah alternatif manakala tulisan ilmiah dosen belum dapat atau terlalu lama menunggu penerbitan pada jurnal ilmiah terakreditasi karena kuantitas yang belum memenuhi kebutuhan. JSP juga merupakan sarana berlatih bagi pengelola bagaimana mengelola suatu jurnal ilmiah secara langsung dan juga bagi para penulis. Khususnya melalui terbitan bunga rampai misalnya tersedia ruang penulisan bagi para dosen seklaigus mendorong produktivitas penulisan ilmiah.

Kesadaran akan pentingnya peran JSP sebagai jurnal alternatif yang potensial belum menjadi kesadaran bersama. Urgensi untuk mengelola jurnal secara profesional searah dengan reformasi Kemristekdikti belum menjadi keputusan dan komitmen semua pihak. Dengan demikian penghargaan akan kerja tim redaksi masih minimal bertentangan dengan misi yang harus diemban dalam komunitas akademik seperti fakultas atau universitas. Konsekuensi lebih jauh adalah ketersediaan sumber daya pengelolaan jurnal yang belum memadai untuk mengikuti reformasi akreditasi layanan. Suatu kesempatan yang sayang jika tidak dimanfaatkan di tengah kebijakan deregulasi dan pembukaan pintu seluas-luasnya bagi pengembangan jurnal ilmiah terakreditasi nasional. Selain itu secara simultan Kemristekdikti terus “berlari” dengan membuka asistensi tata kelola jurnal menuju Reputasi Internasional – suatu keniscayaan di era globalisasi dan kompetisi internasional. Kepentingan nasional Indonesia untuk berdiri tegak di tengah kemajuan bangsa lain – terefleksi dalam kualitas terbitan ilmiahnya.

Dengan kata lain sejarah panjang JSP perlu dilanjutkan dengan estafet yang lebih serius di bidang penyiapan sumber daya manusia pengelola termasuk komitmen untuk melakukan tata kelola sesuai dengan ketentuan regulasi. JSP tidak mempunyai pilihan lain, selain dengan tekad bulat menghadapi tantangan jamannya dengan stamina yang lebih kuat dan kemauan belajar.

Langkah paling dekat adalah memenuhi kriteria minimal jurnal ilmiah seperti terurai dalam Pasal 4 Peraturan Menristek No 9 Tahun 2018, yaitu jurnal ilmiah paling sedikit memenuhi syarat:

- (a) memuat artikel yang secara nyata memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang didasarkan pada hasil penelitian, perekayasaan, dan/atau telaahan yang mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinal serta tidak plagiat;
- (b) memiliki dewan penyunting jurnal berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu yang mewakili bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;

- (c)melibatkan mitra bestari berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu jurnal dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda dari dalam dan/atau luar negeri yang menyaring naskah secara objektif;
- (d)menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- (e)menjaga konsistensi gaya penulisan dan format penampilan;
- (f)dikelola dan diterbitkan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi;
- (g)terbit sesuai dengan jadwal; dan
- (h)memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik (Electronic International Standard Serial Number/EISSN) dan pengenal objek digital (Digital Object Identifier/DOI).

Penutup

Dari masa ke masa JSP telah bertahan dengan keberanian menghadapi tantangan zamannya. Tantangan masa kini menjadi batu ujian bersama untuk menunjukkan “relevansi” kerja akademik insan Fisipol UKI. Apakah JSP akan memilih untuk mundur dalam menghadapi harapan civitas akademiknya seperti tertuang dalam keputusan Rapat Kerja Fisipol 2019 atau JSP justru menangkap tugas pengelolaan sebagai tantangan menggairahkan untuk ditanggapi? Suatu kerja kontributif dalam skalanya untuk mendukung visi nasional meningkatkan kualitas penerbitan kajian ilmiah – sesuatu bagian yang menjadi tugas khusus dan hanya diemban oleh kaum akademisi di Indonesia bersama akademisi lain di belahan dunia yang lain.

*Suatu tugas yang menantang!
Selamat bekerja!*

Daftar Pustaka

Jurnal

Jurnal Sociae Politiae , Terbitan 1997 -2017.

Laporan

Kemristekdikti. Sosialisasi Peraturan Menristekdikti Nomor 9 tahun 2018 Akreditasi Jurnal Ilmiah dan Perkembangan. Siaran Pers, Jakarta: Kemristekdikti, 2018.

Website

Kemristekdikti. Arjuna. 2019. <http://arjuna.ristekdikti.go.id/> (accessed Oktober 20, 2019).

—. SINTA. 2018. <http://sinta2.ristekdikti.go.id/> (accessed Oktober 18, 2019).

Para Penulis



Dr. Angel Damayanti >

adalah tenaga pendidik di Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta dan saat ini sedang menjabat sebagai Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UKI. Dia menerima gelar Sarjana Ilmu Politik dari UKI pada tahun 2000, M.Si dari Universitas Indonesia pada tahun 2007 dan M.Sc dari RSIS, NTU, Singapura pada tahun 2012. Dia mengambil program doktor di bidang Ilmu Politik, Universitas Nasional Singapura pada tahun 2013 dan menerima gelar Ph .D dalam Hubungan Internasional dari Universitas Sains Malaysia, Penang pada 2017. Minat

penelitiannya mencakup Studi dan Kajian Keamanan Internasional termasuk Terorisme dan Maritim di Asia Pasifik yang membuatnya melakukan sejumlah penelitian dan publikasi termasuk "Sino-Japan Action Reaction and the Impact to Instability in Asia Pacific" (2013), "Major Powers Interaction in Maritime East Asia and the Role of ASEAN" (2016), and "Regional Maritime Cooperation in Maintaining Maritime Security and Stability: A Test Case for ASEAN Unity and Centrality" (2017), "The Root Causes and Nexus of Militant Islamic Movement in Indonesia: Case Study of Darul Islam and Jemaah Islamiyah" (2017), "Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia" (2017), "Deradikalisasi: Kontra Radikalisme & Deideologisasi" (2018) dan "Indo-Pacific Maritime Cooperation: ASEAN Mechanisms on Security Towards Global Maritime Governance" (2019).

Sinta Herindrasti >

adalah Kepala Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia. Mengajar Geopolitik, Politik Internasional, Pengantar Studi Kawasan dan juga Hubungan Internasional di Asia Pasifik. Saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Studi ASEAN UKI dan Editor Pelaksana Jurnal Sociae Polites FISIPOL UKI. Menjadi Pemakalah dalam Sixth International Conference of Asian Studies di Yogyakarta diselenggarakan oleh ICRD, Uniqe Canada (2018). Menjadi Fasilitator EILIES Webminar 2019: The Promise of Digital Creative Economy (2019). Ia menempuh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan melanjutkan studi magister di Universitas Nottingham, Inggris berfokus pada International Studies: Asia Pacific Region



Fransiskus Xaverius Gian Tue Mali >

adalah dosen tetap Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia. Menjabat sebagai Kepala Program Studi Ilmu Politik FISIPOL UKI. Peneliti bidang Politik pada Global Strategic Institute (2014-2017). Asisten Tenaga Ahli Bidang Riset Politik di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (2017-2018). Ia melakukan penelitian terkait Pendidikan Pancasila Dalam Mengatasi Hate Speech Di Media Sosial Pada Pemilu Presiden (2019). Ia menempuh gelar sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Nasional dan melanjutkan gelar magister Ilmu Politik di Universitas Nasional.



Chontina Siahaan >

adalah seorang dosen tetap Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia. Ia adalah Wakil Ketua Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan, kemudian melanjutkan gelar magister Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia. Ia adalah lulusan doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran.



Mita Yesyca >

adalah dosen tetap Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia. Penelitian dan publikasi sebelumnya berkisar pada topik pembangunan ekonomi dan pemberdayaan perempuan melalui keuangan mikro. Bersama dengan rekan-rekannya, ia juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan perempuan. Mita mengajar Teori Hubungan Internasional, Ekonomi Politik Internasional, Metode Berpikir Kritis dan Penulisan Ilmiah serta Hubungan Internasional di Eropa. Ia menerima gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam Hubungan



Internasional dari Universitas Indonesia dan Master of Science dalam Gender and International Relations dari University of Bristol, Inggris.

Dandy Sendayu Noron >

bekerja di Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UKI, dengan tugas mengurus mahasiswa beasiswa dan kewirausahaan. Pengurus Sekolah Minggu (Pelayanan anak) dan pemuda mulai dari tingkat Klasis Jakarta, hingga Sinode GKP. Bersama-sama dengan Pemuda PGI melaksanakan kegiatan YOUTH FORUM Pre-Assembly Christian Conference of ASIA (2015). Menjadi Utusan Pemuda PGI untuk kegiatan Ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara 2013 ke Nias dan Mentawai. Pengurus Yayasan Badan Sosial Darma Kasih Gereja Kristen Pasundan yang mengurus Pantí Aсуhan, Pelayanan kebencanaan dan HIV AIDS (2015). Sejak 2014 hingga kini berpindah dari LPPM ke Badan Penjaminan Mutu (BPM) UKI. Pada tahun 2016 menggagas pendirian yayasan bagi pembangunan Mentawai. Yayasan Uglá Mentawai Simariuru resmi berdiri 14 November 2018 dan menjabat sebagai dipercaya Ketua Pengurus.





Eka Chrisbuwono Herlambang >
adalah seorang Creative Design dan Manajer Promosi di Arlyn Tour & Travel dan Omah Design. Ia juga bekerja sebagai Creative Design, Penulis dan Fotografer di Majalah Corong, Majalah Inspirator, E-Magz dan juga Majalah Ekonomi Hijau. Menempuh gelar sarjana Ilmu Komunikasi FISIPOL UKI.

Shyintia adalah mahasiswa aktif mahasiswa aktif Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia. Ia menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) FISIPOL UKI. Ia juga adalah Mahasiswa Berprestasi FISIPOL UKI (2018). Ia meraih peringkat ke-3 sub-tema Industri dalam Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia di Universitas Soedirman, Purwokerto. Menempuh Sekolah Menengah Atas di SMA St. Christoper I. Bekerja sebagai Decorator Freelance di Adorable Decoration.



Nadya Carolina adalah mahasiswa aktif Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia. Ia adalah Wakil Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIPOL UKI. Ia meraih Best Position Paper Economic Chamber pada The Third Model AIPA (2019). Ia juga meraih prestasi sebagai Mahasiswa Berprestasi FISIPOL UKI (2018). Ia menempuh Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di SMA Mardi Waluya.